

**A. MUHAIMIN ISKANDAR**



# **MOMENTUM UNTUK BANGKIT**

**PERCIKAN PEMIKIRAN EKONOMI, POLITIK DAN KEAGAMAAN**

# MOMENTUM UNTUK BANGKIT



# MOMENTUM UNTUK BANGKIT

A. Muhaimin Iskandar

## **Momentum untuk Bangkit**

A Muhaimin Iskandar

© LKiS, 2009

**Editor :** Umaruddin Masdar

**Layout :** Rizal Mahmudi

**Cover :** Imambang Ali

Penerbit:

**LKiS Yogyakarta**

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 5,4 Yogyakarta

Telp./Faks: 0274-417762

e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I, Oktober 2009

ISBN: 979-946622-9

# DAFTAR ISI

**Pengantar Penulis ~ v**

**Daftar Isi ~ vii**

1. Globalisasi, Agama, dan Kemiskinan ~ 1
2. Islam, Kepemimpinan, dan Kemiskinan ~ 7
3. Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Bangsa ~ 13
4. Demokrasi dan Mentalitas Elite ~ 19
5. Kaum Muda, Krisis Ideologi, dan Kepemimpinan Nasional ~ 25
6. Momentum untuk Bangkit ~ 39
7. Spirit al-Qur'an untuk Mengatasi Krisis Global dan Kepemimpinan ~ 45
8. Umat Islam dan Kebangkitan Nasional ~ 63
9. Kiai dan Kebangkitan Nasional ~ 69
10. Khilafah, NKRI, dan Visi Nasionalisme Islam ~ 75
11. Transfigurasi Gerakan Islam ~ 87

12. Puasa dan Visi Transformatif Islam ~ 93
13. Puasa Terkepung Kultur Seremonial ~ 99
14. Belajar Politik kepada Tokoh-Tokoh Besar NU ~ 105
15. Berguru kepada Pendiri NU ~ 111
16. Keteladanan Politik Kiai ~ 117
17. NU, Jendela Rumah Indonesia ~ 123
18. NU dan Transformasi Bangsa ~ 129
19. NU dan Demokratisasi Bangsa ~ 137
20. NU dan Perubahan Masyarakat Bangsa ~ 143
21. NU sebagai Gerakan Ekonomi, Pemikiran, dan Pendidikan ~ 149
22. Menjaga NU yang Moderat dan Toleran ~ 155
23. 63 Tahun Resolusi Jihad: Nasionalisme Politik Ulama NU ~ 161
24. Perintah Kiai-Kiai kepada Saya ~ 167
25. PKB Baru dan Semangat Perubahan ~ 173
26. Optimisme Menyongsong 2009 ~ 179
27. SBY dan Visi Politik NU-PKB ~ 185
28. Tugas Kepemimpinan Nasional ke Depan ~ 193

**Daftar Pustaka ~ 199**

**Sumber Tulisan ~ 203**

**Indeks ~ 205**

**Biodata Penulis ~ 215**

## PENGANTAR PENULIS

Buku ini berisi kumpulan tulisan saya yang pernah dipublikasikan di berbagai surat kabar, seperti *Jawa Pos*, *Indo Pos*, *Seputar Indonesia*, *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat*, *Pikiran Rakyat*, dan *Surya*. Ada juga pidato politik dan ilmiah, serta tulisan untuk sebuah buku yang diterbitkan Kementerian Menegpora dalam rangka menyambut 100 Tahun Sumpah Pemuda.

Kebanyakan tulisan dalam buku ini merupakan respons atau refleksi atas suatu momentum sehingga ada banyak sekali tema yang dibicarakan, mulai dari kepemimpinan, agama, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial dan politik yang lain yang bersifat aktual.

Saya berterima kasih kepada Pemimpin Redaksi Harian *Jawa Pos*, *Indo Pos*, *Seputar Indonesia*, *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat*, *Pikiran Rakyat*, dan *Surya* yang telah bersedia mempublikasikan tulisan-tulisan saya. Tidak lupa saya juga berterima

kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan komentar dan kritik terhadap tulisan-tulisan itu baik melalui pesan singkat, telepon maupun silaturahmi langsung dengan saya.

Semoga buku ini bisa menjadi bahan refleksi dan amal jariyah yang bermanfaat, serta meningkatkan tali dan kualitas silaturahmi kita bersama dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa dengan cinta.[]

Jakarta, Akhir Ramadan 1430 H  
September 2009

**A Muhaimin Iskandar**

~ 1 ~

## **GLOBALISASI, AGAMA, DAN KEMISKINAN**

Globalisasi telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terelakkan. Diundang atau tidak, disukai atau dibenci, ia pasti datang seperti datangnya matahari di waktu siang. Karena itu, tidak heran jika negara-negara sosialis pun tetap menerimanya, meski dengan pengaturan yang penuh perhitungan. Rusia misalnya, menerima globalisasi dengan menerapkan kebijakan “liberalisme terkontrol”. Sementara Cina menerapkan “satu negara dua sistem”.

Mengapa penerimaan globalisasi perlu diatur dengan penuh strategi? Tidak lain dan tidak bukan agar kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, khususnya penduduk miskin, dapat dilindungi dan dikembangkan dengan baik.

Mohammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian 2006 dari Bangladesh, mengatakan bahwa perdagangan bebas dalam era

globalisasi seperti ratusan jalur jalan tol saling silang melintasi dunia. Jika itu merupakan jalan bebas hambatan tanpa lampu merah, batas kecepatan, batasan ukuran, bahkan tanpa marka jalur, maka semua jalur hanya akan dipenuhi truk raksasa dari ekonomi paling kuat dunia. Kendaraan kecil – truk pick-up, gerobak, becak, sepeda ontel atau pejalan kaki – akan tersingkir dari jalur itu.

Menurut Yunus, seperti diungkapkan dalam bukunya *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (2008), agar globalisasi bermanfaat bagi semua, kita harus punya hukum lalu lintas, sinyal, dan polisi lalu lintas yang adil. Aturan “yang terkuat mendapat semua” harus diganti dengan aturan yang menjamin bahwa yang termiskin punya tempat di jalur bebas hambatan itu. Bila tidak, globalisasi hanya akan menguntungkan yang kuat (terutama secara modal atau finansial), dan semakin menciptakan dunia yang penuh paradoks: globalisasi berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan kriminalitas.

## **Agama dan Kemiskinan**

Di antara sistem nilai yang memberikan perhatian khusus pada masalah kemiskinan dan mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap orang miskin dan mereka yang terpinggirkan adalah agama. Bisa dikatakan, semua agama hadir sebagai bentuk pembelaan terhadap mereka yang miskin dan lemah.

Agama, kata Hassan Hanafi (1981), adalah revolusi itu sendiri, dan para nabi merupakan revolusioner sejati. Musa merefleksikan pembebasan melawan otoritarianisme. Isa adalah contoh revolusi ruh atas dominasi materialisme. Dan Muhammad SAW merupakan tauladan bagi kaum papa, hamba sahaya, dan komunitas tertindas berhadapan dengan para konglomerat Quraisy dalam perjuangan menegakkan masyarakat yang bebas, penuh kasih persaudaraan, dan egaliter.

Atau seperti dikatakan Asghar Ali Engineer (1993), Islam adalah agama yang membebaskan masyarakat (*a liberating religion*) dari struktur tidak adil yang menyebabkan orang-orang miskin terpinggirkan. Nabi Muhammad SAW datang di tengah masyarakat Arab yang struktur sosialnya mencerminkan ketidakadilan dan penindasan yang kuat atas yang lemah.

Dengan inspirasi wahyu ilahiyah, Nabi Muhammad mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukkan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki). Karena itu, para penguasa Makah lebih merasa terusik oleh implikasi-implikasi revolusioner teologi Muhammad ketimbang dakwahnya yang menentang penyembahan berhala.

Agama, dengan demikian, bisa memberi makna dan warna penting dalam proses globalisasi yang manusiawi. Nilai-nilai dan spirit keagamaan universal bisa menjadi landasan bagi pengembangan masyarakat yang adil dalam dunia yang terintegrasi secara global.

## Fungsi negara

Namun agama adalah tata nilai, bukan sistem itu sendiri. Tugas membangun sistem ada di tangan negara. Menjadi tugas negara untuk membangun sistem yang bisa melindungi kepentingan seluruh warga, terutama penduduk miskin dan mereka yang terpinggirkan.

Perlindungan terhadap penduduk miskin sekurang-kurangnya dapat dimanifestasikan dalam dua aspek. *Pertama*, aspek hukum yang melindungi masyarakat miskin untuk mencapai penghidupan yang layak dalam persaingan ekonomi nasional dan internasional. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan menengah, untuk menyebut beberapa contoh, harus dilindungi dan diberi fasilitas khusus.

Seperti dikatakan pemikir Prancis, Marquis de Condorcet, kemiskinan dapat diatasi dengan memperbaiki struktur kelembagaan masyarakat. Dan tugas ini secara konstitusional menjadi wilayah garapan negara.

*Kedua*, subsidi untuk masyarakat miskin agar mereka bisa bertahan hidup dan mengembangkan usahanya. Subsidi adalah kebijakan ekonomi di semua negara, yang liberal sekalipun. Liberalisasi ekonomi dengan pencabutan subsidi bisa dikatakan merupakan jargon yang tidak ada dalam kebijakan nyata.

Amerika Serikat misalnya, tetap memberikan subsidi pada sektor pertanian. Dengan *Farm Bill* yang disahkan Mei 2002, AS memberikan subsidi sektor pertanian mencapai 300 milyar dollar AS per tahun. Demikian juga negara-negara Uni Eropa.

Benar apa yang dikatakan Robert J Samuelson dalam sebuah tulisannya, “Goodbye to Global Free Trade” (*Newsweek*, 31 Desember – 7 Januari 2008), walaupun perekonomian negara-negara di dunia saling tergantung dan terintegrasi, mereka juga berkembang ke arah nasionalistik. Mereka memberlakukan kebijakan yang proteksionistik, menguntungkan dirinya sendiri atas biaya negara-negara lain.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak memberikan perlindungan, pelayanan, dan fasilitas khusus kepada masyarakat miskin. Perlindungan, pelayanan, dan pengembangan potensi masyarakat miskin mempunyai makna strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengandung sisi moral dan etis dari sudut pandang agama-agama. []



~ 2 ~

## **ISLAM, KEPEMIMPINAN, DAN KEMISKINAN**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu yang lalu, sebanyak 16,7 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 1,55 dolar AS per hari, atau setara dengan Rp15.000.

Sebelumnya, Bank Dunia melansir bahwa sebanyak 108,78 juta orang atau 49% dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Menurut Bank Dunia, kalangan ini hidup dengan kurang dari 2 dollar AS atau Rp19.000 per hari. Akibat krisis global saat ini, angka kemiskinan dan pengangguran potensial naik.

Kemiskinan memang menjadi masalah nasional, dan juga global. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk miskin di dunia

terus meningkat, sejalan dengan kuatnya arus globalisasi. Ini adalah sebuah paradoks. Di Amerika Serikat, seperti diungkapkan Dr Ravi Batra, seorang pakar ekonomi AS keturunan India, di awal milenium ini ada 39 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal pada tahun 1973 jumlah mereka baru 23 juta orang. Setiap tahun, penduduk AS yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah satu juta orang.

Banyak ahli ekonomi yang berpendapat bahwa terus meningkatnya angka kemiskinan menunjukkan kelemahan liberalisme atau tepatnya fundamentalisme pasar. Itu pun tidak ada ada negara yang menerapkan liberalisme ekonomi secara total. Kalau liberalisme diterapkan secara penuh, jumlah angka kemiskinan akan jauh meningkat dan bergerak naik lebih cepat.

## **Islam dan Kemiskinan**

Semua agama mendeklarasikan keutamaan dan kewajiban untuk peduli kepada kaum miskin dan masyarakat yang lemah atau terpinggirkan. Para nabi adalah pembela dan pendamping kaum miskin dan mereka yang tertindas.

Nabi Muhammad SAW misalnya, hadir dengan konsep pengembangan masyarakat yang makmur, adil, dan merata dengan mengakhiri sistem sosial yang eksploitatif dan tidak adil. Salah satu ajaran penting yang dibawa adalah anjuran untuk peduli dan menyantuni kaum miskin. Dalam surat *al-Ma'un* disebutkan bahwa seorang muslim yang tidak menyantuni kaum

miskin adalah termasuk orang yang mendustakan atau mengingkari agama.

Zakat, infak, dan sadaqah juga menjadi konsep penting dalam ajaran Islam dalam menangani masalah kemiskinan. Konsep ini bertujuan agar ada keadilan dan pemerataan sehingga uang dan modal tidak hanya berputar-putar atau dimonopoli oleh orang kaya semata (*kai la yakunu dulatan bainal aghniya*).

Zakat terutama diharuskan untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, yaitu mereka yang berada di garis kemiskinan dan di bawahnya. Merekalah kelompok yang sering mengalami kerentanan dan ketidakberdayaan sehingga terus-menerus terjebak dalam – apa yang disebut oleh Philip Kotler, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth* (1997) – lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan (*the vicious circle of poverty and backwardness*).

Karena itu, dalam ajaran Islam kepedulian kepada kaum miskin dan upaya terus-menerus untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan merupakan ajaran yang sangat penting. Namun, betapapun kuatnya seruan untuk peduli kepada kaum miskin, fungsi agama tetap sebagai seruan moral yang tidak mempunyai kekuatan memaksa. Islam memang mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya, juga menganjurkan sadaqah, dan lain-lain. Tetapi, itu semua tetap masih sebatas anjuran moral sehingga tidak akan berdampak signifikan jika tidak ditopang

oleh suatu sistem ekonomi dan sosial yang memihak kepada kaum miskin dan kelas menengah ke bawah secara umum.

Tugas untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan melindungi kepentingan kaum miskin bukan lagi merupakan tugas atau wilayah agama, melainkan merupakan tugas negara sebagai pemegang kekuasaan koersif. Tanpa ada keberanian dari para pemimpin untuk membangun sistem demikian, konsep-konsep ekonomi, seperti zakat, infak, dan sadaqah hanya akan bersifat karitatif, dan tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan.

## **Peran Negara**

Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. *Pertama*, menurut konstitusi kita, seperti disebutkan dalam UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. *Kedua*, secara teoretis, seperti disebutkan Robert Chambers (1983), kemiskinan merupakan akibat dari adanya pemusatan kekayaan dan kekuasaan.

Pemusatan kekayaan dan kekuasaan memang merupakan sesuatu yang melekat dalam sistem politik dan ekonomi liberal. Hal ini bukan saja bertentangan dengan konstitusi kita, melainkan juga bertentangan dengan inti ajaran Islam. Dengan demikian, pada dasarnya liberalisme politik dan ekonomi bertentangan dengan UUD 1945 dan ajaran Islam.

Tetapi, liberalisme juga tidak bisa ditolak 100%. Kita bisa belajar dari Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin yang menerapkan sistem “liberalisme terkontrol”. Dengan sistem seperti itu, Rusia yang sudah hancur akibat liberalisasi total di bawah Gorbachev bisa kembali bangkit sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer dunia.

Untuk aspek-aspek strategis dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara tetap harus menjamin bahwa kepentingan nasional dan rakyat secara keseluruhan benar-benar terlindungi. Jangan karena alasan-alasan jangka pendek seperti defisit anggaran atau yang lain, aspek-aspek strategis dari perekonomian nasional diprivatisasi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya dan akibat-akibat lain yang tidak kita harapkan (*unintended consequences*).

Di AS sendiri saat ini, muncul resistensi di kalangan warganya terhadap globalisasi dan liberalisasi, yang ditandai dengan bangkitnya kembali sentimen proteksionisme. Kita di sini juga perlu seperti itu dengan cara-cara yang tetap santun dan cerdas. Dan untuk itu, diperlukan pemimpin nasional yang visioner, tegas dan berani. Pemimpin yang berani melindungi kepentingan nasional dan – meminjam istilah Mohammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2006 dari Bangladesh – memastikan bahwa kaum miskin mempunyai tempat tersendiri yang benar-benar aman di jalur bebas hambatan globalisasi. Di sinilah kita melihat bahwa agama dan politik bersifat komplementer.[]



~ 3 ~

## **KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN MASA DEPAN BANGSA**

Dalam beberapa tahun ke depan, satu atau dua dekade, wajah Indonesia akan sangat ditentukan oleh dua hal penting yang berawal dari realitas politik di masa kini. *Pertama*, ada atau tidaknya suatu kepemimpinan nasional yang kuat. *Kedua*, kemampuan untuk memanfaatkan dan menyukkseskan tiga momentum besar yang ada saat ini.

### **Kepemimpinan Nasional**

Kurang lebih dalam satu dasawarsa terakhir, dinamika politik dan ekonomi di tingkat global memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai bangsa, yaitu bahwa kepemimpinan nasional yang kuat, berani, dan visioner telah mampu membawa sebuah negara yang mengalami krisis menuju jalur yang benar menuju kebangkitan dan kemandirian.

Rusia mampu meraih kembali kejayaannya sebagai negara adidaya karena pemimpin nasionalnya yang kuat bisa menjinakkan liberalisasi politik dan ekonomi yang terlanjur dibuka oleh Mikhail S Gorbachev. Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia mampu meminimalisasikan akses negatif dari proses globalisasi ekonomi dengan mengimplementasikan liberalisasi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya, istilahnya “liberalisme terkontrol”. Dengan keteguhan dan keberanian pemimpin nasionalnya, Rusia tidak bisa didikte oleh negara lain, tetapi juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua negara.

Demikian juga negara-negara di kawasan Amerika Latin yang sedang bangkit menjadi kekuatan baru di samping Cina dan India di kawasan Asia. Kebangkitan negara-negara itu tidak lepas dari kepemimpinan nasionalnya yang kuat. Tidak heran, jika berabad-abad yang lampau, pemikir politik Islam Imam al-Mawardi dalam kitabnya, *Adab ad-Dunya wad-Din* menyebutkan bahwa suatu negara bisa bangkit dan mewujudkan kesejahteraan di kalangan rakyatnya jika di dalamnya ada pemimpin yang kuat dan berani (*as-sulthan al-qahir*).

### Tiga Momentum

Perubahan menuju sistem politik yang stabil dan yang terkonsolidasi, serta sistem ekonomi yang membawa pada kesejahteraan umat (*al-maslahah al-‘ammah*), pada dasarnya merupakan proses jangka panjang. Dan kita harus menempati-

kannya sebagai upaya jangka panjang. Tidak cukup satu atau dua tahun, tapi satu atau dua dekade, bahkan satu atau dua generasi.

Jika perubahan itu tidak diletakkan dalam kerangka jangka panjang, maka bangsa ini akan kehilangan fokus untuk menentukan mana yang menjadi kebijakan yang bersifat darurat-jangka pendek dan mana yang menjadi kebijakan berjangka panjang. Pada akhirnya, semua akan berjalan tumpang tindih, bahkan saling mengunci sehingga bukan perubahan yang dihasilkan, melainkan kemunduran yang tak terhindarkan.

Sebagai proses jangka panjang, sepuluh tahun setelah reformasi, saat ini bangsa Indonesia sedang berada di tengah tiga momentum penting yang menentukan masa depannya. Keberhasilan untuk memanfaatkan dan menuntaskan momentum ini akan memungkinkan terciptanya kondisi dan perubahan di masa depan sesuai apa yang dicita-citakan.

*Pertama*, momentum transisi politik pasca reformasi. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab selama periode kenabian, yang dibangun adalah pangkalan-pangkalan pendaratan untuk suatu tatanan masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan ajaran Islam. Bisa dikatakan, periode kepemimpinan Nabi SAW adalah masa transisi dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban. Baru di masa *al-Khulafa ar-Rasyidun*-lah sistem birokrasi ditata dengan baik, misalnya menyangkut sistem pajak dan administrasi negara, khususnya pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi, transisi

dari masyarakat jahililiyah menuju “masyarakat Islam” memerlukan waktu lebih dari dua dekade.

Saat ini kita juga sedang berada pada masa transisi dari sistem lama menuju sistem baru yang lebih demokratis, stabil, dan berkeadilan. Dalam masa transisi, sebagaimana preseden pada sejarah Islam periode awal, yang harus dibangun adalah nilai-nilai dan fondasi politik yang kokoh untuk Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Kalau bangsa ini gagal membangun fondasi itu, maka momentum transisi ini tidak bermakna. Dan hanya dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan berani, momentum transisi ini akan bisa dituntaskan lebih cepat dan terarah.

*Kedua*, momentum regenerasi kepemimpinan. Masa transisi politik juga merupakan momentum regenerasi kepemimpinan. Setidaknya kita sudah mengalami empat kali pergantian presiden selama masa transisi ini (dari Soeharto ke Habibie, Habibie ke KH Abdurrahman Wahid, dari Gus Dur ke Megawati, dan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono).

Regenerasi kepemimpinan memang suatu keharusan sejarah yang tidak mungkin dilawan. Karena setiap pemimpin punya masanya, punya momentumnya, dan masa atau momentum itu ada batasnya, tidak mungkin dipertahankan terus karena bertambahnya usia para pemimpin atau karena kebutuhan zaman yang sudah lain.

Namun, regenerasi juga tidak bisa dipaksakan karena pemaksaan itu pasti akan kontraproduktif terhadap regenerasi

itu sendiri. Regenerasi harus ditradisikan dan di-*manage* dengan baik, dengan membangun sistem kepemimpinan nasional yang mengkombinasikan antara “pemimpin tua” dan “pemimpin muda” (saya beri tanda petik karena pembelahan tua dan muda bisa menyesatkan) dalam kolaborasi yang bersifat komplementer. Dan terobosan seperti itu, tentu saja membutuhkan pemimpin nasional yang berani.

*Ketiga*, momentum transisi hegemoni di tingkat global. Transisi dan sekaligus krisis hegemoni pada sistem dunia saat ini, pada mulanya terjadi sebagai akibat dari semakin terkonsentrasinya Amerika Serikat dalam upaya peningkatan sumber daya militer. Peningkatan itu dilakukan agar AS dapat bertindak sebagai “polisi dunia”. Akibatnya, terjadi sentralisasi kapabilitas militer global ke tangan AS. Sayang, ekspansi itu tidak disertai oleh dukungan persediaan sumber daya finansial global akibat pergeseran akumulasi finansial ke pasar-pasar yang lebih menjanjikan (Giovanni Arrighi & Beverly J. Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, 1999).

Krisis itu secara cerdas dimanfaatkan oleh para pemimpin di negara-negara, seperti Amerika Latin, Rusia, Cina, India, dan bahkan juga Iran. Di tengah krisis hegemoni itu, dengan kepemimpinan nasionalnya yang kuat dan berani, negara-negara tersebut bisa bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru di tengah percaturan geopolitik dunia. Selain AS dan sekutunya (Inggris, Australia, dan Kanada), kini ada tiga blok baru yang menjadi kekuatan pengimbangannya, yaitu (1) negara-negara

Amerika Latin; (2) Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang beranggotakan Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Sementara India, Iran, Mongolia, Pakistan, dan Turkmenistan berstatus sebagai peninjau; dan (3) Uni Eropa. Ada juga blok yang melintasi batas-batas geografis negara-bangsa seperti BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina).

Pada tahun 1945, ketika terjadi krisis dan transisi hegemoni akibat Perang Dunia II, para pemimpin nasional kita dengan cerdas dan berani berhasil mencuri momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Krisis dan transisi hegemoni di tingkat global saat ini, yang diperparah dengan krisis finansial, juga menjadi momentum yang harus dimanfaatkan secara tuntas oleh kita sebagai bangsa, oleh para pemimpin nasional kita untuk mewujudkan cita-cita kebangkitan dan kemandirian bangsa.

Di samping soal kepemimpinan nasional yang kuat dan berani, kebangkitan beberapa negara dan blok di beberapa kawasan itu juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kebangkitan dan kemandirian itu hanya bisa terjadi jika suatu bangsa bisa menjadi dirinya sendiri, tidak sekadar mengekor kebijakan dan kepentingan dari luar. Itu artinya, kepemimpinan nasional yang kuat bertumpu pada dua hal mendasar, yaitu kepentingan nasional sebagai pusat orientasi, dan tradisi atau budaya sendiri sebagai pusat gravitasi, tempat sistem yang dibangun itu berpijak. Sesuatu yang tidak mudah dan sederhana, kecuali bagi mereka yang benar-benar berani dan berketetapan hati.[]

~ 4 ~

## DEMOKRASI DAN MENTALITAS ELITE

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu bahwa demokrasi adalah alat atau sarana dan bukan tujuan, menuai banyak respons baik yang pro maupun kontra. Keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tanpa bermaksud mendukung apa yang dikatakan JK itu, menurut hemat saya, apa yang terjadi dalam proses demokratisasi Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir memang perlu ditata kembali. Bahkan cara pandang kita terhadap demokrasi perlu dirumuskan ulang agar lebih sesuai dengan kenyataan dan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.

### Politik dualistik

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi ketika kita memperbincangkan demokrasi berikut problematikanya di Indonesia.

*Pertama*, ketika memperbincangkan demokrasi, sadar atau tidak, kebanyakan kaum terdidik kita selalu merujuk pada demokrasi dalam pengertian, sejarah, dan praksis politik di Barat. Karena itu, demokrasi cenderung menjadi wacana elitis di kalangan politisi dan kaum akademisi. Ia terus direproduksi dan didaur ulang meski kultur politik demokratis di kalangan elite sendiri tidak tumbuh dengan baik seperti yang diimajinasikan. Sementara rakyat mempunyai pengertian dan tradisi sendiri tentang demokrasi berdasarkan pengalaman nyata dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Dalam konteks ini, sebagaimana dulu JH Boeke pernah mengenalkan teori ekonomi dualistik, kita tampaknya juga perlu mengakomodasi dan mengapresiasi adanya sistem politik dualistik yang hidup di tengah bangsa ini. Di satu sisi, ada sistem politik liberal dalam pengertian Barat yang hidup di kalangan elite. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Barat, yaitu pemikiran yang - meminjam istilah Maude Barlow (2001) - dikendalikan oleh *free-market ideology* dan gaya hidup Barat.

Sementara di sisi lain ada demokrasi lokal yang berbasis pada tradisi setempat. Kita harus arif untuk tidak memaksakan demokrasi dalam pengertian Barat menjadi tata nilai universal, karena hal itu bisa mematikan nilai-nilai dan kreativitas masyarakat dan tradisi yang ada. Dan bangsa tanpa tradisi pada akhirnya tidak akan pernah memiliki sistem dan kultur politik yang kokoh.

Di samping soal pengembangan nilai-nilai dan kebudayaan nasional, kearifan untuk tidak memperlakukan demokrasi Barat secara universal juga didasarkan pada pertimbangan filsafat politik yang sangat mendasar. Seperti dikatakan Seyyed Hossein Nasr dalam bukunya, *A Young Muslim's Guide to the Modern World* (1993), filsafat Barat tidak disandarkan pada “sesuatu yang permanen,” tetapi pada penggunaan pikiran dan data empiris sehingga selalu muncul paham-paham dan *trend* baru.

Sejak masa pencerahan, Barat telah meninggalkan tradisionisme Kristen yang berusaha mencapai sintesis antara iman dan akal, seperti digagas St Thomas Aquinas. Pemikiran Barat memberontak “melawan” Tuhan, dan kemudian lahirilah paham seperti rasionalisme, empirisme, humanisme, dan liberalisme, yang menjauhkan manusia dari dimensi sakral.

Sedangkan filsafat atau pandangan hidup Islam - termasuk filsafat Timur - selalu disandarkan pada “sesuatu yang tetap,” yaitu al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran Islam juga tidak pernah melawan Allah. Karena itu, upaya-upaya liberalisasi pemikiran masyarakat Islam, kalau tidak dimengerti betul berbedasar landasan filsafat ini, hanya akan menghasilkan perubahan di permukaan saja.

*Kedua*, demokratisasi dalam pengertian Barat pada dasarnya adalah titik masuk bagi proses liberalisasi ekonomi dan kultural secara menyeluruh. Demokratisasi adalah proses menuju pelembagaan ekonomi pasar (*marketization*) dan sekaligus awal pembentukan suatu tata monokultur global.

Dalam arus demikian, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, demokratisasi cenderung berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Pada saat yang sama ia berjalan seiring dengan degradasi kultur yang ditandai dengan hancurnya tradisi dan nilai-nilai yang ada dalam kultur masyarakat setempat.

Hal itu bisa terjadi, meminjam istilah Sartono Kartodirdjo (1984), karena yang menjadi motivasi dasar liberalisme pada hakikatnya adalah eksploitasi segala sumber daya ekonomi untuk kepentingan kapitalisme internasional. Sistem Tanam Paksa pada paro pertama abad ke-19 misalnya, adalah bentuk eksploitasi menurut merkantilisme. Sedangkan sistem liberal di masa kini merupakan eksploitasi atas nama globalisasi dan demokratisasi.

## **Kepemimpinan Nasional**

Proses seperti itu bisa diatasi dan diminimalisasikan jika kita bisa membangun suatu kepemimpinan nasional yang kuat seperti yang terjadi di beberapa negara Asia dan Amerika Latin. Rusia misalnya bisa kembali menjadi negara adidaya karena pemimpin nasionalnya yang kuat bisa menjinakkan liberalisasi politik dan ekonomi yang terlanjur dibuka oleh Mikhail S Gorbachev.

Kepemimpinan nasional yang kuat bisa terbentuk dengan dua syarat utama. *Pertama*, adanya figur pemimpin nasional yang berani, berkarakter, visioner, dan tulus hati (*as-shidq*). Yaitu,

pemimpin yang berani mengambil keputusan yang tegas jika menyangkut nasib rakyat dan kepentingan nasional yang strategis.

Cina atau Rusia sama sekali tidak menolak liberalisasi, tetapi figur seperti Vladimir Putin mampu meminimalisasikan akses negatif dari proses itu dengan mengimplementasikan liberalisasi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya, istilahnya “liberalisme terkontrol”. Dengan keteguhan dan keberaniannya, ia tidak bisa didikte oleh negara lain, tetapi juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua negara.

*Kedua*, kepemimpinan nasional yang kuat mensyaratkan bersatunya para elite politik. Tanpa ada persatuan di kalangan elite — meski mereka berbeda partai politik atau agamanya — maka kepemimpinan nasional akan rapuh, cenderung pragmatis, hedonistik, serta mudah diintervensi oleh kepentingan non-nasional.

Karena itu, para pemimpin seharusnya mulai belajar untuk rendah hati dan dewasa. Mereka perlu meninggalkan egoisme kelompok dan pribadi untuk suatu kepentingan strategis dan jangka panjang. Dengan kebersamaan itu, secara bertahap kompleksitas persoalan bangsa akan bisa diselesaikan. Tanpa persatuan di kalangan elite, kebangkitan bangsa dari keterpurukan akan menjadi jargon belaka.

Mentalitas elite adalah kunci utama menuju perubahan. Sistem atau nilai apapun yang dijalankan, pada akhirnya yang

menentukan adalah mentalitas para elitnya sendiri. Demokratisasi seperti apapun yang dipilih, seharusnya diorientasikan secara nyata untuk kesejahteraan rakyat dan penguatan identitas nasional dan karakter bangsa.[]

~ 5 ~

## **KAUM MUDA, KRISIS IDEOLOGI, DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL**

### **Pengantar**

Dalam bukunya, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (1972), Benedict R O'G Anderson menyatakan bahwa pemuda merupakan kekuatan politik yang paling menonjol pada masa revolusi menjelang dan setelah kemerdekaan. Demikian juga pada masa-masa transisi politik penting seperti tahun 1966 dan tahun 1998, kaum muda senantiasa menjadi kekuatan yang sangat menentukan.

Sejarah bangsa-bangsa juga mencatat peran penting kaum muda dalam perubahan politik menyeluruh di masing-masing bangsa itu. Beberapa revolusi penting, seperti revolusi pemuda

di Perancis tahun 1968, digerakkan dan bersumber dari kreativitas dan keberanian politik kaum muda.

Tidak heran jika Bung Karno pernah mengatakan, “Beri aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncang dunia!”. Demikian juga ketika sejumlah kiai dan para tokoh Partai Nahdlatul Ulama pada tahun 1952 sangsi apakah Partai NU bisa besar sehingga ragu untuk keluar dari Masyumi, dengan tegas KH Wahab Chasbullah menyatakan: “Kalau tuan-tuan ragu, silakan terus bergabung dengan Masyumi. Biarkan saya sendiri memimpin NU sebagai partai politik yang terpisah dari Masyumi. Saya hanya butuh seorang pemuda untuk menemani. Tuan-tuan boleh lihat nanti..!”

Kaum muda dan perubahan adalah dua hal yang sulit dipisahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kaum muda adalah kelompok di mana idealisme masih tertanam kokoh, kreativitas tumbuh tiada henti, spirit perubahan terawat subur, dan orientasi hidup pada nilai masih steril dari kepentingan pragmatis dan sesaat.

Dengan karakter psiko-sosial seperti itu, kaum muda selalu menjadi faktor dinamisasi masyarakat bangsa menuju perubahan yang lebih baik, sebagaimana idealisme dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi kaum muda. Kaum muda adalah calon pemimpin bangsa dan pemimpin dalam perubahan itu sendiri.

Peran dan pemikiran kaum muda sangat dibutuhkan bangsa ini, di saat krisis tengah melanda berbagai bidang kehidupan.

Sebagai kelompok strategis yang berperan penting dalam setiap perubahan, tentu kaum muda bisa memberikan kontribusi bagi berbagai upaya terobosan yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan menyeluruh di negeri ini. Mengembalikan arah bangsa pada relnya sesuai cita-cita nasional yang dirumuskan para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Mewujudkan kepemimpinan nasional yang kuat dan berkarakter. Dan menjadikan politik sebagai media perjuangan seluruh warga bangsa.

## **Kaum Muda dan Perubahan Bangsa**

Pemikir filsafat, AN Whitehead, pernah mengatakan bahwa yang pasti dalam setiap proses kehidupan manusia dan dan bangsa-bangsa adalah perubahan (*change*). Hanya saja, perubahan itu ada yang berjalan ke arah yang baik dan maju (progresif), dan juga perubahan yang justru merupakan proses kemunduran (retrogresif). Ke mana perubahan akan bergerak sangat tergantung pada dua hal, yaitu ideologi yang menjadi arah perjalanan suatu bangsa dan kepemimpinan yang menjaga ideologi dan kepentingan bangsa itu sendiri. Dan bangsa ini, hari ini, sedang berada dalam situasi paradoks: terlihat maju di permukaan, tetapi mundur dan krisis di dalamnya. Itu semua berpangkal pada dua hal, yaitu krisis ideologi dan krisis kepemimpinan.

Di permukaan, secara statistik, simbolik, dan prosedural, bangsa ini mengalami kemajuan luar biasa. Angka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga pada level yang stabil. Demokrasi modern

bisa dilaksanakan dengan baik. Simbol-simbol peradaban modern juga dikonsumsi dalam gaya hidup masyarakat secara luas.

Namun, secara kultur, moral, nilai-nilai, dan spiritualitas, bangsa ini sedang mengalami kemunduran luar biasa. Dengan kata lain, bangsa ini tengah mengalami krisis ideologi, moral, nilai-nilai, dan krisis spiritualitas. Ke mana bangsa ini akan menuju, tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti karena tidak ada ideologi dan kepemimpinan kuat yang mengarahkannya. Atas landasan apa bangsa ini akan bergerak ke depan, juga tidak ada yang bisa menjawab dengan percaya diri karena terjadi krisis ideologi, nilai-nilai, dan spiritualitas.

Pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi memang bisa dijaga, tetapi ekonomi dan kultur ekonomi masyarakat semakin sulit untuk berkembang. Kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, bahkan meningkat. Pembangunan ekonomi, dengan demikian, tidak menghasilkan kesejahteraan yang luas di masyarakat.

Pemilihan presiden dan kepala daerah memang sudah dilaksanakan secara langsung sebagai ciri dari demokrasi modern, tetapi kultur kewarganegaraan (*civic culture*) tidak tumbuh, moralitas elite juga mengalami degradasi. Pelembagaan politik memang berhasil membangun tradisi demokrasi prosedural, tetapi substansi demokrasi masih belum menjadi kesadaran utuh warga negara dan para pemimpin.

Gaya hidup modern juga tumbuh subur di mana-mana, tetapi cara berpikir dan sikap orang modern tidak muncul. Simbol-simbol dan ritus agama memang semakin diminati, tetapi spiritualitas masih jauh panggang dari api. Keberagamaan pun menjadi kering, dangkal, dan kaku. Gaya hidup dibangun, tetapi tradisi berpikir tidak.

Dengan perkataan lain, persoalan terbesar yang dihadapi bangsa ini bukanlah krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, atau krisis politik, melainkan lebih dalam dari itu semua, yaitu krisis ideologi atau nilai-nilai, dan krisis kepemimpinan.

Namun, dalam situasi krisis seperti apapun, seperti tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa, kaum muda selalu memainkan peran penting dalam upaya-upaya kreatif membawa bangsa keluar dari krisis. Hal itu bisa terjadi karena bekerjanya suatu ideologi banyak dipengaruhi oleh cara berpikir dan aktivitas kaum muda di tengah masyarakatnya. Sementara kaum muda juga menjadi tumpuan harapan bagi kepemimpinan bangsa di masa mendatang.

## **Krisis Ideologi dan Masalah Kepemimpinan**

Ideologi, seperti dikatakan William R Liddle, menghasilkan suatu peta realitas sosial yang bisa membedakan penyebab penting perilaku manusia dari yang tidak penting, menjelaskan bagaimana masa lalu telah membentuk masa kini, dan bagaimana masa kini akan membentuk masa depan. Ideologi juga

memberikan arah tindakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang diinginkan.

Ketidakjelasan arah pembangunan suatu bangsa, karut-marut implementasi kebijakan ekonomi, dan tidak jelasnya arah pelebagaan politik, sebenarnya merupakan cermin dari suatu krisis ideologi yang sedang terjadi, seperti di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Jika situasi demikian terus berlanjut maka proses menuju negara gagal (*failed state*) tidak bisa dibendung.

Beberapa sarjana Barat seperti Daniel Bell, Seymour Martin Lipset, Edward Shils, dan Raymond Aron memang telah mengkampanyekan berakhirnya ideologi (*the end of ideology*). Perbincangan tentang ideologi dianggap telah selesai dan usang. Pandangan ini didasarkan pada konfidensi positivistik bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengambil alih dan menyelesaikan semua persoalan manusia atau masyarakat (SM Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics*, 1981: 524-565).

Namun, pemikiran seperti itu sebenarnya merupakan legitimasi dan rasionalisasi terhadap upaya pemapanan secara sistematis ideologi liberalisme yang sudah menguasai hampir seluruh muka bumi. Dengan menganggap bahwa ideologi sudah berakhir, masyarakat dipaksa untuk menerima hanya satu jenis ideologi, yaitu kapitalisme liberal. Pada awal 1990an, Francis Fukuyama menguatkan argumentasi itu dengan istilahnya

“sejarah telah berakhir” (*the end of history*) dan Kenichi Ohmae menyebut dengan “berakhirnya negara bangsa” (*the end of nation state*). Kapitalisme liberal dianggap sebagai ideologi terbaik di mana seluruh bangsa-bangsa di dunia dipaksa untuk tidak melirik alternatif lain selain menerima dan mengimplementasikannya (*the best and the rest had to follow*).

Secara faktual, Indonesia hari ini sudah sangat liberal, bahkan bisa dikatakan lebih liberal dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang lain. Liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, dan pencabutan subsidi terus gencar dilakukan, justru di saat negara-negara Barat menerapkan kebijakan ekonomi politik yang semakin protektif terhadap kepentingan nasionalnya, seperti meningkatkan subsidi untuk pertanian.

Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi di sini. *Pertama*, bahwa liberalisasi ekonomi seperti terjadi sekarang ini sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi kita. Seperti dinyatakan secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 – baik sebelum maupun sesudah diamandemen – ekonomi Indonesia bisa dikatakan cenderung pada sosialisme.

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

*Kedua*, secara faktual, semua negara di dunia tidak ada yang melawan atau menolak liberalisasi. Tetapi, sebagian besar negara bisa menerapkan liberalisasi dengan penuh kecerdasan, kewaspadaan, dan keberanian untuk “menjinakkannya”. Belajar dari beberapa negara, seperti Rusia, Cina, Malaysia, dan negara-negara di Amerika Latin, maka seharusnya kita bisa menerapkan liberalisasi ekonomi secara terbatas. Rusia misalnya, menerapkan apa yang disebut sebagai “liberalisme terkontrol”. Dan hal itu hanya bisa dibutuhkan jika kita memiliki suatu kepemimpinan nasional yang cerdas, tegas, dan berani.

Ketegasan dan keberanian adalah karakter politik kaum muda. Karena itu, dukungan dan tekanan dari kaum muda serta keterlibatan mereka dalam politik secara efektif akan mampu membentuk suatu kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dinamis, dan protektif kepada rakyat dan kepentingan nasional secara umum.

## **Proyeksi dan Fundamental Politik Kaum Muda**

Dengan melihat dan sekaligus belajar dari sejarah dan fakta kepemimpinan politik yang ada, politik kaum muda mem-

butuhkan beberapa landasan yang kokoh. Pertama, kaum muda dan seluruh komponen bangsa perlu menata kembali nalar politik (*political mindset*)-nya tentang posisi kaum muda dalam kepolitikan bangsa secara keseluruhan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa politik kaum muda itu bersifat melengkapi (komplementer) terhadap politik bangsa secara keseluruhan dari berbagai kelompok dan golongan.

Kita sudah waktunya meninggalkan cara pandang dan cara berpikir yang mengacu pada pandangan oposisi biner (*binary opposition*) terhadap kenyataan. Pandangan ini selalu membelah masyarakat menjadi dua dan mempertentangkan dua hal seperti: tradisi vs modernitas, desa vs kota, sipil vs militer, masyarakat vs negara, tua vs muda, laki-laki vs perempuan, dsb.

Pandangan oposisi biner merupakan karakter yang melekat dalam pemikiran dan filsafat Barat yang kemudian membuat Barat merasa tidak bersalah ketika melakukan penjajahan. Dalam nalar oposisi biner, penjajahan merupakan panggilan sejarah bangsa-bangsa Barat yang berperadaban (*civilized*) untuk “mengajarkan nilai-nilai kemajuan” – seperti demokrasi dan hak asasi manusia – terhadap bangsa-bangsa non Barat yang barbar dan terbelakang, khususnya di Asia dan Afrika.

Dalam kehidupan modern saat ini, nalar seperti itu juga masih jalan seperti terlihat dalam berbagai intervensi ekonomi, politik, dan militer Barat terhadap negara-negara berkembang yang dibungkus dalam wacana demokratisasi, liberalisasi ekonomi atau globalisasi.

Dengan kata lain, pandangan oposisi biner adalah pemikiran yang melegalkan dan merasionalisasi kolonialisme, imperialisme dan berbagai bentuk eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sementara dalam tradisi pemikiran bangsa-bangsa Timur, termasuk Islam, tidak dikenal oposisi biner. Masyarakat Timur mempunyai pandangan dunia (*world view*) yang bersifat biner-komplementer. Islam misalnya, mengajarkan bahwa yang kaya harus menyantuni yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, dsb.

Pembelahan kelompok masyarakat bukan dimaksudkan untuk dipertentangkan, melainkan hanya untuk menjelaskan fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan sehingga kedua belah pihak atau lebih bisa saling melengkapi dan menguatkan dalam kehidupan bersama.

Pembelahan politik antara kaum tua dan muda misalnya hanya untuk kepentingan kategorisasi, bukan untuk dipertentangkan dan saling menegasikan. Kategorisasi dibuat sebagai alat analisis agar diketahui titik lemah dan titik plus masing-masing kelompok sehingga kelompok yang satu bisa menutup kelemahan yang lain dalam kerangka politik komplementer.

Bukankah tidak mungkin membangun negara dengan hanya melibatkan anak muda saja, meninggalkan yang tua? Bukankah mustahil menyerahkan urusan politik kepada perempuan saja, menegasikan kaum Adam di dalamnya?

Karena itu, kaum muda sebaiknya juga tidak latah dan arogan dengan menyatakan bahwa hanya kaum mudalah yang bisa

menyelesaikan krisis bangsa saat ini. Pandangan dan sikap yang dewasa perlu dibangun dengan melihat bahwa politik itu selalu komplementer. Semakin dibelah dan dipertentangkan, maka semakin lemah dan sulit untuk mewujudkan kebangkitan bangsa.

Dalam bukunya, *The Staring Into Chaos: Exploration In The Decline Of Western Civilization*, B.G Brander menyatakan bahwa perubahan peradaban selalu digerakkan oleh seseorang atau kelompok minoritas saja, yang memiliki kreativitas dan kharisma luar biasa. Kaum muda adalah pemilik dan sumber kreativitas. Para politisi senior adalah sumber kharisma karena pengalaman, kematangan, dan kebijaksanaan pandangannya. Keduanya perlu bergerak bersama saling menopang dan menguatkan.

Kedua, politik kaum muda adalah politik yang berorientasi jangka panjang. Pada hakikatnya, setiap proses pembangunan masyarakat bangsa adalah sebuah proses jangka panjang. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi jangka pendek akan selalu gagal dan hanya mengakumulasi persoalan.

Dengan merumuskan bahwa politik dan pembangunan adalah suatu proses jangka panjang, maka hal pertama yang perlu dibangun adalah pangkalan-pangkalan pendaratan bagi proses politik dan pembangunan yang dicita-citakan.

Di sini kaum muda dituntut untuk bersabar mengikuti proses karena tujuan yang diinginkan tentu tidak akan terwujud dalam satu atau dua tahun, tapi dalam satu atau dua dekade, bahkan lebih. Kemampuan untuk bersabar dengan menghindari

upaya-upaya instan dan pragmatis, bukan hanya bermanfaat bagi pendewasaan dan pematangan politik kaum muda, melainkan juga berguna untuk menguatkan fondasi politik bangsa secara keseluruhan.

Ketiga, politik adalah wahana pengabdian sekaligus pematangan dan pembelajaran bagi kaum muda itu sendiri. Kaum muda adalah pemimpin masa depan dan sekaligus bagian dari kepemimpinan masa kini. Kalau kaum muda diberi kepercayaan sebagai pemimpin tertinggi di berbagai level pemerintahan, maka hal itu tetap diletakkan dalam posisi saling melengkapi dengan kelompok politik strategis yang lain.

Namun secara umum, karena kaum muda adalah pemimpin masa depan dan yang bertugas mengawal agenda-agenda politik nasional jangka panjang sejak saat ini, maka politik kaum muda adalah proses magang dan pembelajaran untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak secara otomatis diwariskan secara turun-temurun, tetapi harus dipelajari dan dilatih dalam kerja-kerja politik nyata penuh tantangan. Dan dalam konteks inilah, politik kaum muda adalah membangun suatu pengalaman dan pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan untuk membangun kepemimpinan politik nyata di masa depan.

Tanpa proyeksi, orientasi jangka panjang dan fundamental politik seperti itu, kaum muda akan terjebak dalam politik sesaat

dan sensasional. Kalau demikian yang terjadi, benar apa yang dikatakan David Harris dalam bukunya, *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies* (1992), bahwa kaum muda adalah korban dari industri kebudayaan yang konsumeristik.

Dengan pandangan biner-komplementer seperti itu, hubungan antara kaum muda dan kelompok-kelompok lain bisa saling menguntungkan dan menguatkan sehingga bisa dibangun landasan untuk terciptanya tata sosial, ekonomi, dan politik yang kuat, adil, dan sejahtera. Dalam skala geopolitik global, pandangan demikian juga bisa membuat hubungan negara-negara maju dan berkembang, Timur dan Barat, menjadi lebih baik, saling menguntungkan, dan menguatkan demi terciptanya tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

Dengan demikian, krisis ideologi dan persoalan kepemimpinan nasional tidak bisa dicarikan jalan keluarnya tanpa keterlibatan dan aspirasi kaum muda di dalam politik secara luas. Dengan keterlibatan dan kepeloporan kaum muda, bukan hanya dinamisasi politik yang bisa dihasilkan, melainkan juga berbagai terobosan dan perubahan mendasar dalam menyangkut kesadaran, ideologi, dan orientasi politik bangsa ke depan.[]



~ 6 ~

## **MOMENTUM UNTUK BANGKIT**

Dahulu ketika terjadi krisis dalam tata geopolitik dunia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, para pemimpin nasional kita bisa memanfaatkan momentum krisis hegemoni itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan berkat kecerdasan membaca situasi geopolitik itulah, ditunjang oleh keberanian untuk membela hak-hak sebagai bangsa berdaulat, kita hari ini bisa hidup dalam sebuah negara yang merdeka.

Krisis global saat ini juga merupakan momentum bagi kita untuk bangkit setelah sekian lama menjadi korban dari sistem ekonomi dan politik internasional yang bisa dikatakan tidak adil. Kalau momentum ini tidak berhasil dimanfaatkan, barangkali kita harus menunggu lebih dari setengah abad lagi untuk bisa benar-benar bangkit dari keterpurukan.

## Krisis Hegemoni

Krisis global saat ini tidak lepas dari krisis hegemoni dalam sistem dunia dalam dua dasawarsa terakhir, khususnya pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1989. Krisis terjadi, seperti dikatakan Giovanni Arrighi & Beverly J. Silver dalam buku mereka, *Chaos and Governance in the Modern World System* (1999), sebagai akibat semakin terkonsentrasinya Amerika Serikat dalam upaya peningkatan sumber daya militer. Peningkatan itu dilakukan agar AS dapat bertindak sebagai "polisi dunia". Akibatnya, terjadi sentralisasi kapabilitas militer global ke tangan AS. Sayang, ekspansi itu tidak disertai oleh dukungan persediaan sumber daya finansial global akibat pergeseran akumulasi finansial ke pasar-pasar yang lebih menjanjikan.

Krisis itu secara cerdas dimanfaatkan oleh para pemimpin di negara-negara, seperti Amerika Latin, Rusia, Cina, India, dan bahkan juga Iran. Di tengah krisis dan transisi hegemoni itu, dengan kepemimpinan nasionalnya yang kuat dan berani, negara-negara tersebut bisa bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru di tengah percaturan geopolitik dunia.

Saat ini AS tidak lagi menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia baik secara politik, militer maupun ekonomi. Selain AS dan sekutunya (Inggris, Australia, dan Kanada), kini ada tiga blok baru yang menjadi kekuatan pengimbangnya, yaitu (1) negara-negara Amerika Latin; (2) Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang beranggotakan Cina, Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Sementara India, Iran, Mongolia, Pakistan, dan Turkmenistan berstatus sebagai peninjau; dan (3) Uni Eropa. Ada juga blok yang melintasi batas-batas geografis negara bangsa seperti BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina).

Cina adalah negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai lebih dari USD 2 triliun. Cina semakin jauh meninggalkan Jepang yang memiliki cadangan terbesar kedua di dunia. Krisis finansial AS diperkirakan akan memperkuat cengkeraman Cina pada perekonomian negeri Paman Sam itu. Cina kemungkinan akan banyak membeli sekuritas pemerintah AS dengan memanfaatkan cadangan devisanya yang kian menggelembung.

Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin juga bisa memanfaatkan krisis hegemoni dengan cerdas dan sukses. Setelah porak-poranda akibat liberalisasi yang dicanangkan Gorbachev, Putin memilih jalan “liberalisme terkontrol”, dan terbukti Rusia bisa bangkit kembali sebagai negara adidaya.

Benar apa yang dikatakan Luiz Carlos BP, Jose Maria Maravall, dan Adam Przeworski dalam buku mereka, *Economic Reforms in New Democracies, A Social-Democratic Approach* (1993), bahwa transisi ekonomi dan politik di suatu negara menuju tatanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di dalam negeri seringkali terjadi pada saat krisis. Tidak salah jika krisis global saat ini merupakan momentum untuk melaku-

kan perubahan dan kebangkitan nasional yang harus dimanfaatkan secara cerdas dan maksimal.

## **Tiga Agenda Kebangkitan Nasional**

Lantas di sektor mana saja kita bisa memanfaatkan momentum krisis global saat ini untuk kepentingan nasional yang lebih luas dan berjangka panjang? Pertama, penguatan dan pembangunan kembali industri nasional, khususnya industri-industri dasar. Penguatan dan pembangunan industri nasional bukan hanya menambah pemasukan negara, melainkan juga akan membuka lapangan kerja yang sangat besar.

Dengan membangun industri nasional yang kokoh, kita secara perlahan bisa mengurangi ekspor hasil alam dalam bentuk mentah atau apa adanya. Lebih dari itu, kemajuan industri nasional akan menjadi tolok ukur yang menentukan reputasi bangsa di mata dunia.

Kedua, seperti sudah dikemukakan oleh banyak partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada, kita perlu melakukan renegotiasi kontrak-kontrak karya perusahaan asing, khususnya pada sektor energi dan pertambangan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita justru tidak bisa menikmatinya di saat harga energi dan hasil tambang melambung tinggi beberapa waktu yang lalu. Kontribusi dari bagi hasil sektor pertambangan dan energi alam terhadap APBN juga sangat kecil sekitar 3%.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan stimulus terhadap usaha/industri kecil dan menengah (UKM/IKM) serta meningkatkan subsidi sektor pertanian. Tahun ini misalnya, Rusia mensubsidi sektor pertaniannya sebesar USD 2 milyar. Hal itu dilakukan karena sektor pertanian dan juga UKM/ IKM merupakan penyangga utama perekonomian suatu bangsa.

Dengan meningkatnya stimulus dan subsidi, pemerintah bukan saja telah melindungi industri lokal dan ekonomi rakyat, melainkan juga membuka lapangan kerja yang luas di pedesaan dan kota-kota penyangga. Karena industri-industri strategis butuh industri turunan, maka pengembangan industri nasional akan sia-sia jika dilakukan tanpa meningkatkan stimulus terhadap UKM/ IKM dan subsidi sektor pertanian.

Untuk membangkitkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik bangsa, kita tidak perlu menempuh cara-cara yang ekstrem. Tidak perlu anti dan phobia terhadap asing. Yang dibutuhkan adalah suatu kerja sama dagang, investasi, dan politik dalam kerangka sistem yang lebih jujur dan menguntungkan kedua belah pihak secara adil.

Berbagai pemimpin negara di berbagai belahan dunia sudah memberi preseden dan contoh positif bagaimama memanfaatkan momentum krisis ini untuk kepentingan dalam negerinya dan menjadikannya sebagai tonggak kebangkitan nasional masing-masing. Dan itu semua tergantung pada kemauan politik, kecerdasan, dan keberanian para pemimpin nasional yang

ada. Dan saya yakin itu bisa dilakukan jika ada kebersamaan di kalangan para pemimpin kita.[]

~ 7 ~

## **SPIRIT AL-QUR'AN UNTUK MENGATASI KRISIS GLOBAL DAN KEPEMIMPINAN**

Al-Qur'an adalah kitab suci yang agung, sumber perubahan, kemajuan, dan kedamaian. Nilai-nilai agung yang terdapat dalam al-Qur'an yang bisa menjadi fondasi dan inspirasi bagi kita semua dalam rangka menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan dewasa ini.

Lebih dari lima belas abad yang lalu, al-Qur'an telah mengubah dunia Arab dari masyarakat barbar menuju masyarakat yang berperadaban tinggi, dari kekacauan menuju kedamaian, dari masyarakat penuh penindasan menuju masyarakat penuh rahmat dan kasih sayang, dari masyarakat yang bergelimang kemiskinan menuju berkemakmuran.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang agung. Disebut demikian karena kemurnian dan keasliannya digaransi langsung oleh Allah SWT. Agung karena membacanya adalah ibadah. Agung karena bahasanya begitu indah dan tidak ada satu pun yang bisa menandingi keindahannya. Agung karena dari al-Qur'an telah lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dan agung karena al-Qur'an selama berabad-abad telah menjadi sumber nilai yang tidak pernah habis bagi perubahan dan solusi kehidupan masyarakat, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia (*hudan lin nas*), dan khususnya petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (*hudan lil muttaqin*).

Seorang sarjana Barat yang banyak meneliti Islam, Montgomery Watt dalam bukunya, *Bell's Introduction to the Qur'an*, menyatakan al-Qur'an merupakan kitab yang langka, yang telah memberikan pengaruh begitu luas dan mendalam terhadap manusia. Al-Qur'an merupakan dasar keyakinan keagamaan, pembimbing tingkah laku bermasyarakat dan individual. Al-Qur'an adalah alat pembentuk pemikiran umat, ungkapan-ungkapannya meresak jauh ke pedalaman sastra dan menyeruak ke dalam pertuturan.

Tidaklah mengherankan jika al-Qur'an telah mengubah wajah dunia Arab dan kemudian mengubah dunia di sekitarnya sepanjang ribuan mil yang membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Merauke di ujung timur Asia Tenggara.

## Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan

Selain menjadi fondasi yang kokoh bagi perubahan masyarakat Arab pada masa kenabian, al-Qur'an juga menjadi fondasi dan inspirasi yang menakjubkan bagi kejayaan peradaban Islam selama berabad-abad setelah masa kenabian. Sejarawan Inggris asal Kuwait, Farhat A Hussein, dalam sebuah tesisnya berjudul *Islamic Civilisation and its Impact Upon the Development of Western Europe*, mengemukakan bahwa sejak abad VIII, yaitu selama 11 abad, muslim berkreasi dan menerangi dunia dari kegelapan di berbagai bidang. Pengaruh Islam itu terus hidup hingga Eropa memasuki abad modern, bahkan hingga saat ini.

Menurut Farhat A Hussein, al-Qur'an sarat dengan informasi mengenai astronomi, geologi, pengobatan, dan sains lainnya yang mengantarkan ilmuwan muslim menjadi peneliti. Para ilmuwan muslim telah meneliti dan memahami sains dalam al-Qur'an dan menghasilkan 1.400 buku dari cabang ilmu yang berbeda. Buku-buku itulah yang kemudian diadopsi Barat dan digunakan untuk memajukan peradaban mereka.

Sejarah sudah membuktikan bahwa Eropa sedang hidup di abad kegelapan dari abad V hingga abad IX, dan pada saat yang sama peradaban Islam dalam puncak kejayaan keilmuan di bawah Dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan khalifah al-Mansur, ar-Rasyid, al-Mamun, dan al-Mu'tasim.

Tapi sayang dalam perkembangannya kemudian peradaban Islam itu terus menurun. Penurunan itu mulai terjadi sekitar

abad ke-11, ketika ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ilmu pengetahuan Islami dan ilmu pengetahuan asing. Ilmu pengetahuan yang Islami adalah ilmu yang disetujui karena terkait dengan agama. Sementara ilmu pengetahuan asing dipinggirkan berdasarkan kecurigaan para penguasa muslim saat itu. Dan sampai hari ini peradaban Islam bisa dikatakan belum bangkit kembali.

Dari paparan sejarah peradaban Islam itu kita menjadi tahu bahwa kejayaan Islam lahir dari inspirasi dan fondasi al-Qur'an. Dan peradaban itu begitu kokoh karena al-Qur'an menjadi sumber pengetahuan yang menyeluruh tanpa harus dibedakan mana pengetahuan Islami dan mana pengetahuan umum. Cara pandang yang menyeluruh dan non-dikotomis merupakan salah satu inti dari kejayaan peradaban Islam.

## **Al-Qur'an dan Krisis Kehidupan Bangsa**

Bangsa kita hari ini, dan masyarakat internasional pada umumnya, sedang menghadapi krisis yang cukup mengkhawatirkan. Pada tingkat global, terjadi krisis finansial yang bermula dari Amerika Serikat, dan kemudian menular ke seluruh penjuru dunia.

Di satu sisi, krisis global itu memang membawa hikmah bagi bangsa ini. Karena dengan melemahnya ekonomi dunia, harga minyak menjadi turun. Dan masyarakat di sini bisa ikut menikmatinya dengan diturunkannya harga BBM. Namun, di

sisi lain, krisis itu benar-benar mengancam sendi-sendi perekonomian nasional akibat menurunnya ekspor dan turunnya investasi sehingga telah ribuan pekerja di-PHK. Penurunan harga BBM tetap belum mampu menutup beban ekonomi nasional secara umum yang sedang menghadapi tantangan.

Krisis finansial itu sebenarnya hanya merupakan krisis di permukaan. Krisis yang jauh lebih dalam dan serius justru tengah dihadapi bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir, yaitu krisis nilai, krisis moral, krisis spiritualitas, dan krisis ideologi. Kalau lah kita bisa menangani krisis finansial di permukaan, tetapi krisis nilai, krisis moral, krisis spiritual, dan krisis ideologi tidak bisa diatasi, maka ibarat penyakit, kita memang bisa sembuh sementara, tetapi begitu wabah datang lagi, kita tidak akan kebal, tidak akan imun, dan justru akan jatuh lebih parah lagi.

Itulah krisis multisektoral yang sedang melanda masyarakat kita. Para ahli ekonomi bilang, pertumbuhan ekonomi membaik. Tetapi kenyataannya, kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi persoalan. Hidup terasa makin sulit. Ahli politik menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara demokrasi nomor tiga di dunia setelah Amerika dan India, tetapi kenyataannya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang menghargai perbedaan tidak tumbuh dengan baik. Bahkan kedaulatan rakyat juga terus dipinggirkan oleh kedaulatan pemilik modal. Ahli hukum hanya bicara dengan kacamata hukum, mengabaikan aspek-aspek moral. Legalitas ditegakkan tanpa moralitas. Bahkan ada orang

yang mengaku Islam, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Ada golongan yang senantiasa membawa simbol-simbol Islam, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk meraih kekuasaan.

Itulah krisis nilai, krisis moral, dan krisis spiritualitas yang sedang terjadi di negeri ini. Krisis yang terjadi akibat kita terlalu mementingkan simbol, kulit, penampilan, gaya hidup (*life style*) dan karena kita senantiasa memahami dan menyelesaikan masalah hanya dari satu sisi saja, satu dimensi saja. Karena kita telah menjadi manusia satu dimensi.

## **Al-Qur'an dan Kepemimpinan**

Ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya di Makah dengan inspirasi dan pedoman ayat-ayat al-Qur'an, masyarakat Arab sedang berada dalam situasi krisis. Disebutkan bahwa ketika itu, masyarakat Arab sedang menghadapi krisis nilai yang akut: politeisme (penyembahan berhala dan materi), eksploitasi kaum miskin, penindasan terhadap kaum perempuan, permainan kotor dalam perdagangan, ketiadaan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan perbudakan yang meraja-lela.

Dengan bimbingan al-Qur'an yang diwahyukan secara bertahap, perlahan tapi pasti Nabi Muhammad bisa mengubah masyarakat Arab menjadi masyarakat yang religius, damai, sejahtera, dan berkeadilan. Al-Qur'an telah menjadi sumber perubahan, sumber revolusi masyarakat menuju tananan yang adil, makmur, dan berkecukupan.

Perubahan menuju tananan yang lebih baik itu dimungkinkan karena ada tiga rukun perubahan yang dipenuhi, yaitu *pertama*, adanya nilai-nilai, moral, dan ideologi yang bisa menjadi arah dan penjelasan atas persoalan dan realitas, yaitu al-Qur'an sendiri. Yang *kedua*, adanya kepemimpinan yang kuat dan penuh keteladanan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang *ketiga*, adanya kelompok yang tulus, loyal, dan militan yang mau menopang kepemimpinan dengan partisipasi yang total, yaitu para sahabat.

Perpaduan ketiga unsur perubahan itu, yaitu nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan jamaah telah melahirkan peradaban Islam yang maju dan menakjubkan sepanjang sejarah manusia. Peradaban Islam terus berkembang justru ketika dunia Barat berada dalam kegelapan.

Tanpa nilai-nilai dan ideologi, masyarakat akan kehilangan pijakan, arah, dan orientasi kehidupan. Mereka berjalan dalam kegelapan tanpa tahu tujuannya. Tanpa kepemimpinan yang kuat, meskipun masyarakat mempunyai nilai-nilai, mereka akan terjebak dalam gaya hidup dan selalu gagal dalam menentukan skala prioritas. Dan tanpa partisipasi dan kebersamaan, nilai-nilai hanya akan menjadi hiasan dan para pemimpin hanya akan menjadi tontonan.

Tidak heran jika Imam al-Mawardi dalam kitabnya, *Adab ad-Dunya wad-Din* menyebutkan, salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh sebuah bangsa untuk mencapai kemakmuran

adalah bahwa bangsa itu harus memiliki “ideologi atau nilai-nilai yang kuat” (*ad-din al-muttaḥa*) dan juga pemimpin yang kuat dan berani (*as-sulṭhan al-qahir*).

Atas dasar itulah para ulama kita terdahulu yang beraliran *Ahlus Sunnah wal Jamaah* telah merumuskan sebuah resep bahwa stabilitas sosial politik merupakan syarat bagi terwujudnya tertib agama (*nidzam ad-dunya syartun li nidzam ad-din*). Dan stabilitas hanya bisa diwujudkan jika kita memiliki ideologi dan pemimpin yang kuat serta berani.

Rasulullah SAW bersabda: “*Rakyat tidak akan mengalami kehancuran sekalipun mereka zhalim dan buruk (akhlaknya) jika pemimpinnya suka menunjukkan ke jalan yang benar dan dipimpin pada jalan yang benar. Sebaliknya, rakyat akan hancur sekalipun mereka suka menunjukkan jalan kebenaran dan dipimpin pada jalan yang benar jika keadaan pemerintahannya zhalim dan buruk*” (HR. Abu Nu’aim).

Itulah solusi al-Qur’an yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, para khalifah sesudahnya, atas persoalan krisis multisektoral yang tengah terjadi.

## Kerangka Berpikir Al-Qur’an

Ada dua pertanyaan besar di sini. Yang pertama, bagaimana ideologi dan nilai-nilai itu terbentuk dan menjadi fondasi sekaligus arah bagi kehidupan kita? Sejujurnya setiap manusia, setiap masyarakat, dan setiap bangsa sudah memiliki nilai-nilai

dan ideologinya sendiri baik yang berwatak lokal maupun universal. Hanya saja mereka tidak tahu adanya nilai-nilai itu sendiri.

Menarik disimak apa yang dikatakan Imam al-Ghazali tentang tipe-tipe manusia. Menurut al-Ghazali, manusia itu ada empat jenis (*ar-rijàlu arba'tun*):

Yang pertama, *rajulun yadri wa yadrì annahu yadri*, yaitu orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Ini derajat yang paling tinggi.

Yang kedua, *rajulun yadrì wa là yadri annahù yadri*, orang yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia sebenarnya tahu.

Yang ketiga, *rajulun là yadrì wa yadri annahù là yadri*, orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dia tidak tahu.

Dan yang keempat, *rajulun là yadri wa là yadri annahu là yadri*, orang yang tidak tahu dan dia juga tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.

Kebanyakan dari kita, pemimpin kita dan kaum intelektual kita tidak tahu, tetapi seringkali pura-pura tahu. Ada yang tahu sedikit, atau tahu sebagian, atau tahu dari satu sisi saja, tetapi selalu merasa tahu masalah secara keseluruhan. Ada juga yang tahu, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkan pengetahuannya itu.

Itu semua terjadi karena kebanyakan dari kita telah keluar dari tradisi berpikir kita sendiri, tradisi berpikir yang diajarkan oleh al-Qur'an. Akibat pendidikan yang sudah sangat liberal,

cara berpikir kita pun menjadi sangat liberal. Ciri berpikir liberal adalah cara berpikir positivistik-instrumental, yang selalu membagi segala hal menjadi dua sisi, dan keduanya dibuat bertentangan. Misalnya, antara demokrasi dan kediktatoran, tradisional dan modern, desa dan kota, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, buruh dan majikan, sipil dan militer, rakyat dan penguasa. Keduanya dibuat selalu bertentangan atau berhadapan. Istilah *keren*-nya oposisi biner.

Dengan berpikir seperti itu, orang kota selalu mengolok-olok orang desa, orang kaya menindas yang miskin, penguasa menipu rakyatnya, dan seterusnya. Sipil diadu terus dengan tentara.

Padahal Islam mengajarkan bahwa segala hal adalah bersifat saling melengkapi, komplementer. Dalam ajaran al-Qur'an, orang kaya wajib menyantuni yang miskin, bukan mengeksploitasinya. Orang kuat wajib melindungi yang lemah, dan seterusnya.

Akibat cara berpikir yang keliru, yang keluar dari tradisi al-Qur'an itu, kita pada akhirnya hanya diadu domba dengan sesama saudara sendiri. Buruh diadu domba dengan pengusaha, sipil ditabrakkan dengan tentara. Islam diprovokasi untuk menyerang non-muslim. Santri dilatih demokrasi untuk melawan kiai. Perempuan dididik dengan pelatihan gender untuk melawan suami, melawan laki-laki. Dan seterusnya.

Itu semua terjadi karena kita sebagai orang Islam tidak pernah berpikir dengan cara yang diajarkan al-Qur'an, yaitu bahwa

perbedaan dalam kehidupan ini adalah bersifat saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan.

## Manusia Satu Dimensi

Yang berikutnya, pendidikan liberal di sekolah-sekolah kita juga telah menghasilkan anak didik yang cenderung menjadi “manusia satu dimensi,” yaitu generasi yang ketika melihat persoalan selalu memahaminya dari satu dimensi saja, satu sisi saja.

Yang ahli hukum hanya melihat masalah dari sudut hukum, yang dicari adalah benar atau salah. Yang ahli politik hanya melihat dari politik saja, yang dicari adalah menang atau kalah. Yang ahli ekonomi melihat masalah dari sudut ekonomi saja, yang dicari adalah untung atau rugi. Efisien atau tidak. Yang ahli fiqih hanya melihat masalah dari sudut fiqih saja, boleh atau tidak. Dan semuanya merasa paling benar, semuanya merasa paling penting.

Para ulama kita terdahulu mengajarkan bagaimana melihat dan memahami masalah secara menyeluruh dan multidimensional. Ketika para ulama Nahdlatul Ulama berkumpul di Surabaya pada bulan Oktober 1945 untuk menyikapi masuknya tentara Sekutu ke Indonesia, dua bulan setelah Indonesia merdeka, para ulama itu mengeluarkan pendapat dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihatnya dari sisi *fiqih*, ada yang melihatnya dari sisi *aqidah*, ada yang melihatnya dari sisi *siyasah*, dan ada yang melihatnya dari sisi *akhlaq*. Dari semua sudut pandang itu kemudian dihasilkan keputusan utuh dan bulat

bahwa umat Islam wajib mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan...!

Keputusan dan pemikiran yang dirumuskan dari berbagai sudut pandang memiliki bobot dan daya sentuh yang jauh lebih dahsyat dibandingkan keputusan yang diambil dari satu sudut pandang saja.

Kegagalan memahami al-Qur'an secara menyeluruh, memahami persoalan secara komprehensif dan komplementer, telah mengakibatkan bencana besar dalam sejarah umat Islam sendiri. Dulu pengadopsian gagasan-gagasan asing dalam bidang teologi dengan ketiadaan wawasan yang padu akan pandangan dunia al-Qur'an telah membawa malapetaka besar, paling tidak pada kasus paham Asy'ariah. Ketika pada abad ke-12 sistem teologi Sunni itu bertumbukan dengan metafisika, maka teologi Sunni itu hampir saja meremuklantakkan metafisika, dan kemudian metafisika itu mencari perlindungan dan berkembang di kalangan intelektual-spiritual Syiah sehingga filsafat kemudian lebih berkembang di kalangan Syiah daripada Sunni.

Itulah pelajaran penting yang harus dicermati oleh kita semua. Kita harus kembali pada semangat al-Qur'an dengan mengembangkan cara berpikir menyeluruh, komprehensif, dan komplementer, serta keluar dari kebiasaan berpikir satu dimensi. Dan ini menjadi tugas para pemimpin umat dan lembaga-lembaga pendidikan kita.

## Penghargaan terhadap Perbedaan

Pertanyaan yang *kedua*, bagaimana kebersamaan itu terbentuk dan menjadi modal bagi perubahan menuju tananan yang adil dan sejahtera? Jawabannya ada pada tradisi penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan.

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Perbedaan diciptakan agar manusia senantiasa berlomba dalam kebajikan. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa. Menurut para mufassir, taqwa adalah derajat paling tinggi setelah islam dan iman. Tingkat pertama adalah *muslimin*, tingkat kedua adalah *mu'minin*, dan yang terakhir adalah *muttaqin*.

Para ulama panutan kita sudah memberi *uswah*, memberi teladan yang sangat baik, bagaimana menghargai perbedaan. *Hadratus Syaikh* KH Hasyim Asy'ari adalah ulama ahli Hadis, sementara KH Bisri Syansuri adalah ulama ahli fiqih. Keduanya sering berbeda pendapat. Tetapi, perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk menonjolkan ilmu masing-masing, tetapi justru dalam tujuan untuk saling menunjang dan melengkapi sehingga tidak pernah ada masalah dengan perbedaan itu. Kesadaran untuk saling melengkapi itu bisa tumbuh kuat karena satu sama lain saling menghargai.

Salah satu khalifah besar dalam sejarah Islam, yaitu Muawiyah RA, pernah menyatakan bahwa manusia itu ada tiga macam. Jenis yang *pertama* adalah orang yang punya ilmu dan suka

bermusyawarah, ini dinamakan manusia utama, atau *fadhil*. Jenis yang *kedua* adalah orang yang tidak cukup berilmu, tapi suka bermusyawarah, ini dinamakan manusia berakal, atau *'aqil*. Jenis yang *ketiga* adalah orang yang punya ilmu tapi tidak suka bermusyawarah, ini dinamakan manusia *keblinger*, lupa diri, atau *ghafil*.

## Partisipasi Masyarakat

Selain menekankan pentingnya masalah kepemimpinan, ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Karena tertib sosial politik merupakan syarat bagi terwujudnya tertib agama (*nidzam ad-dunya syartun li nidzam ad-din*), dan tertib politik hanya bisa terwujud jika ada kepemimpinan yang efektif dan juga adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kehidupan politik, maka partisipasi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari tuntutan syariat dan sekaligus manifestasi kecintaan pada agama dan tanah air. Partisipasi merupakan bagian dari *izzul Islam wal muslimin*.

Kalau lah suatu bangsa dipimpin oleh seseorang yang tidak kita sukai, maka kebencian kita terhadap pemimpin tidak boleh menjerumuskan kita ke dalam kebencian terhadap agama dan tanah airnya, secara langsung maupun tidak. Al-Qur'an menyatakan: "*Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*"

Karena itu, menurut hemat saya, sungguh tidak bijak jika masyarakat bersikap apatis dalam dunia politik, termasuk di dalamnya adalah golput dalam pemilu. Karena sikap demikian akan menutup kesempatan bagi umat untuk mengambil bagian dalam upaya bersama membangun tertib politik yang merupakan syarat bagi terwujudnya tertib agama dan kemuliaannya.

Lari dari partisipasi politik merupakan cermin dari sikap putus asa yang jelas-jelas dilarang oleh agama. *Wa la taiasu min rauhillah, innahu la yaiasu min rauhillah illal qaumil kafirin*. Janganlah kamu berputus asa dari berharap pada rahmat Allah, sesungguhnya tidak berputus asa dari mengharap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir.

Dalam kaidah fiqih disebutkan: *ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh*. Apa yang tidak bisa kita raih seluruhnya sesuai dengan cita-cita ideal kita, maka jangan ditinggalkan seluruhnya, jika yang ideal dan maksimal itu tidak bisa kita raih.

Dulu ketika para ulama Nahdlatul Ulama ingin memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia, dan upaya itu sulit diwujudkan, maka dengan kebijaksanaan dan kedalaman pemikirannya, para ulama itu tetap menerima negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Ketika cita-cita mewujudkan negara Islam tidak bisa dipenuhi, maka para ulama kita dan umat terdahulu tidak berputus asa dan kemudian memberontak atau memboikot negara, tetapi mereka tetap berpartisipasi dalam kehidupan politik. Karena mereka mencintai agamanya, mencintai tanah airnya.

Ahli sosiologi Islam terkemuka, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya, *Muqaddimah*, mengatakan bahwa masyarakat dan negara yang kuat adalah masyarakat dan negara yang padanya terdapat tiga hal. *Pertama*, solidaritas kebangsaan yang kokoh, di mana sikap dan perilaku mendzalimi, membenci, dan menjatuhkan satu sama lain bertukar menjadi saling memberi, saling menghargai, dan saling melindungi. Yang *kedua*, kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Dan *ketiga*, kebangkitan suatu bangsa dan kejayaan negara berawal dari dan hanya akan langgeng apabila orang-orangnya selalu optimis, mau terus-menerus bekerja keras, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan.

Itulah ajaran al-Qur'an tentang politik, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, dan tentang partisipasi masyarakat dalam kehidupan bangsa, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama kita terdahulu dan juga dipraktikkan dalam keteladanan yang penuh kebijaksanaan.

## Keluar dari Krisis

Pada akhirnya, kita yakin bahwa spirit al-Qur'an bisa menjadi landasan dan arah bagi kita semua untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Kita semua sudah menyadari bahwa bangsa ini sudah mempunyai nilai-nilai dan spiritualitas yang kokoh, kebersamaan, dan penghargaan terhadap perbedaan yang sangat kuat karena tradisi keberagamaan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* memang dibangun di atas perbedaan dan sikap saling meng-

hormati. Yang belum kita punya adalah pemimpin yang kuat dan berani. Pemimpin pembaharu, negawaran, dan pemimpin spiritualitas sekaligus.

Tradisi kita mengajarkan bahwa pemimpin besar bukanlah pemimpin yang pandai berkata-kata, berwacana atau memper-tontonkan pengetahuannya. Bukan pula dari tampangnya yang rupawan. Pemimpin besar adalah pemimpin yang santun, dewasa, bijaksana, dan matang terutama ketika mengatasi dan menjawab persoalan. Pemimpin besar bukan semata-mata ditentukan oleh ilmunya, oleh *knowledge*-nya, melainkan lebih ditentukan oleh kebijaksanaannya, oleh *wisdom*-nya. Begitulah kepemimpinan yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai luhur al-Qur'an.

Al-Qur'an dihafal, dipelajari, dan *dimusabaqah*-kan bukan sekadar untuk menjadi bacaan, melainkan untuk dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam, menjadi perilaku yang bijak dan penuh kewaspadaan. Sejarah peradaban Islam sudah membuktikan bahwa al-Qur'an telah menjadi sumber, fondasi, dan arah bagi revolusi sejarah kemanusiaan. Dan hari ini kita yakin, dengan pemimpin yang mempunyai spirit baru, dengan cara pandang dan pemikiran baru, kita bisa songsong Indonesia baru yang *insya Allah* akan segera keluar dari krisis multisektoral ini. Menjadi negara yang penuh berkah, stabil, damai, makmur, dan berkeadilan, menjadi *baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. □



~ 8 ~

## UMAT ISLAM DAN KEBANGKITAN NASIONAL

Memperbincangkan kebangkitan nasional tanpa membicarakan peran umat Islam di dalamnya bisa dikatakan seperti mendiskusikan kebangkitan negara-negara Amerika Latin tanpa membicarakan peran umat dan gereja Katolik di sana. Suatu pembicaraan yang *absurd*.

Tentu saja umat Islam hanyalah merupakan salah satu unsur yang membentuk keindonesiaan. Namun, karena secara kuantitas umat Islam merupakan kelompok mayoritas, maka dengan sendirinya peran dan posisinya dalam proses kebangkitan nasional akan sangat signifikan.

## **Ideologi Nasionalis**

Sejak akhir abad ke-19, Islam telah menjadi “ideologi” penting yang membangkitkan kesadaran nasional dan cita-cita kemerdekaan di berbagai negara, khususnya negara-negara Islam yang membentang dari kawasan Afrika Barat sampai Asia Tenggara. Dalam skala nasional, Islam menjadi ideologi pemer-satu di kalangan berbagai gerakan umat yang memperjuangkan kemerdekaan melawan kolonialisme.

Dalam skala global, Islam tampil sebagai “ideologi baru” sebagai alternatif atas ideologi Barat sekuler yang dianggap telah gagal dan menimbulkan kerusakan dan penindasan di mana-mana. Meski ideologi Islam sampai hari ini belum menemukan bentuknya yang komprehensif, tetap saja terasa bahwa Islam mampu menghadirkan warna lain dalam diskursus ideologi global sampai hari ini.

Baik sebagai ideologi nasional maupun ideologi alternatif, penting dicatat bahwa semangat Islam waktu itu adalah identik dengan semangat kebangkitan nasional dengan berbagai manifestasi gerakan yang ada. Menjadi Islam yang baik dengan sendirinya adalah menjadi seorang nasionalis.

Nasionalisme Islam di masa lalu ditempatkan secara terbuka dalam bingkai kebersamaan dengan kelompok lain. Ada kesadaran yang kuat bahwa kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan hanya bisa dicapai jika Islam tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan kelompok lain.

Kebersamaan dan kerjasama yang melintasi batas-batas agama itu bisa dibangun karena para pemimpin umat mampu menciptakan “musuh bersama”, yaitu penjajahan. Dengan adanya musuh bersama itu, perbedaan agama dan kepentingan politik bisa dinomorduakan karena ada tujuan bersama yang lebih besar, yaitu kemerdekaan.

Sungguh disayangkan jika dewasa ini banyak pemimpin Islam justru mengembangkan sikap dan pemikiran yang eksklusif. Mereka terjebak dalam tesis “benturan peradaban”-nya Huntington. Padahal, pemikiran dan sikap eksklusif hanya akan menciptakan jarak dan segregasi sosial yang semakin tajam. Itu artinya, potensi konflik di tengah masyarakat justru akan semakin kuat sehingga cita-cita kebangkitan nasional akan semakin sulit diwujudkan karena bangsa ini rapuh dari dalam.

## **Persatuan Umat**

Selain nasionalisme Islam yang inklusif, kebangkitan nasional juga bisa diwujudkan jika tercipta persatuan umat dan para pemimpin Islam yang sehat dan produktif. Sebagai komponen terbesar bangsa, maka persatuan umat Islam merupakan syarat bagi kebangkitan yang diinginkan.

Di masa lalu, peran umat Islam dalam gerakan perjuangan merebut kemerdekaan begitu besar karena para pemimpinnya bersatu dan saling menghormati. Meski berbeda perspektif dalam menafsirkan Islam misalnya, M Natsir dan Bung Karno

sangat dekat dan saling belajar. Demikian juga Bung Karno dan Buya Hamka.

Meski berbeda mazhab, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga bisa selalu duduk bersama dalam suasana persaudaraan. Mereka tidak lagi membicarakan perbedaan di antara mereka menyangkut tradisi yang dikembangkan (*khilafiyah*). Ketika duduk bersama, yang dibicarakan adalah masalah-masalah dan konstruk kebangsaan yang akan dibangun.

Kondisi seperti itu bisa tercipta setidaknya karena dua hal. *Pertama*, suasana batin umat Islam waktu itu tidak memungkinkan untuk membicarakan *khilafiyah* karena cita-cita untuk merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah begitu besar. *Kedua*, di kalangan ormas-ormas Islam, ada pemimpin besar yang sangat disegani, yaitu KH Hasyim Asy'ari (NU) dan KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah).

Hari ini umat Islam kehilangan dua hal itu. Kepentingan kelompok begitu besar, terutama kepentingan untuk berkuasa. Sementara pemimpin besar juga tidak muncul, baik karena zaman yang sudah tidak memungkinkannya maupun karena tidak ada tokoh yang memenuhi syarat menjadi pemimpin seperti itu. Akibatnya, persatuan umat Islam bisa dikatakan mengalami degradasi luar biasa dan terus menurun dari waktu ke waktu.

Jika situasi seperti terus berlanjut, maka bukan hanya akan terjadi degradasi internal umat Islam, melainkan juga dalam

struktur bangsa secara keseluruhan. Proses ini tentu saja akan membuat bangsa ini semakin sulit untuk bangkit.

Dalam konteks ini, diperlukan terobosan-terobosan cerdas yang mendorong terciptanya suatu suasana batin umat yang memungkinkan kebersamaan dan persaudaraan yang lebih tinggi bisa dikembangkan secara terus-menerus. Dan terobosan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin umat yang visioner dan tidak haus kekuasaan.

Hari ini, umat Islam mungkin butuh pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar. Pemimpin yang tulus hati (*as-shidq*) dalam berjuang menegakkan Islam dan kemanusiaan. Abu Bakar adalah seorang saudagar, tetapi ia menyumbangkan tiga perempat hartanya untuk perjuangan. Pemimpin yang benar-benar menghidupkan api perjuangan umat, bukan hidup dari atau atas nama perjuangan.[]



~ 9 ~

## KIAI DAN KEBANGKITAN NASIONAL

Di masa lalu, jauh sebelum Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908, gerakan-gerakan rakyat yang dimotori oleh para kiai sudah muncul dan tersebar di berbagai pelosok tanah air. Meski sifatnya masih sporadis dan belum terorganisasi secara modern, gerakan-gerakan itu menjadi embrio penting bagi munculnya kesadaran nasional terutama menyangkut cita-cita kemerdekaan dan kemandirian bangsa.

Dengan demikian, pendapat yang cenderung menyimpulkan bahwa kebangkitan nasional dimulai dari berdirinya Budi Utomo merupakan pandangan yang ahistoris. Pendapat demikian juga merupakan bentuk kurangnya penghargaan terhadap perjuangan rakyat dan para kiai di masa lalu.

Pandangan sebagian besar kelas terdidik Indonesia yang 'berpikiran modern' (*modern minded*) memang cenderung

mengabaikan unsur-unsur tradisional dalam masyarakat, termasuk gerakan-gerakan rakyat melawan kolonialisme. Ditunjang oleh proses liberalisasi politik, ekonomi, dan kultural yang terjadi secara massif, cepat atau lambat kemudian terjadi proses peminggiran terhadap peran-peran tradisional dari agama, budaya, dan tradisi, di mana para kiai sebagai elite agama berada di dalamnya.

Kalau kecenderungan seperti ini terus berlanjut maka menurut hemat saya, cita-cita kebangkitan nasional akan semakin sulit diwujudkan. Karena di masa lalu, kebangkitan nasional bisa digerakkan secara menyeluruh di mana berbagai unsur dalam masyarakat bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan. Tetapi, kini sebagian unsur itu justru dipinggirkan bahkan dianggap sebagai beban bagi proses pembangunan nasional.

## **Anti-Kolonialisme**

Nilai utama yang ditanamkan para kiai kepada santri dan masyarakat di sekitarnya adalah spirit anti-kolonialisme. Bagi para kiai, berdasarkan pemikiran politik (*siyasah*) dan agama (*syariah*), kolonialisme bukan hanya merupakan bentuk pengingkaran dan penindasan terhadap kemanusiaan, melainkan juga menimbulkan ke-*mudlarat*-an yang kompleks bagi eksistensi kebebasan umat dalam menjalankan syariat agamanya.

Dalam pemikiran politik dan keagamaan kiai, Islam hadir di tengah kehidupan manusia untuk melindungi seluruh

kepentingan kemanusiaan yang paling dasar, yaitu melindungi jiwa, agama, harta, keturunan, dan akalnya. Itulah konsep pemikiran hukum agama yang dirumuskan sebagai tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*). Islam adalah nilai yang membebaskan (*a liberating force*) manusia dari segala bentuk penindasan dan penjajahan.

Karena itu, tidak mengherankan jika para kiai dan ulama selalu tampil sebagai tokoh terdepan dalam gerakan rakyat melawan penjajahan. Martin van Bruinessen (1995) misalnya, menunjukkan peran penting kiai dalam gerakan melawan penjajah, seperti yang dilakukan Syaikh Yusuf Makassar dan Syaikh Abdul Samad. Syaikh Yusuf Makassar menjadi penasihat Sultan Agung Tirtayasa dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sedangkan Syaikh Abdul Samad mendorong Sultan Mataram (Hamengku Buwono I) dan Susuhunan Prabu Jaka (putera Amangkurat IV) untuk terus berjihad melawan orang kafir, sebagaimana dilakukan Sultan Mataram sebelumnya.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo (1973) dalam sebuah penelitiannya menyimpulkan adanya peran efektif kiai dalam menanamkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap orang asing dan juga pribumi yang menjadi aristokrat kolonial. Kesimpulan Sartono itu diakui Anthony Reid dalam bukunya, *The Indonesian National Revolution 1945-1950*, yang menegaskan bahwa dalam setiap pergolakan atau krisis sosial-politik di Indonesia, kiai selalu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan dukungan

dan inspirasi bagi heroisme perlawanan masyarakat terhadap penjajah.

Perang Paderi, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh, untuk menyebut beberapa contoh, adalah manifestasi gerakan rakyat melawan penjajah yang dipimpin oleh para kiai dan ulama. Dan gerakan-gerakan itu terus berlanjut sampai Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 dan di zaman revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Di bawah komando KH A Wahid Hasyim, para kiai mendirikan barisan-barisan perlawanan dalam bentuk laskar, yaitu laskar Hizbullah dan Sabilillah.

Ketika Belanda kembali datang ke Indonesia pada awal September 1945, para kiai di bawah pimpinan KH Hasyim Asy'ari juga menunjukkan sikap yang sangat tanggap terhadap keadaan dengan mengadakan pertemuan di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Dari pertemuan itu kemudian diputuskan bahwa berperang untuk mempertahankan kemerdekaan (*jihad*) adalah wajib bagi setiap umat Islam.

Jadi, tidak ada keraguan bahwa para kiai dan ulama mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya-upaya membangun gerakan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan untuk mempertahankannya. Itu artinya kebangkitan nasional sebagai proses menyeluruh untuk mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan bangsa, tidak pernah lepas dari partisipasi dan peran para kiai di dalamnya.

## Terpinggirkan

Sejak Orde Baru, terutama sejak ideologi pembangunan model Barat (Rostowian) diterapkan, peran umat Islam dan para kiai mulai terpinggirkan. Ideologi pembangunan yang teknokratis dibangun di atas pemikiran bahwa hanya sumber daya manusia terdidik dan profesional yang bisa dipercaya memegang kendali kebijakan politik dan ekonomi. Umat dan para kiai yang merupakan produk dari sistem pendidikan tradisional dianggap tidak kompeten untuk diberi peran yang proporsional dalam proses itu.

Dikuatkan dengan politik massa mengambang dan deideologisasi gerakan Islam, proses peminggiran peran politik kiai dan umat itu berjalan secara sistematis. Peran-peran penting dan menentukan yang pernah dimainkan para kiai dan umat Islam di masa lalu dilupakan dan cukup dicatat dalam buku sejarah.

Hari ini kita menyaksikan bahwa model pembangunan dan kebijakan seperti itu telah gagal. Krisis ekonomi yang disertai melemahnya negara menjadi bukti bahwa pembangunan dan kebijakan teknokratis justru semakin membuat bangsa ini terpuruk dan tersandera dalam sistem yang lebih eksploitatif dari kolonialisme di masa lalu itu sendiri. Belum lagi krisis moral, nilai, dan hilangnya tradisi bangsa yang utama.

Karena itu, jika momentum peringatan kebangkitan nasional tahun ini tidak dijadikan sebagai titik awal untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh menyangkut tradisi

berpikir bangsa dan implementasi kebijakan pembangunan yang ada, maka bisa jadi kebangkitan nasional akan menjadi seremoni dan ilusi semata.

Kebangkitan nasional harus dimaknai dan ditempatkan sebagai kebangkitan semua unsur yang ada di dalam bangsa ini. Jika kita konsisten ingin bangsa ini bangkit, harus ada ruang yang cukup bagi para kiai untuk memainkan peran-peran strategis dalam proses pembangunan masyarakat bangsa ini. Hal yang sama juga berlaku bagi pesantren, lembaga pendidikan tertua di Indonesia di mana kiai berada di dalamnya.[]

~ 10 ~

**KHILAFAH, NKRI, DAN VISI  
NASIONALISME ISLAM**

**I. Pengantar**

Di zaman di mana segala sesuatu bisa dijadikan komoditas, menarik apa yang dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin: “Jika kita kehilangan patriotisme, kebanggaan, dan martabat nasional, kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang mampu menghasilkan hal-hal yang besar.” Dan dengan itu semua, Putin mampu menunjukkan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinannya, Rusia bisa bangkit kembali menjadi salah satu kekuatan hegemonik dunia dengan menghasilkan berbagai hal-hal besar yang membuat bangsa Rusia bisa melupakan kehancuran Uni Soviet.

Komodifikasi, penciptaan isu-isu dan trends, merupakan salah satu ciri yang melekat dalam dinamika masyarakat kapitalistik dewasa ini. Di antara yang bisa disebutkan adalah isu terorisme, aliran sesat, perbincangan tentang khilafah, dan sebagainya.

Di satu sisi, bagi yang melihat secara seksama, tentu isu itu diciptakan bukan untuk memperkaya khazanah pemikiran sosial dan keagamaan, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dari sekadar isu itu dan kita sering tidak sabar untuk memikirkannya.

Bagi kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Indonesia, setiap isu tentu akan dilihat relevansinya dengan tradisi pemikirannya yang sudah mapan dan urgensinya bagi kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Jika kedua hal itu tidak bisa ditemukan maka isu itu akan dipandang sebagai isu belaka yang tidak akan membawa perubahan penting dalam kehidupan masyarakat.

## **II. Khilafah dan Urgensi Kepemimpinan Umat**

Khilafah atau *imamah* dalam pengertian kepemimpinan umat (masyarakat) sebenarnya merupakan sesuatu yang disepakati ulama sebagai keharusan (kewajiban dasar agama) karena tanpa ada kepemimpinan, ajaran Islam tidak bisa dilindungi dan dilaksanakan dengan bebas, serta kemaslahatan umum tidak bisa ditegakkan. Karena itu, khilafah disebut

dengan *al-imamah al-uzhma* sebagai bandingan kepemimpinan dalam salat yang disebut sebagai *al-imamah as-shughra*.

Menurut Prof. Diyauddin ar-Rais dalam bukunya, *al-Islam wal Khilafah fil 'Ashr al-Hadits* (1972), pandangan seperti itu telah menjadi konsensus (*ijma*) di kalangan ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* baik dari kalangan imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) maupun para pemikir Islam yang lain, seperti al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Pendeknya, seperti dikatakan Hamilton AR Gibb (1962), khilafah diterima tanpa pertanyaan.

Namun, dalam perkembangan pemikiran Islam pasca Abad Pertengahan, gagasan tentang khilafah mengalami ideologisasi yang kental sejalan dengan datangnya kolonialisme Barat di dunia Islam. Ide khilafah yang semula bersifat terbuka, kemudian menjadi demikian tertutup. Khilafah oleh pemikir seperti al-Maududi kemudian dirumuskan sebagai pemerintahan Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Jadi, khilafah lebih ditempatkan sebagai institusi simbolik dan normatif.

Para ulama dan pemikir Islam Abad Pertengahan merumuskan khilafah dalam aspek fungsionalnya, yaitu keberadaannya dianggap sebagai keharusan karena tanpa ada kepemimpinan (negara dan pemerintahan) maka kebebasan umat untuk menjalankan ajaran agama tidak bisa dilindungi dan difasilitasi. Demikian juga keadilan dan kemaslahatan umum akan sulit diwujudkan karena tanpa kepemimpinan, situasi yang berkembang adalah kekacauan (*faudla*).

Sementara para pemikir Islam seperti al-Maududi dan Hasan al-Banna lebih menitikberatkan khilafah dalam aspek simbolik dan normatifnya. Khilafah dirumuskan sebagai manifestasi perlawanan politik-struktural (*counter-hegemony*) dan moral-kultural (*counter-discourse*) terhadap Barat.

Ideologisasi Islam dalam manifestasi pemerintahan berbentuk khilafah itu kemudian ditentang oleh pemikir seperti Ali Abd ar-Raziq. Menurutnya, seperti dikatakan Binder dalam bukunya, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (1988), bentuk pemerintahan merupakan preferensi bebas manusia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasio. Dalam jangka panjang, ar-Raziq bahkan sangat optimistis bahwa akal manusia dan kondisi alamiah kehidupan manusia akan membawa mereka pada bentuk pemerintahan demokratis, paling tidak ada perubahan-perubahan penting yang menjadi prakondisi krusial bagi terbentuknya negara rasional.

Dalam perkembangan pemikiran politik Islam dewasa ini, yang dominan berkembang tentang khilafah adalah pemikiran model al-Maududi di atas. Menghadapi Barat yang sangat hegemonik, Islam dihadirkan sebagai ideologi alternatif sebagai jawaban atas kemunduran masyarakat disebabkan westernisasi dalam hampir segala bidang kehidupan, sekaligus sebagai upaya membangkitkan kembali kejayaan Islam yang pernah diraih di masa lalu.

Menghadirkan Islam sebagai ideologi yang diinstitusionalisasikan dalam sistem politik seperti khilafah, sebenarnya

merupakan sesuatu yang absurd dari sudut pandang nalar ataupun fakta kesejarahan itu sendiri. Menjadikan Islam sebagai ideologi sebenarnya merupakan wujud dari cara berpikir yang terjebak dalam apa yang disebut sebagai *overclaim*. Agama diasumsikan akan bisa menyelesaikan dan menjawab semua masalah yang dihadapi masyarakat dalam masalah ekonomi, keuangan, penyakit, gaya hidup kelangkaan pangan, dsb. Pemikiran seperti ini dengan sendirinya penuh dengan apologi dan rasionalisasi.

*Overclaiming* menyebabkan kita kehilangan ruang bersama untuk saling berbagi dan berdialog secara sehat, menutup kemungkinan suatu pola kehidupan bersama yang bersifat saling melengkapi (komplementer). Pola kehidupan masyarakat menjadi sangat monolitik dan saling berhadapan.

Ideologisasi Islam atau menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif juga akan membawa masyarakat ke arah disintegrasi. Bagaimanapun, menjadikan Islam sebagai ideologi, dengan sendirinya akan menempatkan masyarakat dari pemeluk agama berbeda sebagai warga negara kelas dua. Dalam sebuah masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, kita tidak mungkin menjadikan agama sebagai suatu ideologi, karena akan ada aspek tertentu dari suatu agama yang tidak bisa diterima oleh pemeluk agama lain, padahal ideologi berfungsi menyatukan dan menggerakkan seluruh aspirasi masyarakat bangsa.

### III. NKRI dan Pandangan Nasional Ulama Kita

Merujuk pada pemikiran ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* Abad Pertengahan dan dengan memahami secara utuh fakta dan nilai-nilai masyarakat Nusantara yang sudah ada, ulama-ulama kita terdahulu, terutama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, telah merumuskan suatu pandangan nasional yang utuh tentang Indonesia sebagai entitas politik dan keagamaan.

*Pertama*, pada tahun 1935, tepatnya pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, 8-12 Juni 1935, para ulama NU memutuskan bahwa wilayah Hindia Belanda (Nusantara) – meski berada di bawah kekuasaan pemerintahan non-muslim – adalah “wilayah Islam” atau “negeri Islam” (*dar Islam*), tetapi bukan negara Islam (*darul Islam*). Wilayah Islam adalah sebuah negeri di umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Sedangkan negara Islam adalah negara yang berdasarkan (ideologi) Islam secara formal dan dipimpin oleh seorang penguasa muslim.

Menurut KH A Muchit Muzadi dalam bukunya, *NU dan Fiqih Kontekstual* (1994), keputusan tersebut diambil karena ada pertanyaan tentang status jenazah yang ditemukan di kawasan Nusantara. Dengan keputusan bahwa Nusantara wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang ditemukan di seluruh pelosok Nusantara dan identitasnya tidak jelas, muslim atau tidak, maka harus diperlakukan sebagai muslim.

Dengan demikian, ulama NU telah memberi **status teologis** bumi Nusantara sebagai wilayah Islam. Karena itu, jika ada

serangan dari luar, maka umat Islam wajib mempertahankan kedaulatan negaranya.

*Kedua*, kiai-kiai dan konsul NU atas perintah KH Hasyim Asy'ari berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Pertemuan itu dimaksudkan untuk merespons kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda di Indonesia. Hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana status Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945? Dalam pertemuan tersebut, ulama-ulama dan konsul NU sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sah secara fiqih. Karena itu, umat Islam wajib mengangkat senjata untuk mengusir penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Republik. Keputusan itu kemudian dikuatkan oleh Keputusan Mukhtar ke-16 NU di Purwokerto Jawa Tengah yang berlangsung pada 26-29 Maret 1946.

Dengan keputusan tersebut, ulama NU telah memberi **status fiqih** terhadap NKRI sebagai negeri Islam, dan ideologi nasional Pancasila merupakan pengikat dan sekaligus penggerak seluruh kekuatan dan aspirasi masyarakat bangsa, dan ideologi itu keberadaannya tidak bertentangan dengan fiqih (hukum agama).

*Ketiga*, pada tahun 1984, tepatnya pada Mukhtar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, ulama-ulama NU memutuskan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Penerimaan itu

menjadi tidak aneh karena bagi ulama NU, kaum muslimin (melalui para pemimpinnya seperti KH A Wahid Hasyim dan KH Masykur) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan Islam dan tidak perlu dipertentangkan.

Nahdlatul Ulama yang berhaluan pada akidah dan syariah Islam menurut faham *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (*bilafdzi wa ma'na al-murad*), dengan rasa tanggung-jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridha-Nya, berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Demikian keputusan resmi NU dalam muktamar tersebut (PBNU, *Keputusan Mukhtar Ke-27 Nahdaltul Ulama*, 1985; 57-58).

Dengan demikian, ulama-ulama NU telah memberi **status etis** terhadap Pancasila dan NKRI, di mana keduanya adalah warisan dan investasi ulama untuk negerinya, dan kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban moral untuk mempertahankan dan mengembangkannya di masa kini dan mendatang.

Ulama-ulama NU sendiri sebenarnya pernah memperjuangkan berlakunya syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara. KH A Wahid Hasyim dalam sidang-sidang BPUPKI misalnya, memperjuangkan agar Islam ditetapkan sebagai agama

negara dan syarat seorang presiden adalah beragama Islam. Demikian juga dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959, Partai NU memperjuangkan berlakunya syariah dalam undang-undang negara. Namun, KHA Wahid Hasyim kemudian menerima Pancasila dan UUD 1945 yang membuang tujuh kata, dan Partai NU menerima pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 berlaku kembali.

Sikap mencoba untuk memperjuangkan berlakunya syariah pernah dilakukan, karena memang demikianlah perintah keagamaan yang harus diikuti. Namun, begitu upaya itu menemui jalan buntu, kenyataan adanya negara nasional sebagai negara damai (*dar as-sulh*) harus diterima dengan penuh kesungguhan. Atas dasar cara berpikir beginilah diikuti kaidah fiqih yang berbunyi “*ma la yutraku kulluh la yutraku julluh*”, yang berarti “apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan bagian terpenting di dalamnya.” Secara keseluruhan, tentu wujud formal negara Islam yang semula diharapkan, tetapi dengan lahirnya Republik Indonesia, harus diterima yang terpenting di dalamnya, yaitu adanya negara yang memungkinkan kaum muslimin menjalankan ajaran agama mereka secara nyata (Abdurrahman Wahid, “Pengantar,” dalam *NU dan Pancasila*, 1989; 10-11).

Dengan berdasarkan fakta sejarah dan alasan hukum agama (fiqih) sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama-ulama NU, saya termasuk orang yang berpendapat bahwa Pancasila dan

NKRI sudah final. Pancasila dan NKRI adalah investasi politik ulama untuk masa depan bangsanya, dan karena itu keduanya merupakan kebanggaan Islam dan juga kebanggaan nasional yang menjadi sumber patriotisme seluruh warga bangsa. Segala upaya (keagamaan maupun politik) yang bertujuan mengganti keduanya biasa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perjuangan dan pengorbanan ulama-ulama kita terdahulu yang telah menanamkan nasionalisme dan patriotisme kepada kita semua.

#### **IV. Penutup**

Meski terjadi perbedaan pendapat soal khilafah di antara berbagai kelompok Islam dan komponen bangsa yang lain, saya kira kita tetap harus menghargai keyakinan dan pendapat kelompok lain. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan para pemimpin harus bisa menjadi rahmat bagi masyarakat luas (umat).

Hanya dengan cara pandang seperti itulah, perbedaan pendapat justru akan menjadi kekuatan yang mampu mendinamisasi kehidupan bersama dan mendewasakan pemikiran dan sikap keberagaman semua pihak. Kalau mereka yang berbeda pendapat cenderung memaksakan kehendak, merasa benar sendiri, dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, maka kita semua jadi mengerti bahwa sesungguhnya yang diperjuangkan itu bukan nilai-nilai, tetapi kekuasaan sebagai jalan untuk mewujudkan perilaku pragmatis dan hedonistik. Kalau sudah demikian, maka tugas negara melalui aparatnya

untuk melakukan tindakan tegas demi terwujudnya kedamaian dan keadilan bersama.[]



~ 11 ~

## TRANSFIGURASI GERAKAN ISLAM

Dr. Hassan Hanafi, seorang intelektual muslim asal Mesir, pernah mengkritik sebagian besar aktivis dan pemikir Islam yang menganggap Islam adalah *one close moment in the history*. Islam di masa lalu, terutama pada masa yang dianggap zaman keemasan, diyakini sebagai puncak peradaban di mana kita harus meniru dan kembali kepadanya. Upaya-upaya imitasi dan romantisme terhadap masa itu menjadi tidak terelakkan.

Akibatnya, peradaban Islam masa kini tidak lagi mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Pemikir-pemikir Islam tidak lagi bisa menghasilkan karya-karya besar yang mempengaruhi dunia seperti *Muqaddimah*-nya Ibn Khaldun. Para ahli arsitektur Islam juga tidak mampu membangun maha karya yang menjadi simbol kemajuan peradaban seperti Masjid Pualam Biru di Turki atau ke Taj Mahal di India.

Meminjam istilah Toynbee, peradaban Islam bisa dikatakan sedang berada dalam fase *breakdown*, yaitu sebuah ‘salah langkah’ yang diambil oleh umat dalam merespons situasi yang ada. Fase ini terjadi karena kuatnya penyangkalan diri di dalam masyarakat Islam sebagai akibat dari sikap imitatif dan mengekor saja (*mimesis*), yaitu melaksanakan ajaran dalam berbagai sendi kehidupan tanpa mengerti makna dan dasar filosofisnya.

\*\*\*

Pada akhir abad ke-19, dunia Islam mengalami kemunduran yang nyata. Kemunduran ini ditandai dengan dua hal sekaligus. *Pertama*, penjajahan Barat atas wilayah Islam yang membentang dari kawasan Magribi di Afrika Barat sampai Indonesia di Asia Tenggara. Rusia menguasai wilayah Siberia dan pada akhir abad ke-19 menguasai Asia Tengah; Belanda menjajah Indonesia; Perancis menguasai Maroko, Aljazair, dan Tunisia; Italia menjajah Libya; Inggris menguasai Malaysia dan Asia Selatan (CE Bosworth dalam *Introduction to Islamic Civilization*, 1976).

*Kedua*, keunggulan Barat dalam sektor ilmu pengetahuan, persenjataan, dan organisasi kenegaraan. Melalui proses yang sangat panjang, Barat lebih dulu menemukan sistem politik yang mapan dan demokratis. Sementara dunia Islam – bahkan sampai saat ini – belum menemukannya.

Dari keadaan seperti itulah muncul gerakan modernisme Islam. Menurut Munawir Sjadzali (1990), modernisme Islam mencakup beberapa wilayah garapan: (1) keyakinan bahwa

kebangunan dan kejayaan Islam hanya mungkin terwujud kembali jika umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni, (2) perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, (3) pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari Barat dalam dua bidang ini.

Modernisme kemudian berkembang—dan terus berkembang sampai saat ini—dalam berbagai manifestasi gerakan, seperti purifikasi ajaran Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan, modernisasi lembaga-lembaga pendidikan, dan bahkan liberalisasi pemikiran Islam.

Namun, dari situlah kemudian muncul persoalan yang tumpang tindih. Di samping terperangkap dalam romantisme peradaban Islam di masa lalu, para aktivis dan pemikir Islam juga terjebak dalam kultur instans yang melihat peradaban Barat masa kini dalam produk jadinya saja. Proses panjang yang dialui peradaban Barat untuk sampai pada tingkat kemapanan dan kematangannya cenderung diabaikan.

Demokrasi di Barat lahir melalui proses revolusi kesadaran individu yang berdarah-darah. Modernitas Barat tumbuh melewati proses panjang, termasuk perlawanan terhadap “Tuhan”—meminjam istilah Seyyed Hossein Nasr—di mana akhirnya modernitas bisa dilembagakan melalui pemisahan gereja dan negara.

Di satu sisi, sebagian besar pemikir dan aktivis Islam memimpikan suatu tata masyarakat yang modern dan demokratis,

tetapi bersendikan ajaran Islam. Karena perbedaan latar belakang sejarah dan filsafat pemikiran, mimpi itu tidak mudah diwujudkan. Peradaban Islam belum pernah melewati “masa pencerahan” seperti Barat, di mana individu menemukan otonominya dan hubungan agama dan negara bisa diselesaikan secara damai dan tuntas. Karena itu, yang terjadi kemudian adalah upaya rasionalisasi realitas sejarah yang ada—meminjam istilah Hamilton AR Gibb—sehingga Islam hadir dalam posisi suplementer.

Di sisi lain, sebagian aktivis dan pemikir Islam tetap menghendaki Islam sebagai ideologi alternatif yang akan menggantikan seluruh sistem Barat. Islam diyakini sebagai sistem yang abadi dan bisa menyelesaikan semua hal. Di sini semangat *archaism* dan *detachment* sangat menonjol. Yang pertama adalah keinginan kembali ke masa lalu dan yang kedua adalah upaya menyingkir dan memutus hubungan dengan peradaban lain. Sikap demikian mendorong tumbuhnya *over claim* yang menyebabkan kita kehilangan ruang untuk berbagi dan teralienasi dalam arogansi yang tidak bermakna.

Peradaban Islam masa kini memang bisa membangun sistem demokrasi, tetapi gagal menumbuhkan kultur dan nilai-nilai demokrasi. Negara-negara Islam memang bisa membangun sistem berdasarkan syariat, tetapi gagal mewujudkan nilai-nilai universal yang menjadi ruh dan tujuan dari syariat yang luhur dan mulia.

\*\*\*

Kini sudah saatnya gerakan Islam melakukan transfigurasi, meminjam Istilah Toynbee, untuk mencegah degradasi peradaban yang semakin parah. Transfigurasi adalah aksi yang dilakukan jiwa untuk menemukan “dunia ke-Tuhan-an.” Agama digali kembali hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Transfigurasi bersifat melampaui norma, prosedur, dan legal formalisme, tetapi tidak menegasikannya.

Dengan transfigurasi itulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bisa mengubah tatanan masyarakat Arab secara revolusioner dan meletakkan fondasi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan transfigurasi pula para wali mampu mengislamkan bumi Nusantara serta mengubah tata sosial masyarakat menuju struktur sosial yang adil dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Transfigurasi gerakan Islam membutuhkan kepemimpinan yang produktif, kreatif, dan berani. Kepemimpinan demikian biasanya memperoleh inspirasi setelah menyingkir sejenak dari masyarakatnya, seperti Nabi ber-*khalwat* di Gua Hira; sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan oleh semua pemimpin karena kekuasaan dan kenikmatan dunia sangat menggoda.[]



~ 12 ~

## PUASA DAN VISI TRANSFORMATIF ISLAM

Menjalankan ibadah seperti puasa atau salat fardlu sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit. Setiap orang yang “kuasa” (tidak dalam keadaan sakit dan halangan-halangan *syar’i* yang lain) bisa menjalankannya dengan baik asal memenuhi syarat dan rukunnya. Dan kebanyakan umat Islam bisa menjalankan itu sebagai manifestasi ketaatan total kepada Sang Maha Pencipta.

Namun, nilai atau pesan moral dari perintah Allah sesungguhnya berada di balik ritus ibadah itu sendiri. Nilai atau pesan moral salat lima waktu misalnya, bukan terletak pada pekerjaan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan *salam*, melainkan bagaimana salat bisa membawa kesadaran utuh tentang tugas kemanusiaan untuk selalu berkomitmen pada kebaikan dan konsisten melawan ketidakadilan. Karena itu, Allah menegaskan bahwa “salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.”

Demikian juga dengan puasa. Hakikat ibadah di bulan Ramadhan ini bukan terletak pada menahan diri dari lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa adalah jalan untuk menjadi manusia bertaqwa. Suatu derajat di mana seorang manusia bisa menjadi hamba Allah (*'abd*) yang mampu menunjukkan ketatatan total kepada-Nya dan sekaligus menjadi pemegang amanat kehidupan di bumi (*khalifah*) yang selalu mengembangkan tata kehidupan bersama yang membawa kebaikan bagi semua makhluk.

Kalau sekadar menahan haus dan lapar atau berhubungan seks maka itu hal yang bisa dikatakan sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu, Nabi Muhammad mengingatkan “betapa banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga.”

## **Revolusi Transendensi**

Kemampuan untuk mentransformasikan ajaran agama ke dalam sikap-sikap moral dan sosial yang secara nyata mempunyai dampak langsung terhadap pengembangan masyarakat berkeadilan itu, oleh Hassan Hanafi disebut sebagai revolusi transendensi. Dengan demikian, revolusi transendensi adalah inti dari kehidupan keberagamaan. Ia merupakan puncak dari ibadah yang merupakan proses terus-menerus sebagai panggilan hidup manusia. Karena tanpa ada kapasitas seperti itu, maka

agama hanya akan menjadi ritus, simbol, dan setumpuk aturan yang menyendiri di luar aspirasi dan kepentingan kesejarahan masyarakat.

Islam sejak awal hadir sebagai kekuatan dengan visi transformatif yang kental. Kehadirannya adalah untuk mengubah struktur masyarakat Arab. Dengan inspirasi wahyu ilahiyah, menurut Asghar Ali Engineer (1993), Nabi Muhammad mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki). Karena itu, para elite Makah lebih terusik oleh implikasi-implikasi revolusioner teologi Muhammad ketimbang dakwahnya yang menentang penyembahan berhala.

Dengan visi seperti itu, ajaran Islam akan tetap menampilkan relevansinya dengan berbagai tuntutan perubahan waktu dan kondisi geografis yang ada (*salih li kulli zaman wa makan*).

## Tantangan

Namun, upaya menjaga dan mengembangkan visi transformatif Islam itu kini menghadapi tantangan yang sangat serius. Globalisasi berbagai sektor kehidupan masyarakat justru menjadikan Islam—dan agama pada umumnya—semakin jauh dari visinya yang membebaskan.

*Pertama*, globalisasi yang bersifat massif ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk bersikap permisif dan meninggalkan aturan-aturan yang dianggap membelenggu.

Agama dalam banyak hal dianggap sebagai setumpuk aturan yang membelenggu. Karena tidak ingin dianggap melawan semangat zaman, sebagian tokoh agama mengambil sikap diam—untuk tidak mengatakan membiarkan—terhadap berbagai kultur permisif itu. Meski terkadang muncul sikap kritis terhadap kultur permisif, sikap yang ditunjukkan tidak mampu menembus struktur yang mengendalikan kultur itu.

*Kedua*, pada saat yang sama, globalisasi juga mendorong tumbuhnya sikap di mana masyarakat cenderung pada segala hal yang serba instan. Masyarakat menjadi kurang menghargai proses, tetapi ingin cepat-cepat menikmati hasil.

Islam pun dihadirkan dalam kecenderungan yang serba instan itu. Acara-acara keislaman di televisi dikemas secara efisien sehingga yang disampaikan hanya kepingan-kepingan ajaran yang di permukaan, cenderung pada nilai-nilai sekundernya, sementara pesan moral yang utama tidak lagi bisa dijangkau.

Ajaran Islam yang sesungguhnya memiliki dimensi kesejarahan yang sangat kompleks dipahami secara parsial jauh dari pendekatan yang komprehensif. Islam pun mengalami involusi dan kemunduran yang nyata, di mana formalisme dan simbolisme menjadi menonjol. Persoalan-persoalan bangsa yang bersifat struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, privatisasi aset, tidak pernah dianggap sebagai persoalan agama, tetapi masalah ekonomi atau politik *an sich*.

Dengan perkataan lain, globalisasi justru berjalan seiring dengan proses pendangkalan dan degradasi kultur keberagamaan.

*Ketiga*, globalisasi juga telah memaksa tokoh-tokoh agama menjadi selebriti. Kita tahu, selebriti di mata masyarakat lebih dianggap sebagai tontonan daripada tuntunan yang menjadi panutan. Sebagai tontonan, yang ingin dilihat oleh masyarakat massa adalah penampilannya, model bajunya, gaya bicaranya, gosipnya, dan berbagai gaya hidupnya yang lain.

Keberagamaan seperti itu memang tidak akan membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat bangsa. Ia hanya berkembang dan terus mengubah bentuknya sesuai dengan tuntutan kultur modernitas yang konsumeristik dan hedonistik. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ia menjadi bagian dari industrialisasi kapitalistik yang hanya berorientasi pada komersialisasi segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dan kenikmatan hidup.

Keberagamaan yang bisa mempertahankan visi transformatif ajaran agama adalah keberagamaan tradisional yang menyatu total dengan kehidupan masyarakat. Islam tradisional adalah Islam yang tidak larut dalam budaya massa, tetapi terus berkembang berdasarkan dinamika internal masyarakat sendiri. Ia tidak dipaksa lahir oleh globalisasi, tetapi tumbuh dari akar sejarah peradaban Islam yang sangat panjang. Pesantren dan kiai sebagai salah satu penjaga Islam tradisional misalnya, tetap mampu menunjukkan daya tahan dan dinamikanya secara terus-menerus selama ribuan tahun dan tetap memberi warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat bangsa.

Benar apa yang dikatakan Snouck Hurgronje bahwa “Islam tradisional di Jawa yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tetapi, perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit, dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama.”<sup>[1]</sup>

~ 13 ~

## **PUASA TERKEPUNG KULTUR SEREMONIAL**

Ibadah puasa Ramadan tahun ini ditunaikan oleh umat Islam Indonesia di tengah kondisi bangsa yang bisa dikatakan sedang mengalami degradasi kultur di berbagai bidang kehidupan penting. Suatu kondisi kemunduran yang terjadi pada struktur dasar kehidupan masyarakat, tetapi tidak begitu mudah dilihat kecuali jika dipahami secara seksama.

Secara sepintas lalu, bangsa ini mengalami kemajuan yang cukup menjanjikan di permukaan. Indikator-indikator makro ekonomi membaik, setidaknya selalu stabil. Liberalisasai politik berhasil menghantarkan masyarakat ini sebagai negara demokrasi modern. Acara-acara keagamaan dan formalisasi ajaran agama juga cukup semarak.

Namun, indikator-indikator positif dari kondisi perekonomian itu belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan dan pengangguran tetap belum bisa ditekan, bahkan cenderung meningkat. Semakin hari masyarakat merasa semakin sulit untuk bekerja dan mencari penghidupan.

Kemajuan penting dalam pembangunan politik juga belum disertai tumbuhnya kultur politik yang baik. Demokrasi prosedural memang berhasil dibangun, tetapi kultur politik yang demokratis tidak juga tumbuh. Etika politik masih diabaikan. Demokrasi liberal yang sedang dibangun lebih menguntungkan dan memenangkan mereka yang punya uang. Masyarakat tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan, tetapi menjadi konsumen yang dimainkan oleh iklan-iklan dan janji-janji politik para elite.

Demikian juga dalam sektor keagamaan. Maraknya acara-acara keagamaan di televisi, banyaknya pejabat dan kelas menengah yang menunaikan ibadah ke tanah suci, belum dibarengi dengan transformasi kultur keberagamaan yang sehat. Toleransi, penghormatan pada perbedaan, keterbukaan untuk berdialog dengan semangat kasih sayang, kesediaan untuk berbagi, dan bekerja sama cenderung menurun justru di saat gairah keagamaan begitu meningkat.

Mengapa situasi paradoks itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa menjadi jawabannya. *Pertama*, kecenderungan di kalangan elite untuk mengedepankan simbol sebagai produk

dari hegemoni pemikiran positivistik-fungsional. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi, yang dikejar adalah angka-angka statistik. Misalnya, tingkat pertumbuhan dan inflasi. Ketika angka yang menjadi target sudah dicapai, maka puaslah hati para pemimpin. Soal bahwa angka itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan masyarakat, itu seakan bukan urusan dan tanggung jawab mereka.

Dalam politik, sikap mengedepankan simbol itu dimanifestasikan dalam kebijakan yang mementingkan tercapainya prosedur-prosedur. Sementara dalam sektor keagamaan, sikap demikian diekspresikan dalam berbagai bentuk keberagamaan yang sifatnya lahiriah dan legal-formal. Misalnya, pemberlakuan syariat, pemakaian busana muslim, dan Islamisasi berbagai sektor kehidupan yang lain.

*Kedua*, kecenderungan di kalangan elite dan kelas menengah untuk mencapai tujuan dengan jalan pintas dan instan. Banyak pemimpin tidak memiliki kesabaran untuk menjalani proses secara alamiah dalam mewujudkan tujuan hidupnya, juga tujuan kolektif organisasi atau partai politiknya. Cara-cara instan ditempuh dengan membeli waktu. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat cukup dicapai dengan statistik. Demokrasi dibeli dengan prosedur-prosedur. Keberagamaan cukup dengan simbol-simbol dan ritus yang dilaksanakan semarak di mana-mana.

*Ketiga*, kecenderungan para elite untuk menjadi selebriti dalam segala hal dengan mengedepankan kemewahan dan citra diri yang dianggap efektif untuk menarik dukungan politik. Dengan sendirinya, politik menjadi berjarak dengan kenyataan, bahkan semakin menjauhinya. Elite cenderung melindungi diri untuk bersentuhan langsung dengan persoalan nyata di masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

Puasa mengajarkan banyak hal kepada manusia tentang kehidupan. *Pertama*, puasa mengajarkan bagaimana manusia harus membangun keseimbangan hidup dalam segala bidang kehidupan. Puasa adalah media untuk menguatkan ketahanan fisik seseorang sekaligus olah batin untuk memperkuat kepekaan sosial, kepedulian, dan meningkatkan moral-spiritualitas.

Kalau puasa dilaksanakan hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban dengan tidak makan dan minum, maka tidak ada maknanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Demikian juga kalau seseorang hanya mengejar tujuan-tujuan simbolik dan statistik, maka itu kurang bermakna selain hanya kepuasan yang bersifat sementara.

*Kedua*, puasa melatih kesabaran dan kesadaran untuk menjalani kehidupan sebagai proses panjang. Untuk berbuka puasa, seseorang bisa saja tidak harus menunggu lebih dari separo hari yang dilaluinya. Tetapi, seseorang yang berpuasa dituntut untuk bersabar menunggu sampai maghrib tiba saat dibolehkan untuk berbuka. Di sini, puasa juga mengajarkan bahwa untuk mencapai

kesenangan dan kenikmatan hidup, seseorang seharusnya tidak membeli waktu dengan menempuh cara-cara pragmatis dan instan untuk mencapai tujuan.

*Ketiga*, puasa mengajarkan seseorang untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan etos kehidupan. Bila mau, seseorang yang berpuasa cukup diam di rumah dan tidur. Ia akan mendapat pahala dengan tidurnya itu. Tetapi, jika ia mau bekerja keras, pahala yang diterima akan jauh lebih besar. Seseorang boleh puas jika sudah mencapai tujuan-tujuan simbolik-prosedural. Tetapi, jika ia mau bekerja keras untuk mewujudkan tujuan dalam arti sesungguhnya, maka itu lebih utama dan mencerminkan etos pribadinya yang bertanggung jawab.

Puasa, dengan demikian, bisa menjadi momentum untuk mengatasi degradasi kultur bangsa secara bertahap. Semoga dengan ibadah puasa, umat bangsa ini semakin bertaqwa dan sejahtera. Selamat berpuasa. []



~ 14 ~

## BELAJAR POLITIK KEPADA TOKOH- TOKOH BESAR NU

Nahdlatul Ulama menjadi organisasi keagamaan yang besar dan diperhitungkan bukan semata-mata karena jumlah anggotanya yang banyak, atau karena beberapa kadernya bisa menjadi pemimpin bangsa. NU menjadi besar karena tokoh-tokohnya mampu memberi teladan bagaimana menjadi pemimpin besar.

Jiwa kepemimpinan bukan sesuatu yang diwariskan, tidak pula dimanipulasi dengan survei. Pemimpin besar tidak ditentukan oleh pendidikannya atau oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Seorang yang menguasai ilmu pengetahuan tertentu bisa menjadi intelektual, tetapi belum tentu bisa menjadi pemimpin. Pemimpin besar adalah mereka yang pengetahuannya bisa melahirkan kebijaksanaan (*wisdom*), konsistensi (*istiqamah*) dalam perjuangan dan keikhlasan dalam mengabdikan kepada masyarakat.

Sejak berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, NU senantiasa melahirkan pemimpin besar yang menjadi teladan bagi warga *Nahdliyin*, juga menjadi inspirasi dan pemimpin masyarakat bangsa ini. Salah satunya adalah KH Hasyim Asy'ari. Seorang ulama besar Nusantara yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk memperbaiki masyarakat. Karena itu, ketika hendak mendirikan pesantren, Mbah Hasyim memilih daerah Tebuireng di selatan Jombang, sebuah daerah yang termasuk dalam kategori daerah rawan di mana kejahatan dan kemaksiatan menjadi pemandangan sehari-hari. Dalam buku, *Tebuireng dari Masa ke Masa* (1978), Mbah Hasyim menyatakan, “menyiarkan agama Islam artinya memperbaiki manusia. Jika manusia itu sudah baik, apa yang akan diperbaiki lagi daripadanya.”

Kebesaran Mbah Hasyim juga terlihat dari sikapnya yang selalu menjaga jarak dengan politik praktis. Ketika ditunjuk sebagai Kepala Shumubu (Kantor Urusan Agama Nasional), Kiai Hasyim menyerahkan tugas itu kepada anaknya, KH A Wahid Hasyim. Kiai Hasyim hanya terjun dalam politik yang bersifat strategis, menyangkut masalah kebangsaan dan kenegaraan secara luas. Kiai Hasyim lah yang memberikan fatwa bahwa Nusantara adalah “wilayah Islam” (*dar Islam*), meski bukan “negara Islam” (*darul Islam*), karena sebelumnya pernah diperintah oleh kerajaan Islam dan umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya.

Ketika tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia pada awal September 1945, Kiai Hasyim juga yang berinisiatif mengumpul-

kan kiai-kiai dan konsul NU, dan kemudian memberi fatwa bahwa NKRI yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah secara fiqih. Jadi, politik Kiai Hasyim adalah politik strategis menyangkut eksistensi dan kedaulatan negara, serta untuk menjaga kemuliaan agamanya. Jika sudah masuk ke wilayah politik praktis, Kiai Hasyim memilih untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli.

Kemudian, ada KH A Wahid Hasyim. Putera Kiai Hasyim ini adalah pemimpin muda NU yang sangat berbakat. Kiai Wahid ikut merumuskan Pancasila dan dasar-dasar kehidupan bernegara. Pemimpin muda bijaksana ini adalah simbol persatuan umat Islam (terutama NU dan Masyumi), juga persatuan nasional (antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis).

Kebesaran Kiai Wahid juga terlihat pada ketekunannya untuk mendidik anak-anak muda menjadi calon pemimpin bangsa. KH A Muchit Muzadi pernah mengatakan bahwa semua anak muda yang dididik langsung oleh Kiai Wahid berhasil menjadi tokoh besar di Republik ini. Mereka antara lain KH Achmad Siddiq, Dr. Idham Chalid, KH Saifuddin Zuhri, Djamaludin Malik, Zainul Arifin, dan masih banyak lagi.

Sepeninggal Kiai Wahid, ada KH Abdulwahab Chasbullah yang dikenal piawai dalam berpolitik. Kiai Wahab berhasil membawa NU tetap eksis dan berperan penting selama empat periode sejarah bangsa, yaitu masa kolonial, masa revolusi kemerdekaan, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru.

Yang menarik, kepiawaian Kiai Wahab selalu bersumber dari pemikiran keagamaan yang mendalam. Dalam hal ini, Kiai Wahab dikenal sebagai ulama yang selalu memilih hukum yang paling ringan, karena menurutnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan, sehingga yang paling ringanlah yang paling bisa diterapkan. Yang penting setiap tindakan selalu berada dalam koridor hukum dan akhlaq.

Kebesaran Kiai Wahab juga terlihat dalam semangat perjuangannya yang tidak pernah padam sampai akhir hayatnya. Kiai Wahab adalah satu-satunya kiai yang menghadiri seluruh Mukhtamar NU sejak organisasi ini didirikan. Kiai Wahab juga yang bisa memberi semangat luar biasa sehingga Partai NU yang baru didirikan pada tahun 1952, bisa sukses menjadi pemenang ketiga pada Pemilu 1955.

Ulama besar seangkatan Kiai Wahab adalah KH Bisri Syamsuri. Pendiri Pesantren Denanyar ini dikenal sebagai ulama yang konsisten dalam berpolitik. Mbah Bisri hampir selalu berbeda pendapat dengan Mbah Wahab dalam berbagai masalah politik. Hal itu terjadi karena kalau Mbah Wahab selalu memilih hukum yang paling ringan, Mbah Bisri selalu memilih hukum yang paling berat. Alasannya, kalau hukum yang berat tidak dapat dilaksanakan, masih ada hukum yang lebih ringan yang menampungnya.

Tentu, masih banyak ulama besar lain yang tidak bisa disebutkan di sini karena terbatasnya tempat. Misalnya, KH Machrus Ali, KH Ali Ma'shum, KH As'ad Syamsul Arifin, KH

Achmad Siddiq, dan ulama-ulama non-struktural yang terus dikenang dan menjadi teladan sampai saat ini, seperti Mbah Abbas Buntet, Mbah Kiai Manaf Lirboyo, Mbah Kiai Djazuli Ploso, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Ma'shum Lasem, Mbah Bisri Rembang, Mbah Dalhar Watucongol, Mbah Hamid Kajoran Magelang, Mbah Munawwir Krapyak, dan ulama-ulama lain dari berbagai disiplin ilmu.

Pelajaran politik dan keteladanan penting dari utokoh-tokoh besar NU itu adalah bahwa kebijaksanaan, konsistensi, dan keihklasan levelnya berada di atas pengetahuan. *Wisdom* lebih tinggi dari *knowledge*. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa segala tindakan politik harus senantiasa berdasarkan pada hukum (agama) dan moral, sehingga politik tidak lagi soal kekuasaan, tetapi perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

Bangsa ini dan berbagai elemen masyarakat kita telah mulai kehilangan kebijaksanaan, konsistensi dan keihklasan, dan semakin larut dalam kekuasaan yang hedonis dan sesaat, sehingga fondasi-fondasi kehidupan kebangsaan yang sudah mulai kokoh secara perlahan mulai rapuh. Pada akhirnya, kita selalu mulai dari nol, hampir tidak ada akumulasi. Dalam kondisi seperti inilah kita perlu belajar dan tulus meneladani pemikiran dan perjuangan para pemimpin besar NU dan juga tokoh-tokoh bangsa yang lain.[]



~ 15 ~

## **BERGURU KEPADA PENDIRI NU**

Banyak kalangan prihatin dengan semakin terseretnya kiai-kiai dalam pusaran arus politik praktis dewasa ini. Bahkan Menteri Agama M Maftuh Basyuni dalam beberapa kesempatan menyerukan agar kiai kembali ke pesantren, sebagaimana militer kembali ke barak.

Menganalogikan politik kiai dengan politik tentara memang kurang tepat. Karena politik kiai secara umum didasarkan dan menyatu dengan doktrin agama, sesuatu yang tidak ada dalam “teologi” tentara. Meski demikian, banyak kalangan sepakat dengan gagasan tentang pentingnya kiai kembali ke pesantren. Bukan karena politik tidak penting, melainkan karena pengembangan pesantren justru akan lebih menentukan wajah masyarakat dan bangsa di masa depan.

Di sinilah menjadi penting kita belajar politik kepada Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan

pendiri Pesantren Tebuireng Jombang. Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu membangun pesantrennya dan sekaligus tetap mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan politik kenegaraan. Sampai saat ini, Kiai Hasyim diakui dan dikenang sebagai ulama besar karena investasi politiknya untuk bangsa, integritas dan warisan keilmuan, dan kelembagaan yang abadi.

KH Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama kharismatik yang dihormati masyarakat dan disegani penguasa. Rasa hormat diberikan karena Kiai Hasyim adalah seorang kiai yang luas dan dalam pengetahuan agamanya. Ia seorang ulama dengan pendirian yang tegas dan mengabdikan hidupnya untuk suatu proses transformasi masyarakat secara menyeluruh. Ia juga diakui sebagai ulama besar karena keberhasilannya mendidik santri-santri menjadi tokoh besar di kemudian hari. Seperti ditulis oleh Greg Fealy (2003), menteri-menteri dari unsur NU di masa Presiden Sukarno dan anggota parlemen dari Partai NU sebagian besar adalah santri Kiai Hasyim di Tebuireng.

Lebih dari itu, kebesaran Kiai Hasyim bukan hanya karena ia seorang ulama yang teguh, melainkan juga seorang patriot yang mencintai tanah airnya. Ia tanpa kenal lelah mendidik santri-santrinya menjadi ahli agama sekaligus pejuang bangsa untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan tumpah darahnya. Kiai Hasyim bukan hanya melawan kolonialisme dalam arti militer, melainkan juga kolonialisme kultural. Karena itu, ia sempat mengharamkan santri dan masyarakat memakai pakaian yang menjadi kebiasaan kaum penjajah, seperti dasi dan celana.

Seperti ditulis Abdurrahman Wahid dalam bukunya, *Bunga Rampai Pesantren* (1978), pada masa perlawanan terhadap pemerintah kolonial, kiai dan pesantren secara kultural berfungsi sebagai benteng pertahanan menghadapi penetrasi kebudayaan luar. Fungsi yang demikian menghendaki adanya proses “pemurnian” agama dalam batas-batas tertentu, dimulai dari penonjolan aspek *syara’* (formalisme hukum agama) di pesantren.

Patriotisme dan nasionalisme Kiai Hasyim juga ditunjukkan ketika ia bersama sejumlah kiai memelopori Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi itu berisi seruan kepada umat Islam untuk membangkitkan perang suci (jihad) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir tentara Sekutu dan Belanda di belakangnya yang hendak kembali menjajah Indonesia.

Resolusi itu sendiri didasarkan atas fatwa Kiai Hasyim bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah secara fiqih. Dengan demikian, Kiai Hasyim telah memberi status terhadap NKRI sebagai negara yang sah di mata hukum agama (fiqih).

Di samping seorang nasionalis, Kiai Hasyim juga bukan sosok yang haus jabatan. Ia tidak pernah tergoda untuk berpolitik praktis. Ketika diberi jabatan oleh Jepang sebagai Kepala Shumubu (Kantor Urusan Agama) misalnya, jabatan itu ia serahkan kepada puteranya, KH A Wahid Hasyim. Jadi, Kiai Hasyim

hanya menjadi kepala secara *de jure*. Demikian juga jabatan sebagai Ketua Masyumi. Semua urusan politik praktis didelegasikan kepada puteranya, sementara Kiai Hasyim sendiri tetap *istiqamah* berdakwah dan menjadi guru di pesantren. Ia tidak pernah meninggalkan—apalagi melalaikan—tugas utamanya sebagai kiai pesantren.

Kiai Hasyim tidak pernah melarang kiai dan santri-santrinya berpolitik. Ia sendiri memberi contoh bagaimana berpolitik. Namun, politik Kiai Hasyim adalah politik makro-strategis. Ia benar-benar melibatkan dirinya dalam urusan politik jika ada situasi darurat yang mengancam kedaulatan bangsa dan kemerdekaan umat untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, Kiai Hasyim melibatkan diri dalam urusan politik untuk jangka waktu tertentu, sementara urusan politik praktis diserahkan kepada orang lain yang pas di bidang itu.

Ibarat seorang resi yang hanya turun dari padepokan di atas gunung ketika situasi masyarakat sedang kacau dan membutuhkannya. Kalau situasi sudah normal, maka sang resi akan kembali ber-*khalwat* di padepokannya. Demikian juga Kiai Hasyim. Ia hanya terjun ke dunia politik dalam situasi dan alasan khusus, selebihnya ia kembali ke pesantren mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

Keberanian untuk menjaga jarak dengan politik praktis menjadikannya tidak pernah kehilangan keawasan dan kebijaksanaan (*wisdom*) untuk memahami persoalan secara menyeluruh dan

mencarikan alternatif solusi yang lebih diterima oleh masyarakatnya.

Benar apa dikatakan KH A Wahab Chasbullah—seperti dikutip Allan A Samson dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (Eds.), *Political Power and Communications in Indonesia* (1978)—Islam dan politik seperti gula dan manisnya. Jika seseorang bisa memisahkan gula dari manisnya, dia akan mampu memisahkan Islam dari politik (*if someone is able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics*).

Namun, Kiai Hasyim telah mencontohkan bagaimana cara berpolitik kiai yang efektif tanpa mengorbankan tugas utamanya sebagai pemimpin umat. Dengan demikian, dibutuhkan keawasan, kearifan, dan kedalaman wawasan sehingga seorang kiai tahu kapan harus terlibat dalam urusan politik strategis dan kapan harus menarik diri atau menjaga jarak dengan dunia politik.

Itulah KH Hasyim Asy'ari. Seorang kiai besar yang konsisten dan fokus membangun landasan yang kokoh bagi transformasi masyarakat dan bangsa secara luas. Suatu sikap yang mungkin sulit untuk diikuti secara konsisten saat ini, kecuali bagi mereka yang ikhlas dan sungguh-sungguh.[]



~ 16 ~

## KETELADANAN POLITIK KIAI

Sejarah politik Nahdlatul Ulama (NU) di masa lalu telah mewariskan pelajaran dan keteladanan yang sangat berharga bagi pembangunan politik kita dewasa ini. Para kiai NU telah meletakkan dasar-dasar kultur dan manifestasi politik yang dibangun di atas pandangan dunia (*world view*) pesantren yang menyeluruh tentang kehidupan.

Dengan pandangan dunia seperti itu, politik kiai NU di masa lalu bukan hanya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan, melainkan juga berhasil meletakkan fundamental politik yang kokoh sehingga dimungkinkan adanya pangkalan-pangkalan pendaratan bagi realisasi tujuan Islam dan cita-cita nasional yang dikehendaki bersama.

## Tiga Dimensi

Berbeda dengan golongan (*firqah*) keagamaan yang lain, pandangan dunia NU menggabungkan tiga dimensi dan perspektif sekaligus, yaitu dimensi teologis atau spiritual, dimensi *akhlaq* atau tasawwuf, dan dimensi hukum atau fiqih. Semuanya diposisikan saling menunjang dan melengkapi, bukan terpisah atau saling berhadapan.

Dimensi teologis atau spiritual berfungsi untuk mentransendensikan politik duniawi menjadi spirit perjuangan yang berorientasi masa depan. Cara pandang politik pun bisa melampaui hal-hal yang bersifat simbolik, material, dan tujuan-tujuan jangka pendek. Dan yang terpenting, kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan nasional, selalu menjadi taruhan utama.

Pada Mukhtar ke-11 di Banjarmasin, 8-12 Juni 1935 misalnya, NU memutuskan bahwa wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan penjajahan Belanda adalah “wilayah Islam” atau “negeri Islam” (*dar Islam*), tetapi bukan negara Islam (*darul Islam*). Negeri Islam adalah sebuah wilayah di mana kebebasan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dijamin oleh negara. Sedangkan negara Islam adalah negara yang berdasarkan pada ideologi Islam secara formal dan dipimpin oleh seorang penguasa muslim.

Dengan status Hindia Belanda sebagai “negeri Islam” maka ada proses teologisasi dan spiritualisasi dalam politik para kiai

NU, sehingga politik kiai selalu merupakan manifestasi dari kemampuannya untuk menentukan pilihan antara hal-hal esensial agama dari hal-hal yang dianggapnya bukan persoalan utama, atau antara nilai dan strategi.

Dimensi akhlaq atau tasawuf dikembangkan untuk membangun suatu kultur politik yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan dan kebijaksanaan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah Hadis, bahwa Nabi Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlaq, maka politik tanpa etika hanya akan menjadi praktik kaum hedonis dan pragmatis yang kehadirannya di dunia politik hanya untuk mencari status (jabatan) dan menumpuk kekayaan.

Sementara dimensi hukum atau fiqh dikembangkan untuk menopang proses pelebagaan politik sehingga praktik-praktik politik bisa berjalan akumulatif menuju terbentuknya sistem yang kokoh. Politik yang mengabaikan aturan main hanya akan menciptakan situasi *chaotic* atau *faudla*, di mana dalam situasi demikian, keadilan dan tujuan politik tidak mungkin direalisasikan.

Ketiga dimensi di atas merupakan satu kesatuan, tidak bisa dikedepankan salah satu aspeknya saja. Politik yang terlalu mengedepankan dimensi teologis atau spiritualitas hanya akan berupa wacana atau jargon-jargon yang sulit diukur keberhasilannya. Politik yang terlalu mengedepankan hukum cenderung kaku dan mau menang sendiri. Sementara politik

yang hanya mengedepankan dimensi moral akan menciptakan “jarak permanen” antara nilai-nilai dan kenyataan politik. Seperti menonton pertandingan dari pinggir lapangan, terus berteriak, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permainan itu sendiri.

## **Keteladanan**

Sejarah politik NU pada masa awal setidaknya menampilkan tiga sosok kiai yang sangat besar pengaruhnya dalam politik bangsa ataupun perjalanan NU itu sendiri. Ketiga kiai itu adalah KH M Hasyim Asy’ari, KH A Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu memberi makna pada politik yang kelihatannya bersifat duniawi dalam spirit teologis. Kiai Hasyim-lah yang memelopori keluarnya fatwa bahwa negara Hindia Belanda adalah “wilayah Islam” dan status NKRI yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah menurut padangan Islam. Karena itu, mempertahankan kemerdekaan bukan saja bagian dari kewajiban masyarakat sebagai warga negara, melainkan juga kewajiban agama bagi para pemeluk Islam.

Kiai Wahab adalah kiai yang dikenal ahli diplomasi dan piawai melakukan manuver politik. Suatu hari misalnya, Presiden Sukarno bertanya kepada Kiai Wahab: “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” Kiai Wahab menjawab, “nasionalisme ditambah *bismillah* itulah Islam. Kalau Islam

dilaksanakan dengan benar pasti umat Islam akan nasionalis.” Begitulah Kiai Wahab, ulama yang sangat cerdas menerjemahkan ajaran Islam dalam kehidupan politik praktis.

Sementara KH Bisri Syansuri adalah ahli fiqh yang konsisten. Kalau Kiai Wahab dikenal sering menggunakan hukum yang lebih ringan, Kiai Bisri cenderung memilih hukum yang lebih berat. Menurut Kiai Bisri, pada dasarnya, manusia itu suka menghindar dari hukum, karena itu lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat sehingga kalau seseorang melanggarnya masih bisa ditampung oleh hukum yang lebih ringan. Karena itu, sikap politik Kiai Bisri cenderung keras dan tidak mengenal kompromi.

Namun, Kiai Bisri juga tidak semata-mata mengedepankan hukum, ia juga selalu menjaga *akhlaq* politik. Pada Mukhtamar ke-24 NU di Bandung, Juli 1967 misalnya, Kiai Bisri berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Rais ‘Aam NU mengalahkan Kiai Wahab. Tapi, Kiai Bisri menolak jabatan itu, karena ia menghormati Kiai Wahab, teman dan sekaligus saudara iparnya. Mukhtamar akhirnya memilih Kiai Wahab, tetapi kepemimpinan secara efektif dijalankan oleh Kiai Bisri.

Itulah keteladanan politik kiai. Beberapa partai politik di Indonesia cenderung terus mengalami degradasi dan gagal membangun sistem internal yang kokoh, dan karena itu gagal pula menjadi unsur penting yang menopang proses stabilisasi politik nasional. Hal itu bisa terjadi karena beberapa elite partai

tidak mampu mengawinkan ketiga perspektif di atas (teologis, akhlaq, dan fiqih) dalam berpolitik, bahkan sebagian lagi mengabaikan ketiga dimensi itu sehingga terseret dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Orientasi politiknya hanya kekuasaan jangka pendek, aturan main cenderung dilanggar, dan kesantunan politik diabaikan. Suatu praktik politik yang bertentangan dengan apa yang sudah dibangun para kiai di masa lalu.[]

~ 17 ~

## NU, JENDELA RUMAH INDONESIA

Delapan puluh tiga tahun yang lalu, tepatnya 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan oleh para ulama besar Nusantara. Pendirian NU pada waktu itu sebenarnya lebih merupakan proklamasi atas eksistensi tradisi Islam Nusantara yang sudah berumur ratusan tahun. NU adalah wadah bagi para pemeluk Islam yang menganut ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama abad pertengahan dan kemudian dipribumisasikan dengan cara yang khas di wilayah Nusantara oleh para wali.

Setelah delapan puluh tiga tahun berdiri, sampai hari ini NU tetap menjadi organisasi keagamaan yang berperan penting dalam setiap perubahan masyarakat. NU diakui sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Hal itu dimungkinkan karena tradisi NU mengakar secara kokoh dalam kultur masyarakat

Indonesia dan peradaban Islam di masa lampau, yang membuatnya mampu menjadi jendela bagi “rumah” Indonesia, menjadi sumber inspirasi, solusi, kohesi, dan sekaligus dinamisasi kehidupan bangsa.

## Tiga Pilar

Kebesaran NU bukan hanya terletak pada jumlah anggotanya yang memang besar. Lebih dari itu, kebesaran NU juga terletak dalam tiga hal berikut yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi.

*Pertama*, kebesaran tradisi pemikiran keagamaannya yang terkodifikasi dalam berbagai literatur kitab kuning dan dikaji secara terus-menerus selama ribuan tahun sejak awal perkembangan Islam. Tradisi ini dikenal dengan istilah tradisi fiqih, atau pemikiran serba-fiqih. Dalam konteks ini, kebesaran NU terletak pada otentisitas (keaslian) pemikiran Islam-nya yang merupakan produk resmi dari peradaban Islam dan sekaligus sifatnya yang tidak pernah terputus dengan semangat pemikiran dan perjuangan Islam periode awal.

*Kedua*, kebesaran dan keagungan tradisi spiritualitasnya yang termanifestasi dalam berbagai gerakan *tariqah*. Tradisi *tariqah* ini juga memiliki ketersambungan yang tidak terputus dalam konteks pewarisan nilai-nilai dan ajaran sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tradisi pemikiran fiqih memperkaya warga NU dari segi rasionalitas-normatif, maka tradisi *tariqah*

memperkuat dimensi spiritualitasnya sehingga etik dan etos perjuangan warga NU memiliki dimensi keabadian.

*Ketiga*, kebesaran tradisi kesehariannya dalam bentuk amaliah-amaliah ibadah dan *ijtima'iyah* (sosial-budaya) yang menggabungkan tradisi pemikiran keagamaan dan tradisi spiritualitas dengan budaya masyarakat setempat. Bagi warga NU, keberagaman bisa diekspresikan dalam manifestasi kebudayaan, demikian juga kebudayaan bisa dimanifestasikan dalam tradisi keagamaan.

Dengan kebesaran tiga tradisi itu, pandangan dunia NU selalu bisa: (1) keluar dari cara pandang monokultural terhadap realitas, sehingga pemikiran dan sikap keagamaannya sangat toleran, moderat dan terbuka, serta bersifat mendewasakan umat; (2) mengambil nilai-nilai terbaik dari setiap budaya dan peradaban sehingga pandangan dunia NU dengan sendirinya bersifat kosmopolit; (3) “menjinakkan” setiap ekses negatif yang dibawa peradaban sehingga masyarakat tidak larut dalam arus perubahan tetapi juga tidak anti-terhadap perubahan.

## **Agama dan Budaya**

Berbeda dengan kelompok Islam puritan yang berusaha membersihkan Islam dari unsur budaya masyarakat setempat karena dianggap mengotori kemurnian ajaran Islam, maka tidak demikian dengan NU. Ada tiga argumentasi (*hujjah*) mengapa NU mengambil posisi demikian. *Pertama*, Islam tidak mungkin

dihadirkan dalam bentuk yang asli sebagaimana simbol-simbol Islam di masa lalu, karena hal itu menunjukkan adanya kemandekan dan kemunduran dalam kreativitas berkebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai hukum sosial dan kulturnya sendiri. Bahkan, terdapat kebiasaan atau tradisi masyarakat yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hukum agama (*al-'adah muhakkamah*).

*Kedua*, Islam juga tidak mungkin dihadirkan secara eksklusif, menyendiri di luar konteks sejarah budaya, karena hal itu justru menunjukkan ketertutupan pemikiran keagamaan dan menghilangkan nilai keagungan ajaran Islam itu sendiri. Tanpa sentuhan spiritualitas dan kebudayaan, Islam akan hadir dalam bentuk yang kaku dan ekstrem. Padahal Islam adalah rahmat bagi semua umat manusia dan seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

*Ketiga*, bagi NU, beragama dalam manifestasi budaya justru akan menjadi wahana pematangan dan pendewasaan keberagamaan itu sendiri, dan pada saat yang sama Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses transendensi kebudayaan masyarakat. Kapasitas dan kesediaan untuk beragama dalam manifestasi budaya menunjukkan adanya kemampuan untuk membangun keterbukaan dan kerendahan hati guna menerima kebenaran dan kebajikan yang terkandung dalam setiap peradaban.

Dengan perkataan lain, kultur keagamaan yang menjadi tradisi NU merupakan proses sejarah dan orientasi jangka panjang untuk menjadi umat beragama yang beridentitas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai utama ajaran Islam dan kultur masyarakat setempat. NU mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi seorang muslim yang hidup di dunia Arab di masa lalu, atau muslim arogan yang kebarat-baratan. Bagi NU, nilai-nilai positif dari setiap peradaban bisa diintegrasikan dalam tradisi keagamaan dan kebudayaan karena hanya dengan begitulah dinamika bisa dijaga, etos bisa ditumbuhkan, dan identitas bisa dikembangkan, sesuai dengan kaidah “memelihara tradisi lama yang baik dan mengembangkan tradisi baru yang lebih membawa kemaslahatan” (*al-muhafadah ‘ala al-qadim as-salih wal-akhdu bil jadid al-aslah*).

## **Jendela Rumah Indonesia**

Dengan kebesaran tradisi yang dimilikinya, NU telah menjadi jendela bagi rumah Indonesia dalam beberapa episode sejarah yang telah dilalui. NU yang pertama kali memutuskan bahwa Nusantara adalah sebuah “wilayah Islam,” NU juga yang memutuskan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah final dan sah secara fiqih. Dan pada tahun 1983, NU yang pertama kali menerapkan Pancasila sebagai asas organisasi.

Pandangan dunianya yang moderat dan toleran menjadikan NU selalu tampil sebagai juru damai dalam berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Jika tradisi NU bisa terus dikembangkan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh, berkarakter, dan mengakar kuat pada tradisinya, seperti Cina, India, Rusia, dan negara-negara di Amerika Latin.[]

~ 18 ~

## **NU DAN TRANSFORMASI BANGSA**

Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa “Islam tradisional di Jawa yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tetapi, perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama.”

Karena tidak memahami tradisi NU secara benar, banyak pengamat kemudian terkecoh dan keliru menilai NU. Pengamat seperti Mochtar Naim, Arnold Brackman, Daniel Lev, Ernst

Utrecht, Peter Polomka, Lance Castles, dan Leslie Palmier, serta banyak pengamat “modernis” yang lain memberi cap NU sebagai oportunis, jumud, mistis, dan stigma-stigma lain yang identik dengan keterbelakangan. Mereka tidak mampu melihat perubahan-perubahan sangat fundamental yang dilahirkan dari dinamika internal tradisi NU yang sifatnya bertahap dan di bawah permukaan.

Kenyataan bahwa sampai saat ini NU tetap eksis sebagai “ormas Islam terbesar di Indonesia” dan tetap menjadi tumpuan bagi banyak pemimpin yang ingin merebut atau mempertahankan kekuasaan, merupakan sedikit bukti bahwa NU memiliki daya tahan dan pengaruh luar biasa dalam setiap siklus kehidupan bangsa.

## **Kekuatan Tradisi**

NU adalah ormas yang membangun pandangan dunianya di atas kekuatan tradisi Islam dan masyarakat yang ada. Tradisi yang dijaga dan dikembangkan NU secara terus-menerus itu meliputi tiga aspek. *Pertama*, khazanah peradaban Islam masa lampau (*legacy of the past*). Seperti dikatakan Abdurrahman Wahid (1985), peradaban Islam memiliki kebesaran material yang diwariskan pada dunia dalam bentuk legasi arsitektur penuh kemegahan (dari Masjid Pualam Biru di Turki hingga ke Taj Mahal di India); keagungan rohani yang dilestarikan dalam kepustakaan yang masih berjuta-juta dalam bentuk

naskah tulisan tangan dan belum dicetak, serta dalam tradisi penurunan ilmu-ilmu dan nilai-nilai keagamaan dari generasi ke generasi dengan hasil terpeliharanya kebulatan pandangan hidup kaum muslimin hingga kini, dan kelengkapan yang ada pada masa lalu peradaban Islam yang dapat digunakan sebagai alat pengembangan peradaban Islam yang baru di masa depan.

Dalam tradisi NU, kebesaran khazanah peradaban Islam itu dilembagakan dalam kitab-kitab fiqh, gerakan tarekat, dan dialog terus-menerus dengan realitas dan tradisi masyarakat setempat. Semuanya bersifat saling melengkapi sehingga ada dinamika internal yang khas.

Dengan kekayaan seperti itu, tradisi pemikiran NU bisa lebih terbuka, tidak kaku, dan mempunyai kemampuan menyerap berbagai manifestasi kultural, wawasan keilmuan, dan nilai-nilai yang datang dari agama, kepercayaan, dan peradaban lain. Dalam konteks demikian, nilai-nilai universal yang lahir dari berbagai peradaban disatukan menjadi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan umat (*mabadi' khairi ummah*) yang memungkinkan terciptanya harmoni sosial dan kesejahteraan umum.

*Kedua*, tradisi berpikir fiqh dalam kerangka pemikiran mazhab. NU dikenal sebagai organisasi keagamaan yang secara fiqh berpegang pada salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di samping itu, NU juga merujuk kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam tarekatnya, serta kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam pemikiran tauhid atau teologinya.

Dengan tradisi keilmuan dan spiritualitas seperti itu, pemikiran dan sikap keberagamaan NU bisa terhindar dari pendekatan yang bersifat kaku, tunggal, dan monolitik terhadap teks-teks suci yang juga berpengaruh dalam cara pandang terhadap realitas. Dengan merujuk pada beberapa mazhab, pluralisme dan sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda menjadi sesuatu yang *built in* atau terintegrasi secara utuh dalam tradisi NU.

Tradisi berpikir fiqih memang memungkinkan NU menjadi sangat kosmopolit, dalam arti terbuka dan sekaligus dinamis. Ketika bangsa atau masyarakat menghadapi suatu persoalan misalnya, NU akan bisa lebih arif dan dewasa memberikan solusi dan pemahaman terhadap persoalan itu berdasarkan pemikiran salah satu dari mazhab empat. Dengan sendirinya ada banyak alternatif yang bisa diberikan untuk dijadikan pegangan bersama.

Jika pendapat salah satu atau semua mazhab itu dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman, atau jika fiqih dianggap kurang bisa dijadikan pegangan, maka NU menyediakan jalan keluar melalui teori-teori hukum Islam (*usul al-fiqih*) dan kaidah-kaidah hukum agama (*qawaid fiqhiyyah*). Jadi, selalu ada ruang sangga yang menampung dan sekaligus menjadi jawaban dari berbagai persoalan, sehingga jalan buntu bisa dihindari dan pemikiran-pemikiran ekstrem bisa dihilangkan. Dan setiap pemahaman dan solusi atas setiap

persoalan selalu diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, sebagaimana menjadi tujuan dari diturunkannya ajaran Islam itu sendiri.

Ketika partai-partai Islam sudah menemui jalan buntu dalam mewujudkan Islam sebagai dasar negara (dalam perumusan dasar negara tahun 1945) dan mewujudkan negara Islam (dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1958-1959), NU bisa memberi jalan keluar yang diterima semua pihak. Bagi NU, Indonesia sebagai “negara damai” (*dar as-sulh*) harus diterima dengan sungguh-sungguh. Pandangan ini didasarkan pada kaidah hukum *ma la yutraku kullu, la yutraku julluh* (apa yang tidak bisa diwujudkan seluruhnya, jangan ditinggalkan unsur terpenting yang ada di dalamnya). Indonesia yang berdasarkan Pancasila, melindungi dan memberi kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Itulah bagian terpentingnya. Sikap NU kemudian yang menerima NKRI berdasarkan Pancasila secara final juga merupakan manifestasi dari penerapan hukum agama (fiqih) dalam kehidupan bangsa.

*Ketiga*, tradisi masyarakat setempat berikut nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dengan kedalaman pemikirannya yang bersumber pada unsur-unsur dinamis dari peradaban Islam di masa lalu, NU bisa berinteraksi secara dinamis dengan tradisi masyarakat yang ada. NU tidak pernah memurnikan atau membersihkan Islam dari tradisi dan kultur masyarakat, sebagaimana gerakan modernisme Islam, karena hal demikian bukan saja

bertentangan dengan kosmopolitanisme peradaban Islam, melainkan juga akan membuat keberagamaan menjadi kaku, kering dari nilai-nilai moral, dan juga terasing dari sejarah masyarakat.

NU menempatkan Islam sebagai salah satu unsur yang membentuk atau menjadi pilar bangsa bersama-sama agama, kepercayaan, dan tradisi yang ada di dalam Republik ini. Islam tidak diposisikan menyendiri di luar sejarah, tetapi menjadi bagian yang saling melengkapi (komplementer) bersama yang lain. Di sini, ada kerendahan hati dan keterbukaan untuk saling belajar, memberi dan menerima (*take and give*), sehingga dinamisasi kehidupan bangsa menjadi sangat kental dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari struktur dalam masyarakat sendiri.

## **Transformasi Bangsa**

Dengan demikian, anggapan bahwa NU adalah oportunis, jumud, atau mundur sebenarnya merupakan pandangan yang lahir dari penglihatan sepintas terhadap NU di permukaannya saja. Bukan suatu pandangan yang dalam dan seksama terhadap kekayaan tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan oleh NU selama ini.

Semua pemikiran dan sikap sosial atau politik yang dimanifestasikan dalam gerakan NU merupakan produk dari pandangan dunia yang bersumber dari khazanah peradaban

Islam, tradisi berpikir serba-fiqih, dan juga nilai-nilai luhur yang ada dalam kultur masyarakat setempat di mana NU berkembang di dalamnya. Karena itu, pemikiran dan sikap NU senantiasa memiliki legitimasi keagamaan, keilmuan, moral, dan juga kultural yang memungkinkannya bisa eksis dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini.

Dengan kekayaan peradaban dan tradisi seperti itulah NU bisa tetap menjadi kekuatan utama yang terus mempengaruhi transformasi bangsa dari waktu ke waktu. Dan itu hanya bisa dipahami dan dilihat oleh mereka yang mampu membaca kedalaman tradisi NU dan dinamikanya secara sungguh-sungguh dan seksama.[]



~ 19 ~

## **NU DAN DEMOKRATISASI BANGSA**

Demokratisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru berjalan sangat cepat, bahkan mungkin paling cepat di antara negara-negara berkembang. Indonesia hanya butuh waktu lima tahun untuk menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian juga dalam penerapan prosedur-prosedur standar demokrasi modern yang lain.

Namun, proses demokratisasi itu bukan tanpa persoalan. Ada paradoks yang nyata di mana demokrasi prosedural jauh lebih menonjol ketimbang demokrasi substansial. Prosedur-prosedur dan simbol demokrasi memang bisa dibangun dengan cepat, tetapi kultur demokrasi tidak tumbuh semestinya. Penyampaian aspirasi dengan jalan kekerasan dan memaksakan kehendak justru marak terjadi. Penghormatan terhadap perbedaan keyakinan juga mengalami kemunduran.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia telah memainkan peran penting dalam proses demokratisasi bangsa. Sesuai dengan tradisinya yang mengakar secara kuat pada peradaban Islam di masa lalu dan kultur masyarakat yang ada, demokratisasi yang dimainkan dan disumbangkan NU selalu bersifat menyeluruh di mana prosesdur dan substansi, norma dan nilai, berjalan seiring saling melengkapi.

Karena itulah, meski di permukaan terlihat tidak terlalu menonjol, proses demokratisasi yang lahir dari NU bersifat menyentuh kesadaran total masyarakat sehingga demokrasi tidak sekadar menjadi “gaya hidup,” tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kemuliaan hidup.

## **Pilar-Pilar Demokrasi NU**

Nilai-nilai dan kultur demokrasi di NU bersumber pada tiga pilar utama yang menjadi inti pandangan dunia NU itu sendiri. *Pertama*, cara berpikir keagamaan yang serba fiqih. Di dalam fiqih, agama ditafsirkan dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan rumusan mazhab yang berbeda. Jadi, perbedaan pendapat merupakan salah satu inti dari pemikiran fiqih, sesuatu yang melekat (*built in*) dalam tradisi NU.

Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, tradisi fiqih juga mengajarkan bagaimana melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Tradisi ini menghindarkan kita dari sikap kaku dan

hitam putih dalam melihat masalah. Dan tujuan utama dari cara berpikir multi-dimensi ini adalah agar kita bisa sampai pada tujuan akhir dari diturunkannya agama, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

*Kedua*, karena hakikat fiqh adalah melihat dan memahami masalah dari berbagai sudut pandang, maka dengan sendirinya ada kultur di mana ulama yang satu dengan yang lain saling menghargai pendapat dan perspektif masing-masing. Dalam tradisi fiqh, ada kultur saling menghargai dan menghormati pendapat atau keyakinan yang berbeda.

*Ketiga*, cara pandang tasawuf atau tradisi tariqah yang melekat dalam tradisi spiritualitas NU. Kalau fiqh merupakan cara berpikir yang mengedepankan dimensi rasionalitas manusia yang bersifat menyeluruh, tasawuf melihat manusia dari dimensi spiritualitas. Melihat dengan hati yang bersih.

Simak misalnya bagaimana beberapa kiai NU menjadi pengayom mereka yang secara fiqh mungkin dikategorikan sebagai orang yang melanggar syariat. Namun, kiai-kiai itu tetap bersama mereka karena sang kiai melihat bahwa di hati para “pelanggar syariat” itu masih ada iman, ada keyakinan kepada Allah SWT, ada niat untuk memperbaiki diri. Kiai yang masuk kategori ini misalnya, (alm.) KH Hamim Djazuli Ploso Kediri atau yang akrab dipanggil Gus Miek. Selain memimpin semaan al-Qur’an dan jamaah *Dzikrul Ghofilin* (pengingat mereka yang lupa), Gus Miek juga akrab dengan dunia malam seperti diskotik

dan semua “jamaah”-nya. Ada juga KH Suady Wijaya Kajoran Magelang. Gus Suad, demikian ia biasa dipanggil, selain memimpin jamaah mujahadah Sapu Jagad, juga dekat dengan para preman, penyangbuk ayam, dan orang-orang jalanan.

Kelihatannya itu peran yang kontradiktif. Tetapi, sebenarnya tidak. Meminjam istilah KH Abdurrahman Wahid (1993), di kedua wilayah itu sang kiai sebenarnya berperan sama: memberikan kesejukan pada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang sedih, menemani mereka yang lemah, dan pada akhirnya mengajak mereka terhadap kebaikan.

Spiritualitas seperti itu bisa dicapai karena tradisi pemikiran NU, menurut Gus Dur, selalu berpegang pada sejumlah kaidah hukum agama yang membawakan tatanan masyarakat yang ideal. Kaidah akan pentingnya memelihara keselamatan umat yang dipimpin. Kaidah akan pentingnya mencapai cita-cita secara bertahap. Kaidah akan pentingnya perlindungan kepada pihak lain yang lemah. Kaidah akan pentingnya persaudaraan antarmanusia ditegakkan dengan segala upaya. Sikap seperti itu mampu mengembangkan sebuah dimensi lain dalam situasi keagamaan warga NU: kecintaan dan kasih sayang mengatasi perbedaan, apapun perbedaan antarmanusia yang ada.

## **Demokratisasi Berbasis Tradisi**

Dengan pandangan dunia seperti itu, NU akan senantiasa membuka jalan bagi proses perubahan dan demokratisasi

masyarakat dengan basis tradisinya yang kokoh. Demokratisasi dalam perspektif tradisi NU adalah sebuah proses pembangunan tata sosial politik yang humanistik di mana seseorang dihargai dan dihormati karena memiliki keyakinan atau aspirasi berbeda. Demokratisasi adalah salah satu cara bagaimana suatu sistem sosial dan politik menghormati hak-hak kemanusiaan dan kemuliaan yang melekat di dalamnya.

Namun demikian, demokrasi hanyalah sebuah cara atau alat—bukan tujuan akhir—untuk memuliakan manusia dengan segala potensi, keyakinan, dan aspirasi yang dimilikinya. Kalau hanya demokrasi yang bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sesuai dengan kaidah fiqih bahwa “sesuatu yang tidak bisa diraih kecuali tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), maka menegaskan demokrasi merupakan bagian dari ajaran agama yang mulia.

Karena demokrasi hanya merupakan sarana, maka kita tidak boleh terkecoh dengan simbol-simbol atau prosedur demokrasi. Kalau kita sudah terkecoh, maka akan seperti orang membangun pos Siskamling yang indah dengan fasilitas TV, tetapi kesadaran untuk ronda malam tidak ada sehingga pos Siskamling itu akan sia-sia.

Tradisi NU mengajarkan kepada kita bagaimana membangun demokrasi yang bersifat menyeluruh, di mana simbol-simbol dan prosedurnya ditegakkan di atas kesadaran dan kultur sosial-keagamaan yang luhur. Sebuah proses pembangunan

politik multi-dimensi, di mana politik diorientasikan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan kesejahteraan mereka sebagaimana diajarkan oleh agama.[]

~ 20 ~

## NU DAN PERUBAHAN MASYARAKAT BANGSA

Perubahan merupakan *sunnatullah*, hukum alam yang tidak bisa dihindarkan. Whitehead pernah menyatakan bahwa yang paling pasti di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan terjadi karena banyak faktor, misalnya penambahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, meningkatnya partisipasi, meluasnya hubungan sosial, dan sebagainya.

Menghadapai perubahan itu, apalagi perubahan yang berjalan sangat cepat, ada kelompok yang hanyut dalam perubahan, ada kelompok yang menentangnya secara ekstrem dengan mempertahankan sumber daya lokal yang dimiliki selama bertahun-tahun. Yang hanyut akan kehilangan identitasnya, yang bertahan akan semakin terpinggirkan.

Di antara kelompok masyarakat yang selama ini mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa harus kehilangan identitasnya adalah kelompok Islam tradisional yang kemudian mendirikan organisasi keagamaan bernama Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Bahkan dalam banyak hal, masyarakat NU bisa menjadi pelopor perubahan.

Pada masa kolonialisme Belanda misalnya, kiai-kiai pesantren yang menjadi cikal bakal NU selalu tampil di depan untuk melawan penjajahan. Pada masa genting, ketika sejumlah kelompok menentang sebagian isi dasar-dasar Indonesia merdeka, NU melalui KH A Wahid Hasyim-lah yang merumuskan solusinya. Ketika sebagian pemimpin Republik masih bimbang untuk menentukan sikap berkaitan dengan masuknya kembali tentara Sekutu pada awal September 1945, ulama-ulama NU-lah yang pertama kali mengambil sikap dan memutuskan bahwa Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta adalah sah secara fiqh dan karenanya umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan pada awal tahun 1980-an, NU juga yang memelopori penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi.

Pada level yang lebih terbatas di tingkat lokal, NU dan para kiai juga yang menjadi pelopor perubahan masyarakat—sebagaimana dibuktikan dalam berbagai penelitian, seperti yang dilakukan Hiroko Horikoshi (1987). Memang terkadang perubahan yang dibawa oleh NU tidak bisa dilihat dengan mudah,

kecuali oleh mereka yang benar-benar berpikir mendalam dan seksama. Karena perubahan yang dilakukan NU cenderung mendahulukan perubahan pada tingkat kesadaran ketimbang perubahan simbol-simbol di permukaan.

Tidak berlebihan kiranya jika seorang Snouck Hurgronje pernah menyatakan bahwa “Islam tradisional di Jawa yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran ulama abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit, dan demikian dalam tersimpan. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat, walaupun sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatnya secara seksama.”

## **Pandangan Dunia**

Salah satu yang menopang kosmopolitanisme pandangan dunia NU adalah tradisi berpikir serba fiqh. Sebagaimana dirumuskan dalam statuten NU 1926, dalam bidang fiqh NU menganut salah satu dari mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Meski secara faktual NU lebih banyak menggunakan mazhab Syafi’i, cara berpikir keagamaan dalam kerangka mazhab memungkinkan pemikiran NU bersifat dinamis, toleran, dan terbuka.

Di satu sisi, karena dalam banyak hal keempat mazhab itu sering berbeda dalam melihat hukum suatu masalah atau peristiwa. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul, *At-Tibyan wi Nahyi 'an Muqattha'ati al-Arham wal Ihwan*, misalnya menyebutkan bahwa masalah-masalah yang diperdebatkan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki mencapai lebih dari 14.000 masalah seputar ibadah dan muamalah. Belum lagi Imam Hanafi dengan Syafi'i, juga dengan Imam Hanbali.

Dengan pemikiran mazhab yang berbeda itu, pemikiran NU selalu melihat masalah dari berbagai perspektif, tidak hanya dari satu sisi. Sehingga pemikiran yang kaku dan hitam putih bisa dihindarkan.

Di sisi lain, setelah fiqih, masih ada kaidah-kaidah fiqih (*qawaid fiqhiyah*) yang bisa menjadi daerah sangga ketika fiqih imam mazhab gagal untuk memberi solusi—meskipun ini bisa dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kaidah-kaidah seperti “apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya” (*ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh*) atau kaidah “ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema, maka pilihlah salah satunya dengan mempertimbangkan yang paling kecil dampak negatifnya” (*idza ta'arada al-mafsadatani ru'ya a'dzamuhuma dlararan birtikabi akhaffihima*), memungkinkan NU bisa keluar dan memberi solusi yang rasional dari kebuntuan yang sering dihadapi masyarakat, termasuk dalam hal politik.

Ketika kelompok Islam gagal memperjuangkan negara Islam di Indonesia misalnya, baik pada tahun 1945 maupun pada

masa Sidang Konstituante, para pemimpin NU tidak lantas mengambil pilihan ekstrem dengan mendirikan negara Islam sendiri atau memberontak melawan Republik, tetapi menerima negara Pancasila sebagai realitas politik dalam kerangka negara damai. Idealnya memang bentuk negara Islam yang diharapkan, tetapi ketika tujuan itu tidak bisa diwujudkan, maka negara Pancasila harus diterima dengan sungguh-sungguh karena di dalamnya masih ada bagian penting yang bisa diambil, yaitu kebebasan untuk menjalankan syariat agama.

Dengan tradisinya yang agung itu, NU selalu mampu memberikan solusi atas berbagai kebuntuan yang dihadapi masyarakat bangsa. Lebih dari itu, NU selalu menjadi penyeimbang dan mediator dalam segala perdebatan dan pertentangan ideologi kebangsaan-keagamaan dan sekaligus menjadi kelompok moderat yang tidak pernah larut dalam pemikiran dan tindakan radikalisme atau separatisme.

## **Masa Depan**

Dalam sejarah bangsa ini, NU telah menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara masa lalu dan masa depan. Diminta atau tidak, NU pasti akan memainkan peran dalam setiap perubahan masyarakat bangsa ini, baik peran sebagai penjaga gawang, pengatur serangan maupun penyerang di garis depan.

Globalisasi dan liberalisasi yang sedang melanda bangsa ini, jika sudah berhadapan dengan NU, dengan sendirinya akan

“dijinakkan” sehingga hal-hal positif dari proses itu bisa diambil dan yang negatif bisa diminimalisasikan. Dengan seperangkat nilai yang dimilikinya, tradisi NU secara otomatis akan menentukan mana hal yang esensial dan harus dipertahankan, dan mana yang cukup menjadi aksesoris kehidupan. Dengan tradisinya yang kokoh, NU akan selalu memainkan peran penting dalam setiap perubahan masyarakat bangsa, dan sekaligus menjaga agar perubahan itu tidak menyebabkan bangsa ini kehilangan identitasnya sebagai masyarakat Timur yang religius dan berbudaya.[]

~ 21 ~

## **NU SEBAGAI GERAKAN EKONOMI, PEMIKIRAN, DAN PENDIDIKAN**

Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) tidak dimulai pada 31 Januari 1926 saat organisasi ini didirikan, sebagaimana sejarah Indonesia tidak dimulai pada 17 Agustus 1945. Tanggal 31 Januari 1926 hanya sebuah momentum di mana para ulama memproklamasikan kemerdekaan dan kedaulatan tradisi keislaman yang mereka warisi dari para pendahulunya.

Pengamat yang memahami sejarah NU hanya sejak 26 Januari 1926 itu pasti akan terkecoh oleh peristiwa sejarah pada pertengahan tahun 1920-an itu. NU pun dipahami tidak lebih dari organisasi keagamaan yang reaksioner dan selalu berhadapan dengan kelompok modernisme Islam.

## Dua Unsur

Memahami sejarah NU berikut dinamika internal yang mewarnai perjalanannya selama ini tidak bisa dilepaskan dari dua hal berikut. *Pertama*, NU pada hakikatnya merupakan pelembagaan dari tradisi Islam yang sudah ratusan tahun hidup dan berkembang di Nusantara. Dan tradisi Islam di Nusantara itu merupakan suatu *continuum* dari sejarah peradaban dan pemikiran Islam sebelumnya di Timur Tengah dan sekitarnya.

Dalam konteks ini, ada dua tradisi utama yang dilembagakan dan dikembangkan oleh NU yang berasal dari tradisi Islam sebelumnya, yaitu tradisi pemikiran fiqh dan tradisi tarekat. Tradisi fiqh dikembangkan di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan NU, baik yang formal maupun non-formal, melalui pengajaran kitab-kitab kuning hasil karya para ulama dari berbagai mazhab yang berkembang sejak masa-masa awal Islam.

Tradisi fiqh juga dikembangkan melalui forum kajian keagamaan, seperti halaqah, *bahtsul masail* (pengkajian masalah-masalah sosial keagamaan), dan forum-forum sejenis baik yang mengkaji masalah-masalah aktual (*waqi'iyah*) maupun konseptual (*maudu'iyah*). Dengan demikian, proses pewarisan (transmisi) pengetahuan dan pengembangannya berjalan dengan baik dan tidak pernah berhenti.

Sedangkan tradisi tarekat dikembangkan melalui berbagai gerakan dengan varian yang cukup banyak. Masing-masing

memiliki imam (*mursyid*) dan ciri khas. Yang menjadi kekuatan utama dari gerakan ini adalah adanya hubungan yang tidak terputus antara murid dan gurunya, gurunya dan gurunya, yang akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hubungan demikian yang diyakini secara penuh mampu membentuk kepribadian yang positif dan bermakna bagi si pelaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tradisinya yang kokoh, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid (1974), NU memiliki sikap lentur untuk menerima modernisasi dari luar sebagai kenyataan, dan pada saat yang sama mencoba menyelamatkan inti ajaran Islam (dalam bentuk *tauhid*, *syariah*, dan *akhlak*) dari kemerosotan lebih jauh dan kalau mungkin, mengembalikan alur kehidupan pada tingkat ideal kehidupan masyarakat Islam. Watak dari sikap ini adalah gradualisme yang menolak konfrontasi dengan proses modernisasi, selain mencoba menjinakkan dan kemudian menggunakannya bagi kepentingan hakiki Islam.

*Kedua*, kelahiran NU tidak bisa dipisahkan dari kelahiran *Nahdlatul Wathan* yang berdiri pada tahun 1914, *Nahdlatut Tujjar* (1918), dan *Tashwirul Afkar* (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU. *Nahdlatul Wathan* yang artinya kebangkitan bangsa atau tanah air merupakan organisasi pendidikan dan dakwah yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya manusia yang berwatak religius dan nasionalis. Sumber daya demikian dibutuhkan untuk kepentingan

kekuasaan (seperti kebutuhan akan pejabat birokrasi) ataupun kepentingan kemasyarakatan secara luas.

*Nahdlatul Tujjar* yang artinya kebangkitan para pedagang merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasi dan pengembangan usaha kecil. Kebanyakan pendiri NU seperti KH A Wahab Chasbullah adalah pedagang, sekurang-kurangnya memiliki unit produksi yang membuat mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Sedangkan *Tashwirul Afkar* atau potret pemikiran adalah gerakan pemikiran yang berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang terus berubah.

Dengan demikian, NU sebenarnya bukan gerakan keagamaan dalam arti yang sempit, tetapi juga gerakan ekonomi, pemikiran, dan pendidikan yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Orientasi demikian bisa terus dijaga sampai saat ini dengan berbagai bentuk kebijakan yang mungkin belum terkonsolidasi dengan baik.

Seperti dirumuskan dalam *Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama Tahun 1926*, NU didirikan dengan tujuan (1) memajukan pendidikan madrasah yang berdasar agama Islam; (2) memakmurkan masjid, langgar, dan pesantren; (3) memperhatikan nasib anak-anak yatim dan fakir miskin, dan (4)

mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan sektor pertanian dan perdagangan.

## **Kuatnya Orientasi Politik**

Sayangnya, dalam perkembangannya, syahwat politik para elite NU terlihat jauh lebih besar dari orientasinya untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan dan ekonomi. Hanya gerakan pemikiran NU yang berkembang pesat dengan munculnya kelompok-kelompok muda kritis dan progresif.

Gerakan ekonomi dan pendidikan NU sebenarnya tidak jalan di tempat, tetapi berjalan cukup dinamis menurut ukuran tradisi NU sendiri. Namun, jika dibandingkan dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan perkembangan di ormas-ormas keagamaan lain, apa yang dicapai NU di dua sektor itu masih sangat tertinggal.

Hal itu bisa terjadi karena dua hal. *Pertama*, sikap hati-hati yang berlebihan sehingga perubahan masyarakat yang begitu cepat terlambat untuk disikapi. Sikap demikian memang ada nilai positifnya, yaitu tetap kuatnya karakter dan identitas NU karena ia tidak mudah larut dalam perubahan. Tradisi NU menjadi demikian kokoh sehingga gaya hidup liberal tidak mampu membuatnya terseret terlalu jauh. Namun, dampak negatifnya NU menjadi gagap dalam merespons persoalan yang membutuhkan jawaban segera.

*Kedua*, orientasi politik yang kuat di kalangan elite NU. Banyak elite NU yang menjadi pengurus karena ingin mendapatkan jabatan politik baik di tengah masa jabatannya maupun sesudahnya. Misalnya, menjadi ketua NU karena berniat ikut dalam pemilihan presiden atau wakil presiden, atau jabatan-jabatan politik lain di bawahnya, seperti gubernur/wagub atau bupati/wabup. NU pun sering menjadi kendaraan politik, atau banyak orang bilang NU terkadang lebih politis dari partai politik.

Orientasi seperti itu sebenarnya tidak menjadi masalah jika selama menjadi pemimpin NU ia bisa fokus dan serius mengembangkan NU sebagai gerakan ekonomi dan pendidikan, tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau pamer kekuatan (*show off force*).

Sebab, selama dua sektor itu tidak tergarap dengan baik, maka tradisi NU yang sudah sangat kokoh bisa mengalami proses degradasi yang tidak terkendali, dan persoalan NU saat ini atau di masa depan akan tetap sama dengan persoalan yang dihadapi pada tahun 1950-an: minimnya sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan yang kurang layak.[]

~ 22 ~

## **MENJAGA NU YANG MODERAT DAN TOLERAN**

Salah satu sumbangan penting yang diberikan Nahdlatul Ulama (NU) kepada bangsa ini adalah pemikiran dan sikap keagamaannya yang moderat dan toleran. Pada saat yang sama, pemikiran dan sikap itu juga berwatak transformatif sehingga NU juga menjadi salah satu kekuatan dinamis yang ikut mengubah masyarakat menuju tatanan baru yang lebih baik.

Dalam berbagai konflik kebangsaan maupun kemasyarakatan, NU seringkali tampil sebagai juru damai dan sekaligus kekuatan yang menjadi pusat keseimbangan kehidupan bersama. Dalam kasus pertentangan antara kelompok Islam dan kelompok sekuler mengenai dasar negara pada tahun 1945 misalnya, NU lah yang menjadi juru damai sehingga pada akhirnya Pancasila diterima sebagai dasar negara.

Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, ketika Indonesia masih berada dalam sistem politik yang relatif kurang demokratis, NU juga yang menjadi kekuatan utama masyarakat sipil yang mendorong demokratisasi menyeluruh dalam kehidupan bangsa. Dan seakan sudah menjadi jaminan, bahwa kalau NU yang mengawali atau NU yang menjadi juru damai, maka kelompok lain akan menerima dengan besar hati. Hal ini dimungkinkan karena sikap moderat, toleran, dan komitmen kebangsaan NU sudah tidak diragukan lagi.

## Tradisi Jalan Tengah

Ciri khas pemikiran dan sikap sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan beraliran *Ahlussunnah wal Jamaah* adalah kecenderungannya untuk mengambil jalan tengah di antara dua pemikiran atau aliran yang bertentangan (*at-tawasuth bain al-ara*). Sebuah jalan kompromi untuk mengambil yang terbaik dari dua pandangan yang berseberangan.

Tradisi jalan tengah itu bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, sisi historis ketika terjadi pertentangan yang tajam dalam bidang teologi antara Mu'tazilah yang cenderung rasional, Jabariyah yang fatalistik, Qadariyah yang sangat ekstrem dalam menggunakan akal, dan Murji'ah yang menentang semua doktrin Khawarij. Sementara Khawarij menentang Syiah. Di tengah perselisihan yang sangat tajam itu muncul golongan tabi'in yang dipelopori oleh Hasan al-Bashri dengan pemikiran-pemikiran yang moderat. Dari sinilah sejarah *Ahlus Sunnah wal Jamaah* bermula.

*Kedua*, sisi pemikiran sosial-keagamaan yang serba-fiqih. Kita tahu, dalam fiqih kita bisa menemukan demikian banyak perbedaan pendapat antara satu ulama dan yang lainnya. Dalam masalah ibadah dan muamalah misalnya, ada sekitar 14.000 perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian dicarilah pendapat yang paling unggul dari berbagai sudut pandang (*arjah*). Kalau pada akhirnya tidak dapat dicari titik temu, maka kemudian diputuskan untuk “sepakat untuk perbedaan” (*al-ittifaq ‘alal ikhtilaf*) dengan semangat saling menghargai dan menghormati pendapat pihak lain.

Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari pernah menceritakan sebuah riwayat tentang Imam as-Syafi’i yang berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Imam as-Syafi’i bermalam selama tujuh hari sambil membaca al-Qur’an sampai khatam. Setelah khatam, pahala bacaannya dihadiahkan kepada Imam Abu Hanifah. Pada setiap salat Shubuh, Imam as-Syafi’i tidak melakukan qunut. Hal itu dilakukan untuk menghormati Imam Abu Hanifah yang tidak men-*sunnah*-kan qunut subuh.

Sifat moderat, toleran, dan transformatif dari pemikiran NU dimungkinkan karena organisasi ini, menurut Abdurrahman Wahid (1984), memiliki (1) tradisi keilmu-agamaan yang dikembangkannya secara khas dari ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, (2) pandangan kemasyarakatan yang tidak hitam-putih, (3) cara pengambilan keputusan umum yang sifatnya membuka

kondisi kemungkinan dan mengutamakan konsensus dalam arti luas, dan (4) proses rekonsiliasi internal yang mapan jika terjadi perbedaan pandangan yang tajam.

Dalam konteks ini, (alm.) Nurcholish Madjid (1989) pernah menyatakan bahwa suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaruan dari nol, tetapi mesti bersedia *bertaqlid*, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu, terutama dari kalangan imam mazhab. Tanpa adanya penghargaan terhadap warisan keilmuan klasik, maka proses pemiskinan kultural akan terjadi. Pada tahap ini sikap keberagamaan akan sangat hitam-putih dan reaksioner.

Dengan perkataan lain, sikap moderat, toleran, dan transformatif itu merupakan produk dari tradisi jalan tengah dalam bidang teologi, pemikiran serba fiqih dalam bidang syariat, dan tradisi penghormatan terhadap pendapat atau keyakinan orang lain baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang merupakan konsekuensi logis dari pluralitas pemikiran fiqih itu sendiri.

## **Globalisasi dan Radikalisasi**

Tantangan kehidupan kita sebagai bangsa akhir-akhir ini adalah munculnya kecenderungan radikalisasi massa, baik massa keagamaan maupun kelompok puritan lain, sejalan dengan derasny gelombang globalisasi di hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Kecenderungan radikalisasi itu telah

menumpulkan kecerdasan dan kewaspadaan kolektif bangsa untuk melihat sisi-sisi positif yang mungkin bisa diambil dari globalisasi. Pada saat yang sama, radikalisis juga semakin menonjolkan kesan negatif dari pemikiran keagamaan yang dianut suatu kelompok.

Di tengah kecenderungan seperti itu, kita melihat betapa pentingnya peranan NU dalam kehidupan bangsa dewasa ini. Karena dengan tradisinya yang kokoh, NU akan selalu kreatif menggunakan khazanahnya sebagai alat antisipasi dan akomodasi terbatas terhadap kebutuhan akan perubahan, di samping sebagai alat penentu mana bagian yang esensial dari kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus tetap dipertahankan. Sehingga globalisasi tidak ditolak secara apriori, tetapi bisa diterima secara terbatas.

Segelintir kelompok dalam tubuh NU sendiri, harus diakui, ada yang larut dalam arus gelombang radikalisis keagamaan dan terjebak dalam pusaran liberalisasi pemikiran sehingga yang satu menjadi seperti Jabariyah, sementara yang lain seperti Qadariyah. Tetapi, karena tradisi NU sudah sedemikian panjang dan tua, maka dengan sendirinya ada sistem “seleksi alam” di dalamnya. Yang konsisten dengan jalan tengah, sikap moderat, toleran, dan transformatif-lah yang bisa bertahan hidup di NU. Sementara yang terlalu radikal atau terlalu liberal secara perlahan akan kembali ke NU yang asli, atau kalau tidak secara perlahan akan tersingkirkan secara alami. Alam bawah sadar masyarakat NU selalu menolak kedua hal itu, secara langsung atau tidak.

Penting dicatat bahwa sikap moderat atau toleran bukan suatu jalan untuk mencari aman atau oportunisme, tetapi justru untuk menjamin agar sikap dan pemikiran keagamaan itu benar-benar diorientasikan untuk menghormati perbedaan dan bagian dari upaya bersama mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Bukan untuk menonjolkan ego atau gagah-gagahan, seperti terlihat dalam manifestasi kelompok radikal dan liberal. Dan dengan sikap moderat, toleran, dan transformatif itulah NU akan selalu menjadi pusat keseimbangan, solusi atas berbagai persoalan, dan sekaligus motor perubahan bangsa.[]

~ 23 ~

## 63 TAHUN RESOLUSI JIHAD NASIONALISME POLITIK ULAMA NU

Tanggal 22 Oktober 1945, 63 tahun yang lalu, ulama-ulama dan konsul NU berkumpul di Surabaya untuk menyikapi situasi politik berkenaan dengan masuknya kembali tentara Sekutu dan Belanda ke bumi Indonesia yang baru saja merdeka. Pertemuan itu digelar karena para ulama mengkhawatirkan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia, sementara pemerintah Republik sendiri masih terlihat ragu dan lamban untuk mengambil sikap.

Pertemuan yang berlangsung sejak 21 Oktober tersebut memutuskan dua hal penting. *Pertama*, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 atas dasar Pancasila dan UUD 1945, adalah sah menurut fiqih. *Kedua*, karena itu, umat Islam wajib mengangkat senjata (*jihad*)

untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Keputusan ini kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad itu kemudian menjadi sumber semangat dan sekaligus payung teologis dan fiqih bagi umat Islam Indonesia untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Meletuslah pertempuran, seperti di Surabaya, Semarang, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan dampak langsung dari keputusan ulama NU itu.

Apa yang diputuskan ulama NU itu merupakan kontribusi yang sangat penting bagi eksistensi negara merdeka dan proses kebangsaan secara keseluruhan. Seperti dikatakan oleh (alm.) KH Ali Ma'shum, Rais 'Aam Syuriah PBNU yang menggantikan KH Bisri Syansuri pada tahun 1981, ulama NU telah menanamkan saham yang sangat besar terhadap berdirinya Republik dan upaya-upaya menjaga eksistensinya.

Resolusi Jihad mencerminkan tiga hal yang sangat berharga bagi kehidupan negara-bangsa waktu itu dan juga menjadi pelajaran bagi kita di masa kini. Pertama, seperti dikatakan sejarawan Sartono Kartodirdjo, pemikiran dan gerakan sosial keagamaan kiai di berbagai pelosok di Indonesia selalu mendorong tumbuhnya dan bersumber pada semangat nasionalisme dan heroisme. Baik karena didorong oleh perintah agama maupun panggilan hati sebagai warga negara, ulama selalu menjadi yang terdepan dalam hal pembelaan terhadap kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional.

Kedua, pemikiran dan sikap ulama NU selalu mencerminkan universalisme nilai-nilai Islam, suatu sikap dan pemikiran terbuka yang mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan manusia dan kebersamaan seluruh warga masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, ulama NU menempatkan Islam tidak sebagai satu-satunya faktor dalam kehidupan bangsa, tetapi sebagai unsur yang melengkapi faktor-faktor lain (komplementer), sehingga keindonesiaan menjadi lebih berwarna, dinamis, dan kokoh. Islam tidak diposisikan secara eksklusif, tetapi melengkapi nilai-nilai lain yang membentuk identitas keindonesiaan. Islam, dengan demikian, bukan hanya menguatkan proses kehidupan bangsa, melainkan pada saat yang sama juga menguatkan proses pendewasaan sikap umat sendiri.

Ketiga, dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, ulama NU ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan ideologi yang abstrak, tidak produktif, dan diulang-ulang. Dalam hal ini, orientasi terhadap hal-hal yang lebih luas dan membawa kemaslahatan jauh lebih penting dan terus dikembangkan serta dikedepankan.

Para ulama NU telah memberikan keteladanan tentang pentingnya mencintai agama yang menyatu dengan kecintaan kepada masyarakat dan bangsa. Pentingnya membangun pemikiran dan sikap keagamaan yang terbuka dan rendah hati. Dan pentingnya mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan masyarakat bangsa.

Hari ini, kehidupan masyarakat dan politik kita dihadapkan pada sebuah paradoks: modernisasi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pemikiran keagamaan yang terus berlanjut, ternyata menghasilkan sikap yang jauh dari hakikat peradaban modern. Kehidupan masyarakat bangsa akhir-akhir ini diwarnai oleh berkembangnya fanatisme keagamaan yang berlebihan, tumbuhnya pemikiran keagamaan yang tertutup dan cenderung *overclaiming*, merasa sebagai kelompok yang paling benar dan paling penting. Maraknya pemikiran dan gaya hidup yang berorientasi pada simbol, prosedur, dan formalisme.

Kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita memang sedang terancam oleh dua arus besar yang menerjang dari kanan dan kiri sekaligus: fundamentalisme agama dan fundamentalisme liberal (ekonomi, politik, dan budaya).

Bangsa Indonesia yang dibangun oleh beberapa tiang penyangga yang saling menguatkan, oleh fundamentalisme agama hendak diganti dengan satu tiang saja, yaitu agama. Tiang-tiang lain dianggap kecil dan tidak penting. Dengan satu tiang, bangsa ini tidak mungkin tegak berdiri.

Sementara kaum fundamentalis liberal hendak merobohkan semua tiang itu, kalau perlu “menjual”-nya. Ideologi sudah berakhir, sejarah sudah berakhir. Liberalisme adalah satu-satunya tiang yang *viable* di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kedua jenis fundamentalisme itu, cepat atau lambat, akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Itulah tantangan

besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dan untuk mengatasi tantangan itu, kita perlu belajar kepada ulama NU dan para pendiri bangsa yang telah mendirikan dan membangun fondasi serta tiang-tiang yang kokoh bagi rumah kita bersama ini. Saat ini, bangsa kita tercinta memerlukan Resolusi Jihad yang baru, dan yang lain.[]



~ 24 ~

## **PERINTAH KIAI-KIAI KEPADA SAYA**

Rapat Gabungan DPP PKB pada Rabu malam, 26 April 2008, telah melakukan voting dan hasilnya meminta saya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PKB. Seperti dinyatakan oleh pimpinan rapat, dr. Sugiat, saya diberi hak untuk menolak atau menerimanya.

Malam itu saya tidak langsung memberi jawaban karena beberapa alasan. Pertama, karena menyangkut kepentingan organisasi, para kiai, dan warga PKB yang berjumlah puluhan juta, saya merasa perlu untuk memikirkan secara mendalam dan seksama agar keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik bagi PKB.

Kedua, dalam pandangan saya, secara substantif keputusan itu cacat hukum. Seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Partai PKB No. 0534/DPP-02/III/A.I/I/2002, Personalia Dewan Pengurus dapat diberhentikan jika; (a) tidak aktif selama enam bulan, (b) *jelas-jelas* melanggar AD/ART Partai, dan (c) menjadi pengurus partai lain. Saya tidak pernah tidak aktif, tidak ada satu butir pun ayat dalam AD/ART yang saya langgar, saya juga tidak menjadi pengurus partai lain.

Menyangkut jabatan ketua umum, pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui muktamar, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ART PKB. Beberapa waktu yang lalu, keputusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberhentian terhadap Alwi Shihab selaku Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB tidak sah dan cacat hukum. Pasalnya, sesuai dengan AD/ART PKB, pemberhentian harus melalui muktamar yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Ketiga, keputusan Rapat Gabungan itu menurut saya secara prosedural juga cacat hukum. Rapat DPP PKB tanggal 26 Maret 2008 adalah Rapat Gabungan, sehingga rapat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membahas pemberhentian Personalia Dewan Pengurus, sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) ART PKB. Jadi, semua pemberhentian Personalia Dewan Pengurus DPP PKB selama ini yang dilakukan melalui Rapat Gabungan adalah tidak sah dan cacat hukum.

Di luar masalah hukum (*syar'i*) seperti itu, ada masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu soal moral dan tanggung jawab terhadap *amanah* yang telah diberikan oleh Muktamar II PKB di Semarang, tanggal 16-19 April 2005. Berbeda dengan Ketua Umum Dewan Syura yang dipilih melalui penetapan setelah pemandangan umum DPW-DPW, tanpa ada proses pemilihan, saya dipilih secara langsung dan aklamasi oleh DPW dan DPC-DPC se-Indonesia.

Oleh karena itu, di samping *istikharah*, saya juga melakukan konsultasi dan minta nasihat kepada kiai-kiai, tokoh-tokoh NU, para pendiri, dan deklarator PKB, serta tokoh-tokoh PKB di berbagai daerah. Dari proses seperti itulah saya kemudian berkeputusan hati dengan niat menata kembali PKB dan menyelamatkan politik NU, saya memutuskan untuk tidak mundur.

KH A Mustofa Bisri, Rais Syuriah PBNU dan deklarator PKB misalnya, menyatakan kepada saya bahwa kalau saya mundur maka akan lebih banyak *madlarat*-nya daripada manfaatnya. Saya juga sudah silaturahmi dengan Rais 'Aam PBNU KH Sahal Mahfudh yang menyatakan hal yang sama.

KH A Malik Madani juga mendukung sikap saya untuk tidak mundur. Rais Syuriah PBNU itu menyatakan bahwa menyerah pada kesewenang-wenangan yang tidak mengindahkan aturan sangat bertentangan dengan prinsip *al-amru bil-maruf wan-nahyu 'anil munkar* yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menyerah berarti mewariskan preseden buruk dalam perpolitikan umat.

KH Mahfud Ridwan Jateng bahkan secara khusus mengirim surat pribadi kepada saya yang meminta saya agar tetap berjuang menjaga dan melaksanakan amanah sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai akhir periode pada tahun 2010 nanti. Menurut Kiai Mahfud Ridwan, tidak ada alasan-alasan yang kuat secara organisasi maupun agama yang bisa dijadikan dasar untuk memaksa saya berhenti di tengah jalan ataupun mundur.

Sementara kiai-kiai lain, seperti KH Abdul Aziz Mansur Jombang, KH Subhan Ma'mun Brebes, dan KH Muhlas Dimiyati Cirebon bahkan secara tegas mengharamkan saya untuk mundur. Mundur berarti lari dari pertempuran, lari dari tanggung jawab, dan itu diharamkan dalam Islam.

Kemudian pada 6 April 2008, dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama NU dan PKB yang diikuti oleh 103 kiai NU dan pengasuh pesantren se-Indonesia, para kiai memberikan fatwa bahwa; (1) hasil Mukhtamar II PKB di Semarang merupakan bentuk kesepakatan tertinggi seluruh warga PKB (*ijma'*) dan karena itu merupakan bentuk perjanjian yang mengikat (*al-'ahdu*) seluruh pengurus dan warga PKB. *Ijma'* dan *al-'ahdu* tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali oleh forum yang sama tingkatannya.

(2) Para kiai meminta saya untuk tidak mundur dan tetap menjalankan mandat (*amanah*) Mukhtamar II PKB di Semarang sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai berakhir masa jabatannya pada tahun 2010.

(3) Para kiai memerintahkan saya untuk menyelamatkan dan menata kembali manajemen PKB demi tegaknya kebenaran, hukum (AD/ART), dan etika politik (*al-akhlaq al-karimah*), dengan menggunakan cara-cara yang dicontohkan para kiai dan ulama saleh terdahulu (*as-salaf as-salih*).

(4) Para kiai juga memerintahkan saya untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan para kiai sehingga PKB bisa menjadi lebih membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa, karena PKB lahir dari PBNU beserta para kiai, dan merupakan alat perjuangan politik NU.

Bagi saya, sudah sangat tegas dan jelas bahwa para kiai dan deklarator PKB memerintahkan kepada saya untuk tidak mundur. Karena kalau saya mundur, maka itu hanya akan menguntungkan bagi segelintir orang di DPP PKB dan membiarkan kedzaliman serta *madllarat* berkembang luas yang merusak sendi-sendi kehidupan partai. Sementara kalau saya tetap menjadi ketua umum maka hal itu akan lebih membawa *maslahat* bagi PKB secara keseluruhan yang dalam setahun terakhir ini mengalami karut-marut sistem karena syahwat politik yang tidak terkendali dari segelintir pengurusnya. PKB juga bisa diselamatkan dan ditata kembali manajemen organisasinya sesuai dengan aturan main (AD/ART), kesantunan politik, dan bimbingan para kiai.

Dengan alasan hukum, moral, dan perintah para kiai tersebut saya sepenuhnya patuh sebagai manifestasi ketaatan saya kepada

para kiai, kecintaan saya terhadap perjuangan NU, dan sekaligus tanggung jawab sebagai pengemban amanah Mukhtamar II PKB di Semarang. Dan saya sangat bersyukur karena di saat yang demikian, banyak sekali kiai yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan dan membesarkan PKB sebagai warisan ulama, setelah sekian lama mereka mungkin merasa ada kemacetan komunikasi dengan partai yang didirikannya itu.

Sebagaimana perintah kiai-kiai, segala ikhtiar yang saya lakukan tetap diniatkan dan diorientasikan untuk kemaslahatan yang lebih besar, sehingga apa yang terjadi bisa membawa hikmah dan kesadaran baru yang lebih bermakna bagi upaya-upaya konsolidasi, dinamisasi, dan pendewasaan politik kader-kader PKB sendiri.[]

~ 25 ~

## PKB BARU DAN SEMANGAT PERUBAHAN

Selama bulan Juni 2008 kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan 4 (empat) gugatan yang terkait dengan persoalan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gugatan-gugatan yang dikabulkan itu adalah, *pertama*, gugatan pemberhentian A Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB; *kedua*, gugatan pemberhentian M Lukman Edy sebagai Sekjen DPP PKB, dan *ketiga*, gugatan pemberhentian Eman Hermawan dan M Hanif Dhakiri sebagai Wasekjen DPP PKB. Majelis Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa semua pemberhentian tersebut tidak sah, dan posisi keempat penggugat dipulihkan.

*Keempat*, gugatan DPP PKB hasil MLB Ancol terhadap MLB Parung juga dikabulkan majelis hakim. Namun, majelis hakim juga memutuskan bahwa MLB Ancol tidak sah.

Ada yang bersyukur atas dikabulkannya empat gugatan tersebut. Ada juga yang kecewa dan menolaknya. Terlepas dari

itu, keputusan PN Jaksel itu telah melahirkan semangat baru di kalangan pengurus dan kader PKB, yaitu semangat perubahan. Kader-kader dan pengurus partai di bawah—setelah sekian lama masuk dalam pusaran konflik—saat ini sedang dalam suasana batin yang menginginkan perubahan secara fundamental dalam kehidupan partai. Semangat perubahan itu menginginkan adanya PKB Baru yang memungkinkan optimisme dan kerja keras bisa berjalan seiring menyongsong Pemilu 2009.

Keputusan pengadilan tersebut telah menjadi tonggak sejarah di mana para kiai, pengurus NU dan PKB akan memulai suatu proses transformasi menyeluruh terhadap partai yang dilahirkan oleh NU ini.

## **Perubahan**

Sekurang-kurangnya, ada lima proses transformasi menyeluruh yang digagas para pengurus dan kader PKB dalam rangka menyongsong lahirnya PKB Baru pada pertengahan tahun 2008 ini. *Pertama*, PKB lama adalah PKB yang penuh konflik. PKB Baru yang diharapkan adalah PKB yang stabil dan dinamis. Konflik memang menjadi bagian tak terpisahkan dan sekaligus mendewasakan dalam dunia politik. Tetapi, konflik yang berkelanjutan justru menimbulkan ketidakpastian dan degradasi politik partai itu sendiri, sehingga upaya-upaya untuk mengakhirinya menjadi keniscayaan.

*Kedua*, konflik yang terus-menerus di PKB terjadi karena para pemimpin partai kurang mematuhi AD-ART, peraturan

partai, dan kepantasan politik. Kader-kader partai dipecat seenaknya tanpa mematuhi AD-ART. DPW-DPW atau DPC dibekukan juga tanpa alasan dan proses yang sesuai AD-ART. Orang-orang baru dijadikan sebagai pengurus partai dengan mekanisme yang tidak lazim. PKB Baru adalah PKB yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan AD-ART, peraturan partai, dan kesantunan politik (*akhlaq karimah*).

Empat keputusan PN Jaksel yang menyatakan bahwa pemberhentian Ketua Umum, Sekjen, dan Wasekjen DPP PKB adalah tidak sah, merupakan peringatan bahwa kebijakan-kebijakan atau perbuatan melawan hukum yang selama ini terjadi harus segera diakhiri. Tidak ada lagi orang yang bisa berdiri atau menempatkan diri di atas AD-ART, apalagi melanggar dengan seenaknya.

PKB Baru bertekad menegakkan aturan main dan etika politik sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum dan tertib organisasi yang baik. PKB Baru dibangun di atas semangat kebersamaan dan penghargaan terhadap semua kader dan anggota partai. Pembekuan dan pemecatan tidak akan lagi dilakukan, kecuali pelanggaran yang dilakukan sudah melewati batas.

*Ketiga*, PKB lama adalah PKB yang kurang harmonis dengan NU. Berkali-kali Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan pengurus teras PBNU yang lain menyatakan bahwa aspirasi NU di PKB tersumbat. PKB seperti “anak hilang” karena kurang

memperhatikan dan menjalin komunikasi yang baik dengan PBNU.

PKB Baru adalah PKB yang kembali ke NU, kembali sebagai alat perjuangan NU. Kalau PKB lama dicap sebagai alat politik figur tertentu, maka PKB Baru dibangun untuk menjadi alat NU di sektor politik. PKB Baru akan berusaha untuk senantiasa menjalin komunikasi, dialog, dan konsultasi dengan PBNU dalam mengambil keputusan-keputusan politik penting.

*Keempat*, PKB lama dibangun di atas sistem kepemimpinan yang cenderung personal dan sentralistik, sehingga kehidupan partai berjalan kurang sehat. PKB Baru dibangun di atas kepemimpinan yang bersifat kolektif dan demokratis. Dengan sistem baru itu, tidak ada lagi pemimpin di PKB yang kekuasaannya bersifat dominatif dan hegemonik. Kebersamaan dan pengabdian akan menjadi ruh dari PKB Baru, sehingga akan ada warna positif dan dinamis dalam kehidupan partai hari ini dan ke depan.

*Kelima*, PKB lama dianggap terlalu menghabiskan banyak energi untuk membela kepentingan figur tertentu. PKB Baru bertekad untuk membela kepentingan masyarakat dan konstituen secara luas. Yang selama ini terjadi adalah bekerja untuk kepentingan pemimpin dan berbagi untuk orang-orang di sekitar pemimpin itu. Kecenderungan itu akan diganti “bekerja dan berbagi untuk rakyat,” yang sebenarnya telah menjadi tekad PKB selama ini.

Dengan kepastian dan semangat seperti itu, PKB Baru secara perlahan akan keluar dari lingkaran setan konflik yang telah membuat partai ini mengalami degradasi luar biasa saat ini. Pengurus dan kader-kader PKB bisa lebih nyaman dalam berkhidmat, melakukan konsolidasi, dan sekaligus mengimplementasikan program-program partai yang maslahat bagi kehidupan masyarakat.

## **Optimisme**

PKB lama merupakan fakta sejarah. Ia masa lalu yang tidak mungkin dihapus, tetapi kita bisa memaafkan. Dan dari situ bisa mengambil pelajaran untuk kebaikan dan pengembangan PKB ke depan.

PKB Baru telah lahir. Optimisme yang menyertai kelahirannya begitu tinggi. Ada keinginan kuat untuk keluar dari sistem lama yang dianggap menghambat perkembangan, dengan membangun sistem baru yang memungkinkan perubahan. Seperti semangat masyarakat Indonesia di masa awal reformasi setelah lama di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, seperti itulah semangat kader dan warga PKB saat ini.

Dengan dukungan dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa, terutama PBNU dan para kiai, PKB Baru diharapkan bisa tumbuh cepat dan mencapai hasil maksimal pada Pemilu 2009.[]



~ 26 ~

## **OPTIMISME MENYONGSONG 2009**

Salah satu perkembangan cukup menggembirakan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini adalah meningkatnya optimisme menyongsong pemilihan umum tahun 2009. Meski dalam beberapa tahun terakhir dilanda konflik, hal itu tidak menyurutkan semangat dan “mental juara” para kiai, warga, kader, dan pengurus PKB untuk menghadapi Pemilu 2009.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, dalam beberapa kesempatan menyatakan PKB sangat diuntungkan dengan posisi historis dan kultural sebagai partai politik yang lahir dari NU. Menurutnya, PKB tidak usah bagus, minimal tidak jelek saja, sudah dapat suara karena memiliki basis NU. Apalagi kalau kader PKB mau bekerja keras untuk melayani dan membela kepentingan NU dan masyarakat secara luas, tentu dukungan yang diterima bisa jauh lebih maksimal.

Asumsi seperti itu bisa jadi tidak berlebihan. Karena fakta menunjukkan bahwa pada Pemilu 2004, PKB tetap bisa bertahan dalam posisi tiga besar. Padahal sejak tahun 2001, PKB menghadapi dua konflik serius, yaitu konflik dengan PKB Batutulis pimpinan Matori Abdul Djalil dan konflik dengan beberapa kiai yang menolak pemecatan Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen DPP PKB.

## **Memaknai Konflik**

PKB merupakan satu-satunya partai politik yang dalam tujuh tahun terakhir dilanda badai konflik berkepanjangan. Di satu sisi, konflik itu jelas mengganggu proses konsolidasi dan penataan manajemen partai dari dalam. Dan hal itu akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan partai kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, konflik itu juga ada sisi positifnya. Salah satunya adalah dinamika internal, daya tahan, dan daya juang para pengurus dan kader partai bisa terus diasah, dilatih, dan ditingkatkan. Dengan sendirinya, pengetahuan dan ketrampilan politik kader PKB tidak pernah mati, tetapi senantiasa hidup dan berkembang. Konflik internal PKB dengan sendirinya menjadi wahana pematangan, pendewasaan, dan dinamisasi kehidupan politik partai.

Benar apa yang dikatakan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdul Aziz Mansyur pada pembukaan Mukttamar Luar Biasa (MLB) PKB di Ancol tanggal 2 Mei 2008 yang lalu. Menurut

Kiai Aziz, konflik yang terjadi di PKB saat ini ibaratnya seperti angin *gendhing* yang biasa melanda tanaman bawang merah di Probolinggo Jawa Timur. Angin *gendhing* adalah angin yang jika datang justru membawa berkah bagi para petani, karena angin ini justru bisa mengusir berbagai jenis hama yang menghambat pertumbuhan bawang merah.

Kiai Aziz mengharapkan konflik di PKB saat ini juga seperti angin *gendhing* itu. Karena dengan konflik yang segera berakhir ini, diharapkan berbagai “hama” yang menghambat pertumbuhan PKB selama ini bisa dihilangkan. Dengan terbebas dari hama itu, PKB bisa kembali menjadi partai besar, dekat dengan NU, para kiai, umat, komponen-komponen bangsa yang lain, dan masyarakat secara keseluruhan.

## **PKB Baru**

Selain karena faktor di atas, optimisme menyongsong 2009 juga didukung oleh beberapa faktor berikut. Pertama, beberapa kiai sepuh yang sudah keluar dari PKB kini bergabung kembali. Kiai-kiai itu antara lain KH Zainuddin Djazuli, KH Nurul Huda Djazuli (kedunya dari Pesantren Ploso Kediri), KH Dimiyati Rois (Kendal), dan KH Muhtadi Dimiyati (Banten), untuk menyebut beberapa nama. Mereka dulu menjadi tulang punggung PKB, tetapi karena tidak cocok dengan figur tertentu di DPP PKB, mereka kemudian keluar dari PKB, setidaknya bersikap pasif terhadap PKB. Kini mereka sudah kembali bergabung.

Para kiai melihat bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengembalikan PKB ke NU setelah sekian lama mereka merasa PKB telah dimonopoli oleh figur tertentu yang menyebabkan hubungan NU dan para kiai dengan PKB menjadi renggang. Mengembalikan PKB ke NU berarti mengembalikan PKB sebagai alat perjuangan NU. Sehingga PKB tidak mengalami proses degradasi yang lebih parah karena adanya kepemimpinan hegemonik di dalamnya.

Kedua, hubungan DPP PKB dengan Pengurus Besar (PBNU), demikian juga struktur kepengurusan di bawahnya, saat ini telah kembali membaik setelah beberapa tahun kurang harmonis. Beberapa kali DPP PKB hasil MLB Ancol bersilaturahmi dengan PBNU dan mengadakan acara bersama di Gedung PBNU. Harmonisasi PKB-NU yang berjalan baik dengan sendirinya akan menguatkan basis dukungan PKB dan memungkinkannya berkembang lebih sehat.

Ketiga, setelah sekian lama dihantui oleh pemecatan dan pembekuan, kader-kader PKB kini bisa bekerja dan berkhidmat lebih tenang dan serius. Dalam beberapa segi, DPP PKB hasil MLB Ancol bisa memberantas hama yang menghambat pertumbuhan PKB dan sumber masalah mengacaukan sistem dan manajemen internal partai selama ini. Terpilihnya KH Abdul Aziz Mansyur yang *low profile* sebagai Ketua Dewan Syura DPP PKB telah memberi warna baru yang lebih sejuk dan pasti.

Keempat, kader-kader NU di luar PKB juga menyambut baik lahirnya PKB Baru yang lebih terbuka, pasti, dan stabil.

PKB Baru bisa menghilangkan citra—bahkan stigma—PKB sebagai partai keluarga. PKB Baru adalah PKB sebagai partai terbuka yang mencerminkan keterbukaan sistem, aspirasi, dan regenerasi.

Kelima, kader-kader PKB yang loyal, militan, dan pekerja keras—yang selama ini disingkirkan—juga telah bergabung kembali. Merekalah yang selama ini bekerja membesarkan PKB melalui pengabdian, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan bergabungnya kembali kader-kader PKB itu, maka kiprah PKB di tengah masyarakat dan bangsa akan lebih maksimal dan efektif.

Itulah optimisme yang menyertai lahirnya PKB Baru satu tahun menjelang Pemilu 2009. Dengan modal sejarah, kultur, dan ideologi yang ditopang oleh keyakinan, mental juara, kerja keras para kader, dan dukungan semua pihak, insya Allah PKB akan tetap menjadi partai besar sesuai harapan NU, para kiai, dan masyarakat yang menginginkan satu hal: perubahan.[]



~ 27 ~

## **SBY DAN VISI POLITIK NU-PKB**

Tanggal 30 April 2009 yang lalu, para kiai dan ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* Indonesia berkumpul di Pesantren “al-Fadlu wal Fadilah”, Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Sebuah pesantren tua dan besar yang diasuh oleh KH Dimiyati Rois. Pertemuan yang diberi nama “Silaturahmi Nasional Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah” itu diselenggarakan untuk merumuskan sikap dan pandangan proaktif kiai terkait dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 nanti. Saya mendapat kehormatan untuk hadir dalam pertemuan itu dan diberi amanah para kiai dan ulama untuk menyampaikan pandangan dan sikap kiai kepada pemerintah dan komponen-komponen strategis bangsa yang lain.

Ada tiga pandangan dan sikap mendasar yang dirumuskan para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) di forum itu.

*Pertama*, menurut pandangan kiai, Pemilihan Presiden 2009 merupakan proses politik dan jalan yang harus ditempuh bangsa Indonesia untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam membangun landasan yang kokoh bagi proses demokratisasi ke depan yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata (*maslahat*). Dalam Islam, *maslahat* adalah tujuan diturunkannya syariat. Karena itu, berdasarkan kaidah “bahwa suatu kewajiban yang tidak mungkin disempurnakan kecuali dengan kondisi atau jalan tertentu, maka jalan itu menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), para kiai berpandangan bahwa partisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari perintah agama yang sangat dianjurkan.

*Kedua*, pertemuan itu juga mempertegas komitmen para kiai dan ulama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati. NKRI berdasarkan Pancasila adalah fondasi kesatuan ideologi dan politik bangsa yang pluralistik. Sejarah juga mencatat bahwa berdirinya NKRI dan perumusan Pancasila tidak lepas dari keterlibatan ulama di dalamnya.

*Ketiga*, selama berabad-abad, Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah*—paham yang dibawa oleh para penyebar Islam awal di Nusantara dan dikembangkan oleh para wali pada periode awal—telah terbukti dan teruji mampu menjadi stabilisator dan

dinamisator kehidupan masyarakat Nusantara yang pluralistik, menjadi sumber persatuan dan perubahan bangsa. Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang bercirikan pandangan dan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan luwes, telah menjadi sumber persatuan dan sekaligus kemajuan bangsa. Suasana kehidupan masyarakat yang damai, penuh persaudaraan, dan stabil selama ini tidak lepas dari mengakarnya *Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah* di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Dengan kekayaan khazanah yang dimilikinya, Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah* mampu mentransformasikan tradisi dan budaya menjadi sumber perubahan, perbedaan menjadi panorama keindahan.

Karena itu, para kiai dan ulama menegaskan bahwa sebagaimana NKRI berdarkan Pancasila dan UUD 1945, Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah* juga merupakan harga mati dalam politik kiai. Kalau NKRI-Pancasila merupakan fondasi kesatuan ideologi dan politik, maka Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah* telah menjadi fondasi kesatuan sosial-budaya bagi bangsa ini selama berabad-abad.

Dengan demikian, paket *three in one*: NKRI-Pancasila-*Ahlus Sunnah wal Jamaah* harus dipertahankan agar tata masyarakat yang damai, adil, stabil, dan toleran bisa dipertahankan dan dikembangkan sebagai prasyarat utama menuju terwujudnya masyarakat bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

Atas dasar pemikiran seperti itu, di samping mengharapkan agar Pemilihan Presiden 2009 bisa berjalan secara damai dan demokratis, para kiai dan ulama juga menekankan pentingnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa dititipi amanah untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan NKRI-Pancasila-*Ahlus Sunnah wal Jamaah* itu.

Apa yang dirumuskan dan menjadi aspirasi para kiai dan ulama itu saya kira merupakan bagian dari tanggung jawabnya yang besar untuk mewujudkan stabilitas, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Imam al-Ghazali pernah menyatakan “tertib politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya tertib agama” (*nizam ad-dunya syartun li nizam ad-din*). Dalam pandangan para kiai dan ulama, tertib sosial dan politik bisa terbangun kokoh selama ini karena bangsa yang majemuk ini disatukan secara politik dan ideologis oleh NKRI-Pancasila yang ditopang oleh kesatuan sosial dan budaya di bawah naungan nilai-nilai *Ahlus Sunnah wal Jamaah*.

Dengan pemikiran dan sikap seperti itu, para kiai dan ulama bermaksud meletakkan dasar-dasar pembangunan bangsa ke depan. *Pertama*, stabilitas. Pembangunan tidak mungkin berjalan baik jika stabilitas tidak dapat diwujudkan. Kalau pembangunan tidak berjalan, kesejahteraan dan keadilan juga tidak mungkin menjadi kenyataan. Doktrin politik *Ahlus Sunnah wal Jamaah* menyatakan bahwa “tidak mungkin ada keadilan dan kesejahteraan jika stabilitas tidak terbangun” (*la ‘adla ma’al faudla*).

*Kedua*, persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan. Suatu bangsa juga tidak mungkin membangun dan menjadi maju jika terpecah-belah dan saling bermusuhan. Persatuan dan persaudaraan yang dibangun dalam kesadaran total sebagai bangsa bermartabat akan mampu mengubah perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi kekuatan perubahan yang luar biasa. Ketika seluruh rakyat dan kelompok masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya sudah mempunyai satu tekad untuk merdeka pada tahun 1945 misalnya, perbedaan-perbedaan yang ada justru menjadi sumber kekuatan yang sangat besar, di mana kekurangan satu golongan bisa ditutup oleh golongan yang lain.

*Ketiga*, tradisi dan budaya merupakan sumber energi persatuan dan kemajuan bangsa. Seperti pernah dikatakan (alm.) Nurcholish Madjid (1989), tradisi, budaya, dan warisan-warisan masa lalu adalah sumber pemikiran-pemikiran kreatif. Tanpa warisan masa lalu, proses pemiskinan kultural akan terjadi. Pada tahap ini, sikap sosial dan keberagamaan masyarakat akan sangat reaksioner, keras, dan kaku.

Kita juga melihat negara-negara seperti Jepang, India, Rusia, China, dan negara-negara Amerika Latin bisa bangkit secara politik dan ekonomi sekaligus sangat kreatif menaklukkan globalisasi, karena para pemimpin di negara-negara tersebut bisa membangun pandangan dunia dan kebijakan yang utuh bersumber pada khazanah budaya, tradisi, dan warisan masa lalunya sendiri. Negara-negara yang terjebak arus monokultural global

dan melupakan warisan budaya sendiri, justru semakin kehilangan identitas dan pembangunannya juga tidak berhasil. Hanya perubahan-perubahan di permukaan yang dihasilkan, tetapi di dalamnya keropos, sehingga tidak tahan terhadap krisis.

Dengan pandangan ideologi, politik, dan kebudayaan seperti itu, para kiai dan ulama merasa ada kedekatan dan persamaan pandangan dengan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu, para kiai dan ulama bermaksud menitipkan NKRI-Pancasila-*Ahlus Sunnah wal Jamaah* berikut kelangsungan hidup bangsa kepada SBY.

Sebagai tindak lanjut dari *taushiyah* dan perintah para kiai NU itu, DPP PKB kemudian memutuskan untuk mendukung pasangan SBY-Boediono pada pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli 2009 nanti. Dengan berkoordinasi, berkonsultasi, dan bekerja sama dengan berbagai unsur partai dan elemen NU yang lain, DPP PKB kemudian bergerak cepat untuk menjalankan amanah para kiai dan ulama NU tersebut. Mesin-mesin politik partai dari unsur pengurus, pemuda, dan perempuan digerakkan. Mesin-mesin kultural dari unsur NU juga dioptimalkan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Dalam jangka pendek tentu saja memenangkan pasangan SBY-Boediono. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah menjaga kesinambungan cita-cita dan kebijakan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, mandiri, adil, dan sejahtera penuh dengan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

DPP PKB sepenuhnya menerima dan mendukung sikap, pandangan, dan aspirasi para kiai dan ulama di atas, karena pada hakikatnya pandangan dan aspirasi tersebut bukan sekadar respons terhadap momentum politik jangka pendek menjelang Pemilihan Presiden 2009 ini, melainkan di dalamnya terkandung pemikiran dan tanggung jawab moral yang berorientasi jauh ke depan demi persatuan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa tercinta.[]



~ 28 ~

## TUGAS KEPEMIMPINAN NASIONAL KE DEPAN

Hari ini kita berkumpul di Pesantren Krapyak ini untuk menunaikan tugas mulia yang sangat dianjurkan agama, yaitu menyatukan visi, tekad, dan tujuan untuk, *pertama*, memilih pemimpin nasional. *Kedua*, merumuskan langkah-langkah ke depan untuk menopang kepemimpinan nasional yang kita pilih dengan pemikiran-pemikiran menyeluruh yang akan menjadi dasar bagi pembangunan bangsa ke depan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan penuh dengan ridha Allah SWT. (*baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Seperti kita tahu, dalam doktrin politik Sunni, kepemimpinan merupakan suatu bagian dari kewajiban agama. Salah seorang ulama mengatakan bahwa “satu hari bersama pemimpin yang dzalim, lebih baik daripada enam puluh hari tanpa kepe-

mimpinan.” Itu artinya, bukan kita mendukung pemimpin yang dzalim, melainkan sangat dianjurkan untuk memiliki kepemimpinan. Adanya kepemimpinan merupakan salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Padahal, seperti dikatakan Imam Ghazali, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat bagi terwujudnya ketertiban dalam kehidupan agama (*nizam ad-dunya syartun li nizam ad-din*).

Lantas kepemimpinan yang bagaimana yang kita dukung. Setidaknya, kita mendukung kepemimpinan dan pemimpin yang memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dirumuskan para ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Imam al-Mawardi misalnya, menyebutkan seorang pemimpin harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) adil; 2) cerdas atau berilmu pengetahuan; 3) memiliki kesempurnaan indera seperti pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan; 4) memiliki kemampuan menggagas yang dapat melahirkan strategi kepemimpinan rakyat dan pengaturan kemaslahatan; 5) berani dan tangguh sehingga mampu mempertahankan negara dan melawan musuh.

DPP PKB dan para ulama *Ahlus Sunnah wal Jamaah* dalam pertemuan di Kendal 30 April 2009 yang lalu telah memutuskan untuk mendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan saja karena beliau dianggap paling memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana dirumuskan para ulama, melainkan juga karena berbagai pertimbangan politik menyangkut keberhasilan yang dicapai Presiden SBY dalam lima tahun terakhir ini.

Para ulama memandang bahwa Presiden SBY dalam lima tahun terakhir berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan. Bagi para kiai dan ulama, stabilitas adalah syarat wajib untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, juga syarat yang memungkinkan umat Islam bisa menjalankan syariat secara nyaman dan damai.

Di tengah krisis ekonomi global saat ini, Presiden SBY juga terbukti bisa menjaga stabilitas ekonomi. Terjadi keajaiban: ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 4,4 persen. Indonesia menduduki peringkat tiga pertumbuhan ekonomi setelah China (tumbuh 6,1 persen) dan India (5,8 persen). Ini adalah berkah sekaligus prestasi, karena pertumbuhan ekonomi Malaysia misalnya, minus 6,1 persen, Thailand minus 7,1 persen, Singapura minus 10,1 persen, Korea Selatan minus 4,3 persen, dan Jepang minus 9,7 persen.

Demikianlah tugas kita bersama dalam jangka pendek, yaitu mewujudkan kepemimpinan nasional yang kuat dan memilih pemimpin yang tepat untuk mewujudkan kepemimpinan yang kuat itu. Dan kita sepakat memilih SBY-Boediono.

Kita juga harus merumuskan politik jangka panjang. Kalau Bank Dunia menyebutkan bahwa sebanyak 108,78 juta orang atau 49% dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin, maka mayoritas dari mereka tentu saudara-saudara kita dari kaum Nahdliyyin. Menurut Bank Dunia, yang disebut miskin adalah mereka yang hidup dengan penghasilan kurang

dari 2 dollar AS atau Rp20.000 per hari. Kalau data BPS menyebutkan bahwa lebih dari separo penduduk Indonesia hanya tamat sekolah dasar, maka tentu kebanyakan dari mereka adalah saudara kita dari kalangan warga NU. Kalau mayoritas warga miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, maka kebanyakan dari mereka juga saudara kita sendiri dari kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*.

Karena itu, ke depan dan dalam jangka panjang, kita harus serius memikirkan ekonomi dan pendidikan warga Nahdliyyin. Karena hanya dengan pendidikan dan tingkat kehidupan yang layaklah, kaum Nahdliyyin akan semakin besar kiprahnya dalam kehidupan bangsa di masa depan. NU dan ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah* memang telah menjadi sumber perekat kehidupan bangsa. Tetapi, menjadi perekat saja tidak cukup jika tidak ditopang oleh kualitas pendidikan dan kehidupan ekonomi yang layak.

Ibarat sebuah pohon, selama ini NU dan ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah* telah menjadi payung bagi bangsa yang majemuk ini. Tetapi, jika pohon itu tidak dipupuk, maka daunnya akan layu dan ronyok, sehingga tidak bisa memayungi kemajemukan itu lagi. Pohon itu harus disiram dan dipupuk agar tumbuh subur. Untuk itu, pohon itu harus disiram dengan pendidikan yang memadai dan dipupuk dengan tingkat kesejahteraan yang layak.

Pendidikan Maarif dan Pesantren harus kita kembangkan. Pertanian warga NU juga harus kita optimalkan. Usaha-usaha

dan bisnis kaum Nahdliyyin harus kita dorong. Dengan begitu, NU tidak semata-mata mengurus pengajian, yasinan, atau tahlil saja, tetapi juga mengurus bagaimana agar pengajian, yasinan, dan tahlilan itu bisa benar-benar membawa berkah, tidak karena utang sana-utang sini.

Mari kita tengok kembali tujuan didirikannya NU, seperti dirumuskan dalam *Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama Tahun 1926*. NU didirikan dengan tujuan (1) memajukan pendidikan madrasah yang berdasar agama Islam; (2) memakmurkan masjid, langgar, dan pesantren; (3) memperhatikan nasib anak-anak yatim dan fakir miskin, dan (4) mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan sektor pertanian dan perdagangan. Sebelum NU berdiri, para ulama sudah mendirikan *Nahdlatut Tujjar*, yang artinya kebangkitan para pedagang. *Nahdlatut Tujjar* merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasi dan pengembangan usaha kecil. Kebanyakan pendiri NU seperti KH A Wahab Chasbullah adalah pedagang, sekurang-kurangnya memiliki unit produksi yang membuat mereka bisa mandiri secara ekonomi

Itulah gerakan politik semesta kita dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kebersamaan semua pihak, kebersamaan antara ulama dan umat, antara NU dan PKB, insya Allah tujuan itu bisa kita capai secara bertahap dan berkelanjutan. Semoga pertemuan ini bisa menjadi awal yang baik dan berkah menuju tujuan yang mulia itu.[]



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R O'G. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Cornell University Press.
- Arrighi, Giovanni & Beverly J. Silver. 1999. *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
- Asy'ari, Hadratus Syaikh Hasyim. 1994. *At-Tibyan wi Nahyi 'an Muqattha'ati al-Arham wal Ihwan*. Jombang: Maktabah at-Turath al-Islami bi Ma'had Tebuireng.
- Barlow, Maude. 2001. "The Global Monoculture: 'Free Trade' Versus Culture and Democracy". *Earth Island Journal*. Autumn.
- Binder, Leonard. 1988. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Boeke, JH. 1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. New York: International Secretariat, Institute of Pasific Relations.

- Bosworth, CE. 1976. "The Historical Background of Islamic Civilization". RM Savory (ed.). *Introduction to Islamic Civilization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brander, Bruce G. 1998. *Staring into Chaos: Explorations in the Decline of Western Civilization*. Spence Publishing Company.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Engineer, Asghar Ali. 1993. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon Books.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1983. *Al-Iqtishad fi al-'Irtiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Gibb, Hamilton AR. 1962. "al-Mawardi's Theory on the Chalipate." Stanford J Shaw & William R Polk (ed.). *Studies on Civilization of Islam*. Bolton: Beacon Press.
- Harris, David. 1992. *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies*. London: Routledge.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press.

- Khaldun, Ibnu. tt. *Muqaddimah*. ttp.: Dar al-Firk.
- Kotler, Philip & Somkid Jatusripitak. 1997. *The Marketing of Nations*. New York: The Free Press.
- Liddle, R William. 1973. "Modernizing Indonesian Politics." *Political Participation in Modern Indonesia*. Yale University Southeast Asian Studies.
- Lipset, Saymour M. 1981. *Political Man: The Social Bases of Politics*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Madjid, Nurcholish. 1989. "Aktualisasi Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah." Muntaha Azhari & Abdul Mun'im Saleh (eds.). *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Mawardi, Al. 1975. *Adab ad-Dunya wa ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muzadi, KH. A. Muchith. 1994. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM DIY.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1993. *A Young Muslim's Guide to the Modern World*. Chicago: KAZI Publication.
- PBNU. 1985. *Keputusan Mukhtamar Ke-27 Nahdaltul Ulama*. Jakarta: PBNU.
- Przeworski, Adam, Luiz Carlos BP, & Jose Maria Maravall. 1993. *Economic Reforms in New Democracies, A Social-Democratic Approach*. Australia: Cambridge University Press.
- Reid, Anthony. 1974. *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Victoria, Australia: Longman.

- Samson, Allan A. 1978. "Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam." Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.). *Political Power and Communications in Indonesia*. Berkeley-Los Angeles, London: University of California Press.
- Samuelson, Robert J. 2008. "Goodbye to Global Free Trade." *Newsweek*. 31 Desember–7 Januari.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Wahid, Abdurrahman. 1978. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 1989. "Pengantar." Einar Martahan Sitompul. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 1974. "Pesantren sebagai Sub-Kultur." M Dawam Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Watt, W Montgomery. 1970. *Bell's Introduction to the Qur'an*. Edinburg University Press.
- Yunus, Mohammad. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia.

## SUMBER TULISAN

1. Globalisasi, Agama, dan Kemiskinan, *Seputar Indonesia*, 30 Agustus 2008.
2. Islam, Kepemimpinan, dan Kemiskinan, *Jawa Pos*, 1 Desember 2008.
3. Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Bangsa, sumber tulisan belum terlacak.
4. Demokrasi dan Mentalitas Elit, *Indo Pos*, 22 Maret 2008.
5. Kaum Muda, Krisis Ideologi, dan Kepemimpinan Nasional, dimuat dalam buku.
6. Momentum untuk Bangkit, *Seputar Indonesia*, 23 Desember 2008.
7. Spirit al-Quran untuk Mengatasi Krisis Global dan Kepemimpinan, pidato ilmiah yang disampaikan pada “Wisuda Hafidh ke-20 dan Bin-Nadhar ke-18, Madrasatul Quran Tebuireng Jombang, 13 Januari 2009.
8. Umat Islam dan Kebangkitan Nasional, *Seputar Indonesia*, 20 Mei 2008.
9. Kiai dan Kebangkitan Nasional, sumber tulisan belum terlacak.
10. Khilafah, NKRI, dan Visi Nasionalisme Islam, Disampaikan pada Seminar Internasional “Khilafah vis a vis NKRI,” dalam rangka Temu Alumni Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 November 2007.

11. Transfigurasi Gerakan Islam, *Seputar Indonesia*, 9 Januari 2008.
12. Puasa dan Visi Transformatif Islam, *Seputar Indonesia*, 29 September 2007.
13. Puasa Terkepung Kultur Seremonial, *Jawa Pos*, 6 September 2008.
14. Belajar Politik kepada Tokoh-Tokoh Besar NU, sumber tulisan belum terlacak.
15. Berguru pada Pendiri NU, *Seputar Indonesia*, 3 Februari 2008.
16. Keteladanan Politik Kiai, *Seputar Indonesia*, 14 April 2008.
17. NU, Jendela Rumah Indonesia, *Surya*, 2 Februari 2008.
18. NU dan Transformasi Bangsa, *Pikiran Rakyat*, 9 Februari 2008.
19. NU dan Demokratisasi Bangsa, *Kedaulatan Rakyat*, 31 Januari 2008.
20. NU dan Perubahan Masyarakat Bangsa, *Seputar Indonesia*, 30 Januari 2009.
21. NU sebagai Gerakan Ekonomi, Pemikiran, dan Pendidikan, *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari 2008.
22. Menjaga NU yang Moderat dan Toleran, *Suara Merdeka*, 31 Januari 2008.
23. 63 Tahun Resolusi Jihad: Nasionalisme Politik Ulama NU, *Seputar Indonesia*, 27 Oktober 2008.
24. Perintah Kiai-Kiai pada Saya, *Seputar Indonesia*, 2 Mei 2008.
25. PKB Baru dan Semangat Perubahan, *Seputar Indonesia*, 22 Juli 2008.
26. Optimisme Menyongsong 2009, *Seputar Indonesia*, 20 Juni 2008.
27. SBY dan Visi Politik NU-PKB, Pengantar buku *Mengapa NU-PKB Memilih SBY-Boediono* (2009).
28. Tugas Kepemimpinan Nasional Ke Depan, pidato politik disampaikan pada “Silaturahmi Kiai Kampung” di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 25 Juni 2009.

# INDEKS

## A

*a liberating force* 71

*a liberating religion* 3

Abdurrahman Wahid

16, 84, 113, 130,

140, 151, 157

Abu Bakar 67

Abu Hanifah 157

Abu Hasan 131

Abu Mansur al-Maturidi 131

Afrika Barat 46, 64, 88

*Ahlus Sunnah wal Jamaah*

52, 61, 76, 77,

80, 82, 158, 185,

186, 187, 188, 190,

194, 196

akademisi 20

*akhlaq* 52, 55, 108, 118,

119, 121, 122, 175

akumulasi finansial 17, 40

al-Ghazali 53, 77, 131, 188

*al-imamah al-uzhma* 77

*al-imamah as-shughra* 77

al-Juwaini 77

al-Khulafa ar-Rasyidun 15

al-Mamun 47

al-Mansur 47

al-Maududi 77, 78

al-Mawardi 14, 51, 77, 194

al-Quran 21, 45, 46, 47,

48, 50, 51, 52, 53,

54, 56, 58, 60, 61,

77, 139, 157

Ali Abd ar-Raziq 78

Aljazair 88

Amangkurat IV 71

Amerika Latin 14, 17, 22,

32, 40, 63, 128, 189

Amerika Serikat

4, 8, 17, 31, 40, 48

anak yatim 152, 197

anti-kolonialisme 70

APBN 42

*aqidah* 55

ar-Rasyid 47

Arab 3, 15, 45, 46,

47, 50, 91, 95, 127

*archaism* 90

aristokrat kolonial 71  
*as-sulthan al-qahir* 14, 52  
Asghar Ali Engineer 3, 95  
Asia Selatan 88  
Asia Tengah 88  
Asia Tenggara 46, 64, 88  
astronomi 47  
Australia 17, 40

## B

Badan Pusat Statistik 7  
*bahtsul masail* 150  
Bangladesh 1, 11  
Bank Dunia 7, 195, 196  
barbar 33, 45  
BBM 48, 49  
benturan peradaban 65  
*binary opposition* 33  
biner-komplementer 34, 37  
Brazil 18, 41  
*breakdown* 88  
BRIC 18, 41  
Budi Utomo 69  
BUMN 31  
Bung Karno 26, 65, 66

## C

cadangan devisa 41  
*chaotic* 119  
Cina 1, 14, 17, 18, 23,  
32, 40, 41, 128  
*civic culture* 28  
*continuum* 150  
*counter-discourse* 78  
*counter-hegemony* 78

## D

dakwah  
3, 50, 95, 114, 115, 151  
Daniel Bell 30  
*dar as-sulh* 83, 133  
*dar Islam* 80, 106, 118  
*darul Islam* 80, 106, 118  
degradasi 22, 28, 66, 91,  
97, 103, 121, 154,  
175, 177, 182  
deideologisasi 73  
deklarator 169, 171  
Dekrit Presiden 83  
demokratis 16, 20, 78,  
88, 90, 100, 156,  
176, 188  
demokratisasi 19, 21, 22,  
33, 137, 138, 141,  
156, 186  
Denanyar 108  
*detachment* 90  
dinamisasi 26, 37, 85,  
124, 134, 172, 180  
dinamisator 187  
Dinasti Abbasiyah 47  
Diyauddin ar-Rais 77  
Djamaludin Malik 107  
dualisme 151  
dualistik 19, 20  
dualistis 20  
dunia Arab 45, 46, 127  
*Dzikrul Ghofilin* 139

## E

Edward Shils 30  
egaliter 3

egoisme 23  
 ekonomi dualistik 20  
 eksklusif 64, 65, 163  
 eksploitasi 22, 34, 50, 54  
 eksploitatif 3, 8, 73, 95  
 empiris 21  
 empirisme 21  
 etis 5, 82

## F

*failed state* 30  
 fakir miskin 10, 152, 197  
 Farhat A Hussein 47  
 Farm Bill 4  
 fatalistik 156  
*faudla* 77, 119, 189  
 filsafat Barat 21, 33  
 filsafat Timur 21  
 finansial 2, 17, 18,  
 40, 41, 48, 49  
 fiqih 55, 57, 59, 81, 82,  
 83, 84, 107, 113,  
 118, 119, 121, 122,  
 124, 127, 131, 132,  
 133, 135, 138, 139,  
 141, 144, 145, 146,  
 150, 157, 158, 161,  
 162  
*firqah* 118  
 formalisasi 99  
 formalisme 91, 96, 113, 164  
 Francis Fukuyama 30  
*free-market ideology* 20  
 fundamentalisme 8, 164  
 fundamentalisme pasar 8

## G

geologi 47  
 geopolitik 17, 37, 39, 40  
 gereja Katolik 63  
 globalisasi 1, 2, 3, 8,  
 11, 14, 22, 33, 96,  
 97, 159, 189  
 Gorbachev 11, 14, 22, 41  
 gradualisme 151  
 gravitasi 18  
 gua Hira 91

## H

Habibie 16  
 Hadis 21, 57, 77, 119  
 Hadratus Syeikh 57, 112, 146  
 hak asasi manusia 33  
 Hamengku Buwono I 71  
 Hamka 66  
 Hanafi 77, 87, 131,  
 145, 146, 157  
 Hanbali 77, 131, 145, 146  
 Hasan al-Banna 78  
 Hasan al-Bashri 157  
 Hassan Hanafi 3, 87, 94  
 hedonis 23, 109, 119  
 hedonistik 85, 97  
 hegemonik 75, 78, 176, 182  
 heroisme 72, 162  
 Hindia Belanda 80, 118, 120  
 Hiroko Horikoshi 144  
 Hizbullah 72  
*hudan lil muttaqin* 46  
*hudan lin nas* 46  
*hujjah* 125

humanisme 21  
humanistik 141

## I

Ibnu Khaldun 60, 77  
identitas nasional 24  
ideologi 27, 28, 29, 30, 31,  
37, 49, 51, 52, 53,  
64, 73, 78, 79, 80,  
81, 90, 118, 147, 163,  
183, 186, 187, 190  
ideologis 188  
ideologisasi 73, 77  
Idham Chalid 107  
*ikhtilaf* 84, 157  
*imamah* 76  
imitasi 87  
imperialisme 34  
India 8, 14, 17, 18, 40,  
41, 49, 87, 128, 130,  
189, 195  
industri dasar 42  
industri lokal 43  
industri nasional 42, 43  
infak 9, 10  
Inggris 17, 40, 47, 88  
inklusif 65  
instan 36, 96, 101, 103  
invokasi 96  
Iran 17, 18, 40, 41  
Isa 3  
*istikharah* 169  
*istiqamah* 105, 114  
Italia 88

## J

Jabariyah 156, 159  
*jabiliyyah* 15  
Jepang 39, 41, 114,  
189, 195  
JH Boeke 20  
*jihad* 71, 72, 113, 144, 161  
*jumud* 130, 134  
Junaaid al-Baghdadi 131  
juru damai 128, 155, 156  
Jusuf Kalla 19

## K

kaidah fiqih 59, 83, 141, 146  
Kanada 17, 40  
kapitalisme internasional 22  
kapitalisme liberal 30  
karakter bangsa 24  
karitatif 10  
kaum miskin 8, 9, 10, 11, 50  
Kazakhstan 18, 40  
kediktatoran 54  
kemaslahatan 76, 77, 109,  
133, 139, 163, 171,  
172, 194  
kemiskinan 2, 4, 7, 8, 9,  
10, 45, 49, 96, 100  
Kenichi Ohmae 31  
kepemimpinan nasional 13,  
14, 16, 17, 18, 22,  
23, 27, 32, 37, 40,  
193, 195  
kepentingan nasional 1, 11,  
18, 23, 31, 32, 42,  
118, 162

- kepentingan rakyat 1  
KH A Malik Madani 169  
KH A Muchit Muzadi 80, 107  
KH A Mustofa Bisri 169  
KH A Wahab Chasbullah  
115, 120, 152, 197  
KH A Wahid Hasyim 72,  
82, 83, 106, 107,  
114, 144  
KH Abdul Aziz Mansyur  
180, 182  
KH Achmad Siddiq 107, 109  
KH Ahmad Dahlan 66  
KH Bisri Syansuri 57, 108,  
120, 121, 162  
KH Dimiyati Rois 181, 185  
KH Hamim Djazuli 139  
KH Hasyim Asy'ari 57, 66,  
72, 81, 106, 112, 115  
KH Hasyim Muzadi 176, 179  
KH Machrus Ali 109  
KH Masykur 82  
KH Muhlas Dimiyati 170  
KH Muhtadi Dimiyati 181  
KH Nurul Huda Djazuli 181  
KH Sahal Mahfudh 169  
KH Saifuddin Zuhri 107  
KH Suady Wijaya 140  
KH Zainuddin Djazuli 181  
khalifah 47, 52, 57, 94  
*khalwat* 91, 114  
kharisma 35, 112  
kharismatik 112  
Khawarij 156  
khilafah 76, 77, 78, 79, 84  
*khilafiyah* 66  
koersif 10  
kolonialisme 34, 64, 70,  
73, 77, 89, 112, 113,  
144  
komersialisasi 97  
komplementer 11, 17, 33,  
34, 35, 37, 54, 56,  
79, 134, 163  
konfidensi positivistik 30  
konglomerat 3  
konsolidasi 14, 152, 172,  
177, 180  
Konstituante 133, 147  
konstitusi 10, 31  
konstitusional 4, 186  
konsumeristik 37, 97  
kontrak karya 42  
kontraproduktif 16  
koperasi 152, 197  
Korea Selatan 195  
kosmopolit 125, 132  
kosmopolitanisme 134, 145  
Krapyak 109, 193  
kriminalitas 2  
krisis finansial 18, 48, 49  
krisis global 7, 42, 48  
krisis hegemoni 17, 39, 40, 41  
kultur demokrasi 137, 138  
kultur instan 89  
Kuwait 47  
Kyrgyzstan 18, 41  
L  
laboratorium sosial 152  
langgar 85, 152, 197

liberal 4, 10, 20, 22, 30,  
31, 53, 55, 100, 153,  
160, 164  
liberalisasi 11, 14, 21, 22,  
23, 31, 32, 33, 41,  
70, 89, 148, 159  
liberalisme 1, 8, 10, 11,  
14, 21, 22, 23, 30,  
32, 41  
liberalisme terkontrol 1, 11,  
14, 23, 32, 41  
Libya 88  
*life style* 50  
lingkaran setan kemiskinan 9

## M

M Maftuh Basyuni 111  
M Natsir 65  
*madllarat* 70, 169, 171  
Maghribi 88  
Malaysia 32, 88, 195  
Maliki 77, 131, 145,  
146, 157  
manusia satu dimensi 50, 55  
*marketization* 21  
Maroko 46, 88  
Marquis de Condorcet 4  
Martin van Bruinessen 71  
masjid 152, 197  
Masjid Pualam Biru 87, 130  
*maslahat* 171, 177, 186  
massa mengambang 73  
masyarakat Arab 3, 15, 47,  
50, 91, 95  
Masyumi 26, 107, 114  
Mataram 71

materialisme 3  
Matori Abdul Djalil 180  
mazhab 66, 77, 131,  
132, 138, 145, 146,  
150, 158  
Megawati 16  
Mekkah 3, 95  
merkantilisme 22  
Mesir 87  
metafisika 56  
milenium 8  
militer 11, 17, 33,  
40, 54, 111, 112  
*mimesis* 88  
moderat 125, 128, 147,  
155, 156, 157, 158,  
159, 160, 187  
*modern minded* 69  
modernisme 88, 133, 149  
modernitas 33, 89, 97, 147  
Mohammad Yunus 1, 11  
momentum 13, 15, 16,  
17, 18, 39, 42, 43,  
74, 103, 149, 182, 191  
Mongolia 18, 41  
monokultur global 21  
monokultural 125  
Montgomery Watt 46  
moral 5, 9, 10, 28, 49,  
50, 51, 74, 78, 82,  
93, 94, 96, 102, 109,  
120, 134, 135, 169,  
172, 191  
moralitas 28, 49  
Muawiyah 57  
*mufassir* 57

Muhammad SAW 3, 8, 15,  
51, 52, 91, 124, 151  
Muhammadiyah 66  
mujahadah Sapu Jagad 140  
*Muqaddimah* 60, 87  
*mursyid* 151  
Musa 3

## N

Nahdlatul Ulama 26, 55, 59,  
66, 76, 80, 82, 105,  
112, 117, 123, 138,  
144, 149, 152, 155,  
156, 171, 185, 197  
Nahdlatul Wathan 151  
Nahdlatut Tujjar  
151, 152, 197  
Nahdliyyin 196, 197  
nasionalis 64, 107,  
113, 121, 151  
nasionalisme 65, 84,  
113, 120, 162  
nasionalistik 5  
negara Islam 59, 64, 80, 83,  
90, 106, 118, 133, 147  
NKRI 75, 80, 81, 82, 84,  
107, 113, 120, 127,  
133, 186, 187, 188,  
190  
Nobel Perdamaian 1  
non-dikotomis 48  
Nurcholish Madjid 158, 189

## O

olah batin 102  
oligarki 3, 95

oportunis 130, 134, 160  
oposisi biner 33, 34, 54  
Orde Baru 73, 108, 137, 177  
Orde Lama 108  
otentisitas 124  
otoritarianisme 3  
*overclaim* 79  
*overclaiming* 164

## P

Pakistan 18, 41  
Paman Sam 41  
Pancasila 59, 81, 82, 83,  
84, 107, 127, 133,  
144, 147, 155, 161,  
163, 186, 187, 188,  
190  
paradoks 2, 8, 27, 137, 164  
paradoksals 100  
patriotisme 75, 84  
PBNU 82, 162, 169,  
171, 176, 178,  
179, 182  
pemimpin nasional 11, 14,  
17, 18, 22, 39, 43, 193  
pemiskinan kultural 158, 189  
pemurnian 113  
Pencerahan 90  
pengangguran 2, 7, 22,  
28, 96, 100  
Perang Dunia II 18  
perdagangan 1, 31,  
50, 153, 197  
permisif 96  
pertanian 4, 31, 43, 153, 197  
perusahaan asing 42

pesantren 74, 106, 111,  
112, 113, 114, 117,  
144, 150, 152, 170,  
185, 197  
Philip Kotler 9  
PHK 49  
PKB 167, 168, 169, 170,  
171, 172, 173, 174,  
175, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 182,  
183, 185, 190, 191,  
194, 198  
pluralisme 132  
pluralistik 79, 186, 187  
polisi dunia 17, 40  
politheisme 50  
*political mindset* 33  
politisi 20, 35  
positivistik-fungsional 101  
positivistik-instrumental 54  
pragmatis 23, 26, 36,  
85, 103, 119  
Prancis 4  
privatisasi 11, 31, 96  
progresif 27, 153  
proteksionisme 11  
proteksionistik 5  
protektif 31, 32  
puritan 125, 159

## Q

Qadariyah 156, 159  
*qawaid fiqhiyah* 146  
qunut 157  
Quraisy 3

## R

radikalisasi 158, 159  
Ramadhan 94  
rasionalisasi 30, 34, 79, 90  
rasionalisme 21  
rasionalitas-normatif 124  
Ravi Batra 8  
Raymond Aron 30  
reaksioner 158, 189  
reformasi 15, 177  
regenerasi 16, 183  
rekonsiliasi internal 158  
renegosiasi 42  
resi 114  
Resolusi Jihad 113, 161,  
162, 165  
retrogresif 27  
revolusi 3, 25, 50,  
61, 72, 89, 94, 108  
revolusi fisik 72  
revolusi pemuda 25  
revolusi transendensi 94  
revolusioner 3, 91, 95  
Robert Chambers 10  
Robert J Samuelson 5  
romantisme 87, 89  
Rostowian 73  
Rusia 1, 11, 14, 17, 18,  
22, 23, 32, 40, 41,  
43, 75, 88, 128, 189

## S

Sabilillah 72  
sadaqah 9, 10

- Sartono Kartodirdjo  
22, 71, 162  
Sekutu 39, 55, 81,  
107, 144, 161  
selebriti 97, 102  
semaan al-Quran 139  
sensasional 37  
sentralistik 176  
separatisme 147  
serba-fiqih 124, 135, 157  
Seymour Martin Lipset 30  
Seyyed Hossein Nasr 21, 89  
Shanghai Cooperation Organiza-  
tion 17, 40  
Shumubu 106, 114  
simbolisme 96  
Singapura 195  
sintesis 21  
*siyasah* 55, 70  
Snouck Hurgronje  
98, 129, 145  
Somkid Jatusripitak 9  
sosialis 1  
sosialisme 31  
spiritualitas 28, 29, 49, 50,  
60, 61, 102, 119,  
124, 125, 126, 132,  
139  
St Thomas Aquinas 21  
stabilisator 186  
stimulus 43  
subsidi 4, 31, 43  
Sultan Agung Tirtayasa 71  
Sultan Mataram 71  
*sunnatullah* 143  
Sunni 56, 193  
suplementer 90  
Susilo Bambang Yudhoyono  
16, 190, 194  
Susuhunan Prabu Jaka 71  
Suvit Maesincee 9  
Syeikh Abdul Samad 71  
Syeikh Yusuf Makassar 71  
Syiah 56, 156
- T**
- Taj Mahal 87, 130  
Tajikistan 18, 41  
*takbiratul ihram* 93  
*take and give* 134  
Tanam Paksa 22  
*taglid* 158  
*tariqah* 124, 139  
tasawuf 119, 139  
Tashwirul Afkar 151, 152  
Tebuireng 106, 112  
teknokratis 73  
teologi 3, 56, 81, 95,  
111, 131, 156, 158  
teologis 81, 118, 119,  
120, 122, 162  
teologisasi 118  
tertib agama 52, 58, 59, 188  
tertib politik 58, 59, 188  
Thailand 195  
*the end of history* 31  
*the end of ideology* 30  
*the end of nation state* 31  
*the founding fathers* 27  
toleran 125, 128, 132, 145,  
155, 156, 157, 158,  
159, 160, 187

Toynbee 88, 91  
tradisionalisme 21  
transfigurasi 91  
transformatif 95, 97, 155,  
157, 158, 159, 160  
transisi hegemoni 17, 18, 40  
transisi politik 15, 16, 25  
transmisi 150  
Tunisia 88  
Turkmenistan 18, 41

## U

UKM 43  
Umar ibn Khattab 15  
Uni Eropa 5, 18, 41  
Uni Soviet 40, 75  
*unintended consequences* 11  
usaha kecil 152, 197  
*usul al-fiqih* 132

UUD 1945 10, 11, 31, 81,  
82, 83, 127, 161,  
186, 187  
Uzbekistan 18, 41

## V

visioner 11, 13, 22, 32, 67  
Vladimir Putin 11,  
14, 23, 41, 75

## W

wahyu 3, 50, 95  
*wisdom* 61, 105, 115  
*world view* 34, 117

## Z

Zainul Arifin 107  
zakat 9, 10

## BIODATA PENULIS

**H. A. Muhaminin Iskandar, M.Si.**, adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2005-2010 dan Wakil Ketua DPR 2004-2009, jabatan yang sebelumnya sudah dipercayakan kepadanya, 1999-2004. Lahir di Jombang Jawa Timur pada 24 September 1966. Menyelesaikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1991 dan pasca sarjana (S2) jurusan Komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI).

Sejak mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi, mulai dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisipol UGM sampai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta (1989), dan tahun 1994 terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII. Selain aktif dalam berbagai kelompok studi di Jakarta sejak tahun 1991, ia juga bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Pendapat Umum (LPU), menjadi Kepala Litbang Tabloid *Detik*, dan bekerja pada Hellen Kellner Internasional.

Pada usia yang relatif muda, ia ikut membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa dengan menjadi anggota Tim Sembilan dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB yang pertama. Pada Pemilu 1999 terpilih sebagai anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang pertama, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI hasil Pemilu

1999. Dan pada Pemilu 2009, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Buku karyanya yang sudah diterbitkan, antara lain: *Masyarakat Indonesia Abad XXI* (1996), *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran* (1997), *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa* (2000), *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita* (2004), *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa dengan Visi Ulama, Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (2006), *Spiritualitas Sepak Bola: Perspektif Sosial Politik Piala Dunia 2006* (2006), dan *Gus Dur, Islam, dan Kebangkitan Indonesia* (2007).[]



# MOMENTUM UNTUK BANGKIT

PERCIKAN PEMIKIRAN EKONOMI, POLITIK DAN KEAGAMAAN

**Pada tahun 1945, ketika krisis dan transisi hegemoni akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, para pemimpin nasional kita dengan cerdas dan berani bisa mensiasati momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa.**

**Krisis ekonomi global dan transisi hegemoni dunia saat ini juga menjadi momentum bagi bangsa ini untuk bangkit.**

ISBN 979-8452-96-8



9 789798 452963

